



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Kerja Tahun 2023 ini kami susun sebagai langkah dalam mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis tersebut yaitu terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia, meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata, serta meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Berpedoman dengan Rencana Kerja 2023 ini, diharapkan kegiatan pada semua unit kerja pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2023 menjadi lebih terencana dan terarah terbaik. Perencanaan yang baik tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi lebih maksimal sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak dan pada akhirnya dapat turut serta dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

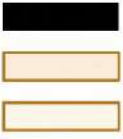
Plt. Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Investasi dan
Pertambangan



Rifky Setiawan

DAFTAR ISI

DOKUMEN KRISNA	4
UNIT KERJA ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI	13
KAK Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera	
UNIT KERJA ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA	35
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sector jasa Perdagangan	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sector Jasa Infrastruktur dan Logistik	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	
UNIT KERJA ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS.....	55
KAK Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis	
UNIT KERJA ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA	81
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	
UNIT KERJA ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN	100
KAK Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia	
KAK Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	
KAK Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia	
SEKRETARIAT DEPUTI	127
KAK Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
KAK Layanan Umum	
KAK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	
KAK Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan	
KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PDB Kemaritiman	
DOKUMEN RKAKL 2023.....	193



DOKUMEN

KRISNA



REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
- 2. PROGRAM** : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
- 3. SASARAN PROGRAM** : 02 - Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 4. KEGIATAN** : 6008 - Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : 50 - Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
 51 - Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
 52 - Asisten Deputi Investasi Strategis
 53 - Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
 55 - Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 54 - Asisten Deputi Pertambangan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan		14.100.000,0
01.01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan	17	
	Total		14.100.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan										14.100.000,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										12.000.000,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi								000 - Bukan Tematik		1.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	TOD JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja										700.000,0
		Pusat	Pusat								700.000,0
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera										900.000,0
		Pusat	Pusat								900.000,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa								000 - Bukan Tematik		2.000.000,0
	051 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan										720.000,0
		Pusat	Pusat								720.000,0
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan logistik										680.000,0
		Pusat	Pusat								680.000,0
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
01.ABB.003	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis								000 - Bukan Tematik		2.100.000,0
	051 - Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan										490.000,0
		Pusat	Pusat								490.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau										1.100.000,0
		Pusat	Pusat								1.100.000,0
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis										510.000,0
		Pusat	Pusat								510.000,0
01.ABB.004	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha								000 - Bukan Tematik		1.900.000,0
	051 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial										680.000,0
		Pusat	Pusat								680.000,0
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha										585.000,0
		Pusat	Pusat								585.000,0
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi										635.000,0
		Pusat	Pusat								635.000,0
01.ABB.005	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan								000 - Bukan Tematik		4.400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	TOD JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa atau Permasalahan Investasi dan Perdagangan										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri										1.100.000,0
		Pusat	Pusat								1.100.000,0
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PDB Kemaritiman										2.300.000,0
		Pusat	Pusat								2.300.000,0
01.ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam										2.100.000,0
01.ABI.001	Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Pertambangan								000 - Bukan Tematik		2.100.000,0
	051 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia										420.000,0
		Pusat	Pusat								420.000,0
	052 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia										834.000,0
		Pusat	Pusat								834.000,0
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hillirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia										846.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	TOD JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								846.000,0
Total											14.100.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan				14.100.000,0				14.100.000,0	14.100.000,0	14.100.000,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		12.000.000,0				12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	2	Rekomendasi Kebijakan		1.600.000,0	2	2	2	1.600.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
01.ABB.001.051	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	1,0	Rekomendasi Kebijakan	700.000,0	700.000,0	1,0	1,0	1,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0
01.ABB.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera	1,0	Rekomendasi Kebijakan	900.000,0	900.000,0	1,0	1,0	1,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa	3	Rekomendasi Kebijakan		2.000.000,0	3	3	3	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.ABB.002.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	720.000,0	720.000,0	1,0	1,0	1,0	720.000,0	720.000,0	720.000,0
01.ABB.002.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	1,0	Rekomendasi Kebijakan	680.000,0	680.000,0	1,0	1,0	1,0	680.000,0	680.000,0	680.000,0
01.ABB.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	1,0	Rekomendasi Kebijakan	600.000,0	600.000,0	1,0	1,0	1,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
01.ABB.003	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis	3	Rekomendasi Kebijakan		2.100.000,0	3	3	3	2.100.000,0	2.100.000,0	2.100.000,0
01.ABB.003.051	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	490.000,0	490.000,0	1,0	1,0	1,0	490.000,0	490.000,0	490.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN // KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT // RINCIAN OUTPUT // KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABB.003.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000,0	1.100.000,0	1,0	1,0	1,0	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
01.ABB.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis	1,0	Rekomendasi Kebijakan	510.000,0	510.000,0	1,0	1,0	1,0	510.000,0	510.000,0	510.000,0
01.ABB.004	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	3	Rekomendasi Kebijakan		1.900.000,0	3	3	3	1.900.000,0	1.900.000,0	1.900.000,0
01.ABB.004.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial	1,0	Rekomendasi Kebijakan	680.000,0	680.000,0	1,0	1,0	1,0	680.000,0	680.000,0	680.000,0
01.ABB.004.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1,0	Rekomendasi Kebijakan	585.000,0	585.000,0	1,0	1,0	1,0	585.000,0	585.000,0	585.000,0
01.ABB.004.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	635.000,0	635.000,0	1,0	1,0	1,0	635.000,0	635.000,0	635.000,0
01.ABB.005	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan	3	Rekomendasi Kebijakan		4.400.000,0	3	3	3	4.400.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0
01.ABB.005.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa atau Permasalahan Investasi dan Perdagangan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABB.005.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000,0	1.100.000,0	1,0	1,0	1,0	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
01.ABB.005.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PDB Kemaritiman	1,0	Rekomendasi Kebijakan	2.300.000,0	2.300.000,0	1,0	1,0	1,0	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0
01.ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian/ Rekomendasi		2.100.000,0				2.100.000,0	2.100.000,0	2.100.000,0
01.ABI.001	Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Pertambangan	3	Rekomendasi Kebijakan		2.100.000,0	3	3	3	2.100.000,0	2.100.000,0	2.100.000,0

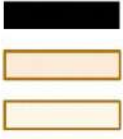
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABI.001.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia	1,0	Rekomendasi Kebijakan	420.000,0	420.000,0	1,0	1,0	1,0	420.000,0	420.000,0	420.000,0
01.ABI.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	1,0	Rekomendasi Kebijakan	834.000,0	834.000,0	1,0	1,0	1,0	834.000,0	834.000,0	834.000,0
01.ABI.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia	1,0	Rekomendasi Kebijakan	846.000,0	846.000,0	1,0	1,0	1,0	846.000,0	846.000,0	846.000,0
Total					14.100.000,0	-	-	-	14.100.000,0	14.100.000,0	14.100.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan		14.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.100.000,0
01.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
01.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
01.ABB.001.051	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
01.ABB.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera	Utama	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
01.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.ABB.002.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan	Utama	720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0
01.ABB.002.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Utama	680.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.000,0
01.ABB.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Utama	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.ABB.003	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis		2.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0
01.ABB.003.051	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	Utama	490.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABB.003.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	Utama	1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0
01.ABB.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis	Utama	510.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510.000,0
01.ABB.004	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha		1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0
01.ABB.004.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial	Utama	680.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.000,0
01.ABB.004.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Utama	585.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585.000,0
01.ABB.004.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	Utama	635.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635.000,0
01.ABB.005	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan		4.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.400.000,0
01.ABB.005.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa atau Permasalahan Investasi dan Perdagangan	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.ABB.005.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri	Utama	1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0
01.ABB.005.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PDB Kemaritiman	Utama	2.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300.000,0
01.ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		2.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0
01.ABI.001	Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Pertambangan		2.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0
01.ABI.001.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia	Utama	420.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420.000,0
01.ABI.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	Utama	834.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	834.000,0
01.ABI.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hillirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia	Utama	846.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846.000,0
Total			14.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.100.000,0

Jakarta, 03 Oktober 2022



UNIT KERJA

**ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RO 001
REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI**

Kementerian	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Indeks Daya Saing Global (IDSG)
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Program	:	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	:	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Program	:	Jumlah kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi yang dihasilkan
Kegiatan	:	Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Koordinasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan
Klasifikasi Rincian Output	:	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Indikator KRO	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Perdagangan
Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Volume Rincian Output	:	2 Dokumen
Satuan Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- j. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- k. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;

2. Gambaran Umum

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Pada tahun 2022, capaian realisasi investasi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp282,4 triliun atau lebih tinggi 28,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 serta meningkat 16,9 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2021. Capaian ini berkontribusi sebesar 23,5 persen dari target yang sebesar Rp1.200 triliun. Pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) triwulan I/2022 meningkat sebesar 25,1

persen, dari Rp108,0 triliun di triwulan I/2021 menjadi Rp135,2 triliun. Sedangkan investasi penanaman modal asing (PMA) triwulan I/2022 meningkat 31,8 persen dibanding triwulan I/2021, dari Rp111,7 triliun menjadi Rp147,2 triliun.

Kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik setelah terjadi kontraksi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dengan adanya kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah dan investasi terutama *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI akan dapat membantu pemulihan ekonomi secara signifikan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah merelaksasi *negative list* investasi dengan membentuk daftar investasi prioritas yang terbuka bagi calon investor berdasarkan nominal investasi yang akan dilakukan. Untuk memfasilitasi investasi, Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan setidaknya terdapat 5 kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif nonfiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai. Beberapa alasan investor asing lebih memilih berinvestasi di negara lain seperti Vietnam daripada di Indonesia antara lain biaya tenaga kerja, sewa kantor, dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah kebijakan dan berbagai upaya untuk mendorong daya saing Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Kebijakan yang sudah dan terus ditempuh adalah Pemerintah telah merevisi 80 undang-undang yang dianggap menghambat investasi melalui UU Cipta Kerja. Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai instrumen pelaksanaannya diharapkan akan dapat memperbaiki iklim berinvestasi Indonesia secara signifikan. Melalui UUCK Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan proses terkait investasi yang diharapkan akan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap pelaku usaha terutama koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional

Sebelumnya Pemerintah telah berupaya menyederhanakan izin investasi melalui *Online Single Submission* (OSS). Namun OSS masih menghadapi beberapa kendala, antara lain teknologinya yang belum optimal serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya masih memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi izin investasi. Namun pada bulan Agustus 2021, Pemerintah meluncurkan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) yang merupakan sistem perizinan *online* berbasis resiko yang merupakan mandat dari UUCK. Dengan adanya OSS-RBA diharapkan rezim perizinan berusaha di Indonesia semakin mudah, murah, dan cepat. Melalui OSS-RBA, seluruh perizinan berusaha dilakukan secara *online* dan akan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Sistem OSS-RBA juga akan diintegrasikan dengan sistem perizinan dari

Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses perizinan berusaha yang melibatkan K/L terkait menjadi lebih efektif dan efisien karena melalui satu pintu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Melalui Program Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi yang fokus untuk mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan asing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut di atas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dibantu oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan upaya percepatan Investasi. *Key Performance Indicators*-nya (KPIs) adalah mempermudah proses perizinan investasi, memberikan rekomendasi sistem insentif dan mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait investasi. Output kinerjanya adalah berjalannya mekanisme perizinan berusaha melalui OSS-RBA berdasarkan mandat UUCK, rekomendasi insentif tepat sasaran serta terwujudnya simplifikasi kebijakan investasi. Tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat mendukung akselerasi penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif dan berdaya saing.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dengan mendorong investasi ke seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan sinergi dan pemahaman yang mendalam atas UUCK oleh berbagai pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Daerah. Implementasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang menjadi instrumen pelaksana UUCK merupakan elemen penting agar UUCK benar-benar efektif dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia secara merata.

Sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih 2.828 km terus digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Dengan pembangunan 25 (dua puluh lima) ruas Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional khususnya di regional Sumatera, meningkatkan konektivitas dan sistem logistik, kenyamanan masyarakat dalam berkendara, serta terjadi efisiensi waktu tempuh antar kota-kota di Pulau Sumatera.

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan JTTS. Namun demikian, walaupun memiliki kelayakan ekonomi, proyek JTTS pada saat ini belum memenuhi kelayakan finansial. Pemerintah memiliki keterbatasan APBN dalam memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi dana pembebasan lahan.

Oleh karena itu, setiap bentuk dukungan Pemerintah yang diberikan kepada pembangunan JTTS perlu dipastikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal. Kebutuhan anggaran yang besar dihadapkan pada kondisi keuangan negara di masa pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait bagaimana mengoptimalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang telah disusun, serta melakukan efisiensi *capital expenditure (capex)* Jalan Tol Trans Sumatera.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tahapan kritis yang menentukan capaian target pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan sekaligus memberikan jaminan efisiensi belanja modal (*capex*) adalah tahapan pengadaan tanah/lahan. Permasalahan pengadaan lahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat, swasta, Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga terkait, termasuk lembaga peradilan memerlukan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi guna *debottlenecking* permasalahan serta percepatan pelaksanaan pengadaan lahan dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Krusialnya tahapan pengadaan lahan juga didasarkan pada fakta bahwa harga tanah dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, sehingga diperlukan percepatan. Efisiensi dalam pengadaan lahan akan berimbas positif pada kelayakan finansial investasi JTTS. Semakin berlarutnya proses pengadaan lahan menjadikan sebuah proyek pembangunan menjadi inefisien, boros dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karenanya, isu utama dalam pengadaan lahan adalah isu percepatan dan peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L terkait, serta penguatan sinergi dengan lembaga peradilan, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan BUMN sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam rangka penyederhanaan prosedur pengadaan lahan dan memangkas jumlah hari yang diperlukan dalam pengadaan lahan.

Kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan tanah/lahan untuk kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menentukan "Semua Hak Atas Tanah berfungsi sosial". Penjelasan pasal 6 menyebutkan "Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat".

Pelaksanaan pengadaan lahan sering bersinggungan dengan isu hukum, hak asasi manusia, kehutanan dan lingkungan hidup, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik individu maupun kelompok. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, prinsip kepentingan umum harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengadaan lahan. Disebut kepentingan umum, selain harus memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung (*social profitable and actual used by the public*). Pengadaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan.

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Terminologi kelayakan dan keadilan ini seringkali mendapatkan tantangan dan menyebabkan berlarut-larutnya proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum karena pemegang hak dan/atau masyarakat yang terdampak memiliki standar yang berbeda terkait “layak” dan “adil”. Selain itu, permasalahan lainnya yang mengemuka adalah alas hak yang tidak jelas, tidak diketahui, terdapat sengketa kepemilikan, permasalahan tanah adat/ulayat dan kawasan hutan.

Pada tahun 2023, pembangunan JTTS difokuskan pada beberapa ruas yang meliputi:

1. Sp Indralaya – Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
2. Kayu Agung – Palembang – Betung, Provinsi Sumatera Barat
3. Betung – Tempino – Jambi, Provinsi Jambi – Sumatera Selatan
4. Pekanbaru – Bangkinang – Pangkalan, Provinsi Riau
5. Pekanbaru – Rengat (Seksi 1 Pekanbaru – Muara Fajar), Provinsi Riau
6. Binjai – Pangkalan Brandan, Provinsi Sumatera Utara
7. Indrapura – Kisaran (Seksi 2 Limapuluh – Kisaran), Provinsi Sumatera Utara
8. Padang – Sicincin, Provinsi Sumatera Barat
9. Indrapura – Kuala Tanjung – Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
10. Tebing Tinggi – Siantar – Parapat – Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
11. Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaru – Baitussalam), Provinsi Aceh

2.1. Permasalahan yang Ingin Diselesaikan dan Kondisi Yang Diharapkan di Tahun 2023

Sebelumnya Pemerintah telah berupaya menyederhanakan izin investasi melalui *Online Single Submission (OSS)*. Namun OSS masih menghadapi beberapa kendala, antara lain teknologinya yang belum optimal serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya masih memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi izin investasi. Sehingga proses perizinan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu, prosesnya tidak transparan dan masih sarat akan praktik kecurangan. Hal ini yang menyebabkan banyak Pelaku Usaha terutama asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun pada bulan Agustus 2021, Pemerintah meluncurkan *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* yang merupakan sistem perizinan *online* berbasis resiko yang merupakan mandat dari UUCK. Perizinan berbasis resiko akan memudahkan Pelaku Usaha untuk mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha. Bidang Usaha dibagi berdasarkan jenis resiko (resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga tinggi). Dengan adanya klasifikasi resiko bidang usaha, Pelaku Usaha yang bidang usahanya termasuk dalam resiko rendah atau menengah rendah akan mendapatkan perizinan berusaha secara otomatis melalui sistem OSS-RBA tanpa memerlukan verifikasi, sehingga prosesnya lebih cepat. Bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha kategori resiko menengah tinggi dan tinggi perlu melalui proses verifikasi oleh K/L terkait maupun Pemerintah Daerah yang dilakukan

secara *online (by system)*. Proses yang dilakukan secara *online* dapat mempercepat proses pengajuan perizinan berusaha, mengurangi praktik kecurangan, dan peningkatan transparansi.

Dengan adanya OSS-RBA diharapkan rezim perizinan berusaha di Indonesia semakin mudah, murah, dan cepat. Melalui OSS-RBA, seluruh perizinan berusaha dilakukan secara *online* dan akan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Sistem OSS-RBA juga akan diintegrasikan dengan sistem perizinan dari Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses perizinan berusaha yang melibatkan K/L terkait menjadi lebih efektif dan efisien karena melalui satu pintu. Dengan menggunakan sistem OSS-RBA, Pemerintah dan masyarakat tentunya akan menjalankan amanat UUCK dan peraturan turunannya demi perbaikan iklim investasi di Indonesia yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, sebagai upaya pemerataan pembangunan Indonesia, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih 2.828 km terus digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Dengan pembangunan 25 (dua puluh lima) ruas Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional khususnya di regional Sumatera, meningkatkan konektivitas dan sistem logistik, kenyamanan masyarakat dalam berkendara, serta terjadi efisiensi waktu tempuh antar kota di Pulau Sumatera.

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan JTTS. Namun demikian, walaupun memiliki kelayakan ekonomi, proyek JTTS pada saat ini belum memenuhi kelayakan finansial. Pemerintah memiliki keterbatasan APBN dalam memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi dana pembebasan lahan. Tantangan terbesar dalam inovasi pembiayaan di luar penggunaan APBN untuk JTTS adalah *Internal Rate of Return (IRR)* dan *Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)* yang rendah sehingga kurang *feasible* untuk ditawarkan kepada investor dan *lender*. Sehingga diperlukan diskusi lebih dalam terkait *value capture* dan *creative financing* JTTS agar proyek JTTS meningkat keekonomiaannya. Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership (PPP)* di dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan di beberapa ruas JTTS.

Oleh karena itu, setiap bentuk dukungan Pemerintah yang diberikan kepada pembangunan JTTS perlu dipastikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal. Kebutuhan anggaran yang besar dihadapkan pada kondisi keuangan negara di masa pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait bagaimana mengoptimalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang telah disusun, serta melakukan efisiensi *capital expenditure (capex)* Jalan Tol Trans Sumatera.

Selain tantangan terkait permodalan, pembangunan JTTS juga tentunya mengalami kendala dalam proses pengadaan lahan di lapangan. Pelaksanaan pengadaan lahan sering bersinggungan dengan isu hukum, hak asasi manusia, kehutanan dan lingkungan hidup, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan antara

kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik individu maupun kelompok. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, prinsip kepentingan umum harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengadaan lahan.

Maka dari itu, penting untuk terus melaksanakan monitoring di lapangan guna koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan guna mengawal kelancaran proses pengadaan lahan serta percepatan pembangunan JTTS yang kedepannya diharapkan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, namun juga perkembangan ekonomi regional Sumatera yang dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu dengan terbangunnya JTTS, juga akan memberikan efektivitas dan efisiensi mobilitas masyarakat dan penurunan biaya logistik terutama di daerah luar Pulau Jawa.

2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh *stakeholder* (K/L terkait)

Keterlibatan Kemenko Marves untuk mengawal implementasi UUCK beserta peraturan turunannya akan memudahkan koordinasi terutama terkait dengan perizinan berusaha yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga. Peran koordinator sangat dibutuhkan untuk memastikan terbangunnya sinergi antar pihak tidak hanya Pemerintah Pusat, namun juga sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha serta masyarakat pada umumnya. Adanya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan dapat bermanfaat pada kelancaran dan percepatan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan mandat UUCK. Selain itu, dengan peran Kemenko Marves juga dapat menjembatani perbedaan kewenangan dalam pemrosesan perizinan berusaha dan menghindari tumpang tindih kewenangan baik di Pusat maupun di Daerah. Pelaku Usaha juga dapat merasakan manfaat sinergi yang baik dari setiap pemangku kepentingan. Adanya sinergi berdampak positif pada konsistensi ketentuan terkait perizinan berusaha dan memudahkan dalam implementasi di lapangan. Jika ditemukan kendala juga diharapkan lebih mudah dalam penanggulangan permasalahan.

Diharapkan dengan adanya implementasi sistem perizinan online berdasarkan mandat UUCK akan meningkatkan kemudahan investasi di Indonesia. Dengan demikian, akan berpengaruh pada peningkatan realisasi investasi. Implementasi UUCK juga akan mempermudah perkembangan UMKM, terutama dari sisi perizinan. Dengan perizinan berdasarkan UUCK, pelaku UMKM akan diberikan kemudahan, yang dimulai sejak perizinan pendiriannya. Dengan demikian, UMKM akan berada pada sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan. Setiap investasi yang masuk dianjurkan untuk menggandeng pengusaha lokal maupun UMKM di lokasi investasi. Sehingga masuknya investasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat lokal. Pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta bagi masyarakat Indonesia.

Peran Kemenko Marves dalam monitoring pembangunan JTTS juga berdampak pada percepatan pembangunan ruas-ruas JTTS. Monitoring secara berkala bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pembangunan mulai dari tahap pengadaan lahan hingga beroperasinya jalan tol. Monitoring juga bertujuan untuk melakukan

debottlenecking isu-isu yang sulit diselesaikan akibat adanya perbedaan kewenangan. Kemenko Marves menjadi jembatan antar pemangku kepentingan untuk menyelesaikan isu tersebut sehingga tidak memakan waktu berlarut-larut, yang dapat menyebabkan pembangunan JTTS terhambat.

Dengan adanya percepatan pembangunan JTTS, maka akan memberikan dampak multiplier (*multiplier effects*) terhadap output perekonomian 1,7 kali dari biaya konstruksi dan proyeksi pendapatan dari operasional proyek. Selain itu, dampak ekonomi (output) per tahun dari pembangunan JTTS setara dengan 2,2 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera. Dampak pembangunan JTTS juga memberikan manfaat pada penyerapan tenaga kerja. Hingga tahun 2021, ada sekitar 671.000 orang per tahun yang terserap. Jumlah ini setara dengan 2,4 persen tenaga kerja di Pulau Sumatera. Dengan adanya pembangunan JTTS lanjutan Tahap I, Tahap II hingga tahap IV (meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu) maka penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera akan lebih banyak lagi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi adalah:

- 1) Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan instansi terkait lainnya:
 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM);
 - Kementerian Perindustrian;
 - Kementerian Perdagangan;
 - Kementerian Hukum dan HAM;
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Kementerian Tenaga Kerja; dan
 - Kementerian Keuangan;
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Unit di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 4) Pelaku Usaha, Masyarakat dan *Stakeholder* lain di bidang Kemaritiman dan Investasi:
 - Badan Usaha;
 - UMKM
 - Investor Asing dan Dalam Negeri

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada komponen Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen sebagai berikut :

- a) **Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi**

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan dilaksanakan dengan pengumpulan bahan yang meliputi tahapan identifikasi dan inventarisasi isu, penyiapan rencana, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan dapat berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan. Selain itu, diperlukan Identifikasi kebijakan/ permasalahan terkait Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi yang telah ada. Juga akan dilakukan identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi. Tahapan perencanaan dan persiapan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, antara lain:

- Rapat koordinasi dalam kota melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan.
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @50 Orang

- Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Eselon I maupun Eselon II dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada isu terkait.
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Jumlah Peserta : @20 Orang

- Rapat Koordinasi Luar Kota Persiapan Pelaksanaan Rencana Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Tempat : Jawa Barat
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Jumlah Peserta : @20 Orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan fokus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan

permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Tahapan pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dan Peraturan Turunannya untuk Meningkatkan Nilai Investasi di Indonesia
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Mei 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Narasumber : Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha – Kementerian Investasi/BKPM
Jumlah Peserta : @50 Orang

- Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Percepatan Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Melalui Satu Pintu Secara Online Berdasarkan UUCK dan Peraturan Turunannya
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : April 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Narasumber : Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri – Kementerian Investasi/BKPM
Jumlah Peserta : @25 Orang

- Kunjungan lapangan pemantauan progress implementasi sistem perizinan berusaha secara online di daerah
Tempat : Kalimantan Barat
Waktu : Juli 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait serta Pemerintah Daerah
Jumlah Peserta : @6 Orang
Alasan Lokasi : Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai wilayah yang ramah akan investasi terutama investasi asing. Dengan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan dan Pelaku Usaha di Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar dapat meningkatkan realisasi investasinya.

- FGD Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam Integrasi Sistem Perizinan UUCK
Tempat : Sulawesi Selatan
Waktu : Juli 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait serta Pemerintah Daerah
Narasumber : Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Peserta : @32 Orang

Alasan Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan masih kesulitan dan belum banyak menggunakan sistem perizinan online berdasarkan mandat UUCK beserta peraturan turunannya, sehingga perlu bimbingan dan diskusi yang lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi kendala implementasi tersebut.

- *Diplomasi/benchmarking* ke Luar Negeri
Perjalanan dinas kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam rangka Konsultasi/*Benchmarking* untuk mewujudkan peningkatan nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia atau peningkatan proyek investasi asing di Indonesia dengan mendorong investor internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui perbaikan citra dan kebijakan promosi investasi dengan melakukan pendekatan langsung baik kepada Pelaku Usaha Asing maupun Pemerintah Negara Lain.
Tempat : Amerika Serikat
Waktu : Agustus 2023
Peserta : Internal Kemenko Marves
Jumlah Peserta : @1 Orang

C. Pelaporan

Tahapan Pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Integrasi Sistem Perizinan UUCK untuk Mendorong Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : November 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait serta Pemerintah Daerah
Narasumber : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jumlah Peserta : @55 Orang
- Monitoring dan evaluasi implementasi percepatan integrasi sistem perizinan UUCK
Tempat : Gorontalo
Waktu : November 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait serta Pemerintah Daerah
Narasumber : Direktur Deregulasi Penanaman Modal – Kementerian Investasi/BKPM
Jumlah Peserta : @5 Orang

Alasan Lokasi : Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang besar dalam pengembangan PLTS. Sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi hijau di Indonesia terutama di luar Pulau Jawa, Gorontalo menjadi salah satu daerah yang potensial bagi investasi asing di sektor energi baru terbarukan. Sehingga perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem perizinan UUCK di Gorontalo.

- Rapat koordinasi luar kota pembahasan pengaruh UUCK dan peraturan turunannya dalam mendorong perkembangan investasi hijau (green investment) di Indonesia
Tempat : Bali
Waktu : Desember 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Narasumber : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha – Sekretariat Kabinet
Jumlah Peserta : @ 25 Orang
Alasan Lokasi : Kegiatan pelaporan sekaligus dimanfaatkan untuk *knowledge sharing* seputar implementasi sistem perizinan online berdasarkan UUCK. Provinsi Bali menjadi salah satu Provinsi tujuan utama investasi sehingga penting untuk mendorong optimalisasi implementasi perizinan secara online di Bali.

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan dilaksanakan dengan pengumpulan bahan yang meliputi tahapan identifikasi isu, penyiapan rencana, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan yang dilakukan secara intensif. Selain itu, juga akan dilakukan identifikasi kebijakan/ permasalahan terkait Investasi Tol Sumatera yang telah ada, serta identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera. Tahapan perencanaan dan persiapan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, antara lain:

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan.
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @55 Orang
- Rapat koordinasi dalam kota pembahasan percepatan pembebasan lahan dan investasi Tol Sumatera
Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Maret 2023
Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait serta Pemerintah Daerah
Jumlah Peserta : @70 Orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan fokus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dan Kunjungan Lapangan dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Kunjungan lapangan juga dilakukan secara berkala untuk monitoring progress pembangunan ruas-ruas JTTS. Tahapan pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Antar Kementerian/Lembaga Terkait Dan Pemerintah Daerah
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : April 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait dan Pelaku Usaha
Narasumber : Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Peserta : @60 Orang
- Kelompok Kerja (Pokja) percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) (ditetapkan dengan SK es. I)
Waktu : Maret - Oktober 2023 (8 Bulan)
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @25 Orang
- Penyusunan Kajian Perorangan Pengembangan Dan Pengendalian Percepatan Kebijakan Investasi Proyek Di Sumatera
Waktu : Maret - Juli 2023 (5 Bulan)
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
- Kunjungan Lapangan Pemantauan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Tempat : Riau
Waktu : April – Mei 2023
Peserta : Internal Kemenko Marves
Jumlah Peserta : @4 Orang
Alasan Lokasi : JTTS Ruas Pekanbaru – Bangkinang – Pangkalan, dan Ruas Pekanbaru – Rengat (Seksi 1 meliputi Pekanbaru – Muara Fajar)

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
 - Tempat : Aceh
 - Waktu : Juni – Juli 2023
 - Peserta : Internal Kemenko Marves dan Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @3 Orang
 - Alasan Lokasi : JTTS Ruas Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 meliputi Blang Bintang – Kutobaru – Baitussalam)

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Rencana Penanaman Modal pada Tol Sumatera
 - Tempat : Jambi
 - Waktu : Agustus – September 2023
 - Peserta : Internal Kemenko Marves dan Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @3 Orang
 - Alasan Lokasi : JTTS Ruas Betung – Tempino – Jambi

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Rencana Penanaman Modal pada Tol Sumatera
 - Tempat : Sumatra Utara
 - Waktu : September – Oktober 2023
 - Peserta : Internal Kemenko Marves dan Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @4 Orang
 - Alasan Lokasi : JTTS Ruas Tebing Tinggi – Siantar – Parapat – Sibolga, dan Ruas Indrapura – Kisaran

- Rapat koordinasi luar kota identifikasi hambatan dan kendala pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
 - Tempat : Sumatra Selatan
 - Waktu : Agustus 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah
 - Narasumber : Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah – Kementerian ATR/BPN
 - Jumlah Peserta : @40 Orang

C. Pelaporan

Tahapan Pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Focus Group Discussion Dalam Kota Percepatan Penggantian Ganti Rugi Atas Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : November 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait, serta Pemerintah Daerah

Narasumber : Direktur Jalan Bebas Hambatan – Kementerian PUPR
Jumlah Peserta : @55 Orang

- Focus Group Discussion Luar Kota Upaya Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bagi Mobilitas Masyarakat Sumatera Serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Tempat : Sumatra Utara
Waktu : Desember 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait, serta Pemerintah Daerah
Narasumber : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan – Bappenas
Jumlah Peserta : @59 Orang

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi												
052	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi												
A.	Perencanaan												
i.	Menyusun Agenda Kebijakan												
1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik												
2	Menyusun agenda kebijakan												
3	Menelaah agenda kebijakan												
4	Menetapkan agenda kebijakan												
B.	Pelaksanaan												
ii.	Merumuskan kebijakan												
1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan												
2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi												
3	Menelaah alternatif solusi												
4	Menetapkan rekomendasi kebijakan												
iii.	Mengevaluasi kebijakan												
1	Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan												

2	Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan													
3	Melakukan analisis kinerja program kebijakan													
4	Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan													
C.	Pelaporan													
iv.	Menyusun laporan kebijakan													
1	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													
053.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera													
A.	Perencanaan													
i.	Menyusun Agenda Kebijakan													
1	Menginventarisasi isu privat dan isu publik													
2	Menyusun agenda kebijakan													
3	Menelaah agenda kebijakan													
4	Menetapkan agenda kebijakan													
B.	Pelaksanaan													
ii.	Merumuskan kebijakan													
1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan													
2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi													
3	Menelaah alternatif solusi													
4	Menetapkan rekomendasi kebijakan													

C.	Pelaporan													
iii.	Menyusun laporan kebijakan													
1	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													

E. Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan													
RO	Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi													
052	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi													
1.	Menyusun Agenda Kebijakan													
2.	Merumuskan kebijakan													
3.	Mengevaluasi Kebijakan													
4.	Menyusun laporan kebijakan													
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera													
1.	Menyusun Agenda Kebijakan													
2.	Merumuskan kebijakan													
3.	Menyusun laporan kebijakan													

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi adalah sebesar Rp. 1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	KRO/RO/KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	
RO	Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	1.600.000.000
051	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaiki Iklim Investasi	700.000.000
A.	Perencanaan dan Persiapan	150.000.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	36.415.000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	34.875.000
	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait	78.710.000
B.	Pelaksanaan	400.000.000
1.	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	45.680.000
2.	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait	98.317.000
3.	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja	92.400.000
4.	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Percepatan Implementasi Sistem Perizinan Online berdasarkan UUCK	45.506.000
5.	Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dalam rangka mendorong FDI Indonesia	118.097.000
C.	Pelaporan	150.000.000
1.	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	32.323.000
2.	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	70.630.000
3.	Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK	47.047.000

No.	KRO/RO/KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera	900.000.000
A.	Perencanaan dan Persiapan	150.000.000
1.	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	35.830.000
2.	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	35.830.000
3.	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait	78.340.000
B.	Pelaksanaan	600.000.000
1.	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	25.704.000
2.	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait	102.650.000
3.	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Percepatan Investasi Tol Sumatera	166.046.000
4.	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja	105.600.000
5.	Penugasan kepada Jasa Konsultan	200.000.000
C.	Pelaporan	150.000.000
1.	FGD Dalam Kota	27.228.000
2.	FGD Luar Kota dengan Stakeholders terkait	122.722.000

Jakarta, Mei 2022
 Penanggung Jawab Kegiatan

Ferry Akbar Pasaribu
 NIP. 197203181998031001



UNIT KERJA
ASISTEN DEPUTI INVESTASI
BIDANG JASA



**KERANGKA ACUAN KERJA
RO 002
KEBIJAKAN INVESTASI BIDANG JASA**

Kementerian	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Disparitas Ekonomi Antar Wilayah
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
Program	:	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	:	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Program	:	Jumlah kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi yang dihasilkan
Kegiatan	:	Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan
Klasifikasi Rincian Output	:	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Indikator KRO	:	Jumlah Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa
Volume Rincian Output	:	1
Satuan Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- o. Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- u. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- v. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- w. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
- x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
- y. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil;
- z. Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;

- aa. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1195/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Lembaga/Badan Akreditasi Rumah Sakit Bertaraf Internasional;
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

1. Gambaran Umum

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 51,6% atau 20.923 MW. Adapun sisanya dari pembangkit fosil 48,4% atau 19.652 MW. Perinciannya, PLTA/PLTM/PTMH memiliki komposisi terbesar hingga 25,6% atau 10.391 MW. Diikuti PLTS sebesar 11,5% atau 4.680 MW. Kemudian, PLTP 8,3% atau 3.355 MW, dan sisanya dari PLT EBT base, PLTB, dan lainnya. Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% pada tahun 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%, hal itu menjadi perhatian serius dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan. Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement dimana Indonesia berkomitmen di sektor energi untuk dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29% dari Business as Usual (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap menuju Net Zero Emission (NZE).

Namun demikian, 50-70 persen listrik yang dihasilkan oleh PLN dan yang dibeli dari pihak swasta tidak dapat diserap oleh pasar. Banyaknya pembangkit listrik baru yang terbangun, baik milik PT PLN (Persero) maupun swasta, membuat pasokan listrik saat ini berlebih atau oversupply. PT PLN (Persero) memperkirakan kelebihan daya atau oversupply kapasitas pembangkit listrik di Jawa-Bali akan mencapai 61 persen dari total kebutuhan, seiring dengan adanya penambahan daya 13 GW dalam beberapa tahun ke depan. Dari keseluruhan pembangkit, setidaknya ada empat pembangkit PLN yang diproyeksi selesai pada tahun ini, yakni PLTA Jatigede, PLTGU Jawa Bali 1, PLTGU Muara Karang, dan PLTU Lontar 4. Sementara itu, pembangkit dari IPP, terdapat tiga pembangkit yang diperkirakan selesai konstruksi hingga akhir 2021. Seluruhnya adalah PLTU Jawa Tengah/Batang, PLTU Jawa-4/Tanjung Jati Bm dan PLTGU Jawa-1/Cilamaya. Peningkatan kapasitas terpasang itu tidak diiringi dengan pertumbuhan permintaan yang signifikan. Dalam beberapa kesempatan, PLN menyebut perkiraan pertumbuhan permintaan daya listrik meleset dari target seiring dengan pandemi Covid-19 sejak 2020 di Tanah Air.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan rencana mengeksport listrik ke Malaysia dan Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan Malaysia adalah tujuan pertama ekspor listrik PLN sementara rencana ekspor listrik ke Singapura masih dalam kajian. Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antar pulau. Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Peringkat daya saing infrastruktur di Indonesia meningkat lebih tajam dari posisi 78 di tahun 2012 menjadi posisi ke-61 di tahun 2013. Namun nilai investasi di Indonesia pada laporan Bank Dunia untuk kuartal kedua tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pelemahan investasi dalam sektor transportasi serta mesin-mesin dan peralatan.

Peningkatan daya saing suatu negara berbanding lurus dengan prospek pertumbuhannya, sedangkan infrastruktur sebagai konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Indeks *GCI* tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia masih belum dapat mengimbangi potensi daya saing Indonesia secara keseluruhan.

Secara umum, penyediaan infrastruktur di Indonesia terhambat oleh 3 pokok permasalahan, yaitu: (1) Peraturan dan perundangan di bidang infrastruktur yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih menghalangi investasi swasta di bidang infrastruktur; (2) Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua *stake holder* terkait; (3) Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (*bottleneck*).

Efisiensi biaya logistik sudah menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia saat ini, yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Strategi yang ditempuh pada peningkatan efisiensi dalam sistem logistik nasional dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi distribusi dan logistik. Perbaikan sistem logistik juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang ekspor dan impor dengan penerapan integrasi proses bisnis melalui sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan proyek utama (*major project*) jaringan pelabuhan utama terpadu yang bermanfaat bagi penurunan biaya logistik, terbentuknya standarisasi kinerja pelabuhan utama, serta peningkatan efisiensi rute pelayaran domestik dan penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa melihat pentingnya mendorong Indonesia berinvestasi pada hal tersebut guna membangun jaringan pelabuhan terpadu tersebut maka integrasi pengelola pelabuhan di Indonesia harus dapat diwujudkan. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan holding pengelola Pelabuhan menjadi lebih optimal, sumber daya manusia dan layanan administrasi menjadi lebih terstandarisasi, yang keseluruhannya akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja perusahaan, penurunan biaya logistik dan meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun depan sebesar Rp 1.200 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus menggali peluang investasi di beberapa sektor prioritas yaitu pariwisata, energi terbarukan, infrastruktur, manufaktur, dan pertambangan. Pada 2022, Kementerian Investasi/BKPM menargetkan realisasi investasi dapat mencapai Rp 1.200 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi Rp 901,02 triliun sepanjang tahun lalu. Nilai ini naik 9% dibandingkan 2020 sebesar Rp 826,3 triliun.

Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021, realisasi investasi Indonesia paling banyak berlabuh ke sektor jasa. Nilai investasi dari sektor jasa mencapai Rp 442,4 triliun pada 2021 atau setara dengan 49,4% dari total investasi Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih cenderung rendah. Investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hanya mencapai US\$ 2,4 miliar. Selain itu, jumlah tenaga kerja pariwisata

juga sudah mencapai 14,7 juta, menempatkan pariwisata dan ekonomi kreatif menciptakan 35 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemerintah juga sedang berfokus pada pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas (DPSP) yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pengembangan tersebut mulai dari infrastruktur (bandara, pelabuhan, jalan darat), kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga mempersiapkan SDM yang unggul. Hal tersebut diperlukan untuk menarik para investor untuk masuk dan berinvestasi di 5 DPSP tersebut.

Selain sektor jasa pariwisata investasi sektor jasa kesehatan juga diprediksi menjadi tren Baru investasi di Indonesia. Kesehatan adalah salah satu pilar penting bagi kehidupan manusia yang melekat sebagai bagian dari unsur kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara Indonesia. Menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk hidup manusia, sektor kesehatan di setiap negara terus ditingkatkan sebagai unsur suksesi pembangunan. Di Indonesia sendiri sektor kesehatan menghadapi tantangan besar untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi 270 juta penduduk Indonesia (BPS, 2020). Banyaknya jumlah penduduk membawa tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Selain unsur tenaga kesehatan yang harus dipenuhi, kebutuhan alat kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui sinergi berbagai sektor seperti sektor kesehatan, sektor industri, dan sektor perdagangan. Pada era sebelum pandemi, pasar alat kesehatan di Indonesia memiliki pertumbuhan mencapai 12 persen per tahun (Kementerian Kesehatan 2018). Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk memenuhi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasca pandemi Covid-19 yang mulai merebak tahun 2020 lalu, kebutuhan akan alat kesehatan di semua lini pelayanan kesehatan terus meningkat. Kementerian Perindustrian 2021 menyebut potensi pasar alat kesehatan dalam negeri mencapai nilai 607 triliun rupiah. Peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan terlebih produk alat kesehatan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen wajib dibeli dalam belanja APBN dan dilarang untuk impor. Terlebih anggaran kesehatan dalam APBN 2022 memegang porsi 9,4 persen dari total belanja pemerintah sebesar 2.708,7 triliun rupiah.

Pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali telah resmi dimulai. Keberadaan rumah sakit internasional tersebut akan membantu Bali memiliki potensi wisata baru. Ditandai dengan peletakan batu pertama atau *groundbreaking* oleh Presiden Joko Widodo, rumah sakit yang berdiri di lahan seluas 41,3 hektare ini ditargetkan selesai pada 2023 untuk pembangunan fase I. Tujuan dibangunnya rumah sakit internasional tersebut yaitu agar dapat membantu Bali untuk mempunyai pariwisata baru di bidang kesehatan. Selain untuk wisata kesehatan, diharapkan rumah sakit internasional tersebut juga dapat membuat Warga Negara Asing (WNA) dapat berobat ke Indonesia.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa melihat pentingnya investasi di sektor jasa pariwisata, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menarik para investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa berfokus pada debottlenecking isu-isu yang ada pada investasi sektor jasa pariwisata, jasa kesehatan dan jasa lainnya dan berperan aktif dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi.

Pada tahun 2023, kebijakan investasi bidang jasa difokuskan pada beberapa ruas yg meliputi:

1. Manado – Provinsi Sulawesi Utara

2. Singkarak – Provinsi Sumatera Utara
3. Likupang - Provinsi Sulawesi Utara
4. Selayar – Provinsi Sulawesi Selatan
5. Surabaya – Provinsi Jawa Timur
6. Gresik – Provinsi Jawa Timur
7. Tanjung Carat – Provinsi Sumatera Selatan
8. Denpasar - Bali

2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan dan kondisi yang diharapkan di tahun 2023

Pada investasi sector jasa perdagangan masalah yg ingin diselesaikan yaitu terlealisasinya peningkatan investasi PLTS di Indonesia, dan terlaksananya peraturan peningkatan industri PLTS dalam negeri untuk mendukung kemudahan investasi PLTS di Indonesia. Pada investasi sector jasa permasalahan yg ingin diselesaikan bahwa telah terealisasinya investasi sector jasa infratraktur Pelabuhan tanjung carat dan Pelabuhan Indonesia Maspion, serta terealisasinya investasi sector jasa logistic survey kabel laut. Pada investasi sector pariwisata dan Kesehatan dapat terealisasinya investasi sector jasa pariwisata di DPSP Likupang, dan terselesaikannya pembangunan rumah sakit internasional di Bali Fase I.

2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder (K/L) terkait

Adanya koordinasi dari Kemenko Marves untuk mengawal investasi sector jasa perdagangan, investasi sector jasa infrastruktur dan logistik dan investasi sector jasa pariwisata, Kesehatan, dan jasa lainnya agar memudahkan sinkronisasi/koordinasi terkait dengan investasi, terhambatnya dana yg terjadi apakah perlu menggandeng pihak swasta, dll. Peran koordinator sangat dibutuhkan untuk memastikan terbangunnya sinergi antar pihak tidak hanya pemerintah pusat, namun juga sinergo dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha serta masyarakat umum. Selain itu, peran Kemenko Marves juga dapat menjembatani perbedaan kewenangan dalam pemrosesan berinvestasi kewenangan baik di pusat maupun daerah. Jika ditemukan kendala juga diharapkan lebih mudah dalam penanggulangan permasalahan. Dampak yg akan dirasakan oleh stakeholder (K/L) terkait investasi sector jasa perdagangan bahwa telah terwujudnya pemerataan jaringan listrik di seluruh Indonesia dan peningkatan industri PLTS untuk mendukung kemudahan investasi PLTS di Indonesia. Kedua, meningkatnya nilai investasi di sector jasa infrastruktur dan logistic, ketiga meningkatnya nilai investasi di sector jasa infrastruktur dan logistic. Dan meningkatnya nilai investasi di sector jasa pariwisata dan Kesehatan serta jasa lainnya. Peran monitoring pada Kemenko Marves untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, pembangunan rumah sakit internasional di Bali, investasi kabel laut serta terlaksananya investasi PLTS di Indonesia agar memastikan kelancaran proses pembangunan mulai dari tahap perizinan hingga dapat beroperasi. Monitoring juga bertujuan untuk menghadapi hambatan-hambatan dari isu-isu yg sulit diselesaikan akibat adanya perbedaan kewenangan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rumusan Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa:

- a. Unit Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- b. K/L dan instansi terkait lainnya dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman:
 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Kementerian ESDM
 - Kementerian Ketenagakerjaan
 - Kementerian PUPR
 - Kementerian Perdagangan
 - Kementerian Keuangan
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Kesehatan
 - BRIN
 - Perguruan Tinggi
- c. Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder di bidang Kemaritiman dan Investasi

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada komponen kebijakan investasi bidang jasa dibagi menjadi 3 komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

a) Koordinasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan Menyusun agenda kebijakan meliputi Inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda kebijakan menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Internal
 - Rapat Internal Lintas Keasdepan
Rapat Internal Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan pada lingkup Keasdepan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : 45 orang
 - Rapat Internal Lintas Kedeputan
Rapat Internal Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan pada lingkup Kedeputan pada Kementerian Koordinator Investasi dan Pertambangan untuk koordinasi perencanaan awal dan persiapan kegiatan
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023

Peserta : Kemenko Marves, dan K/L lain
Jumlah Peserta : 50 orang

- o Rapat Internal Lintas Kedeputian
Rapat Internal Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan pada lingkup Kedeputian pada Kementerian Koordinator Investasi dan Pertambangan untuk koordinasi perencanaan awal dan persiapan kegiatan
Tempat : Jawa Barat
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Marves
Jumlah Peserta : 40 orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan fokus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dengan penugasan kepada jasa konsultan dan terdapat pokja Efektifitas Kebijakan Kewajiban Penyediaan 70% Lokal Konten dalam sektor Perdagangan Retail modern pada tahapan ini yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi
Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait penyusunan Kebijakan Investasi di sektor Perdagangan. Harapannya diperoleh gambaran masalah yang dihadapi, hambatan dan tantangan investasi pada sektor perdagangan dari berbagai perspektif stakeholder serta dapat menyusun rekomendasi alternatif solusi. Rapat Koordinasi direncanakan meliputi:
 - o Rapat Koordinasi Internal
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Maret 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : 55 orang
 - o Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan Ekspor Tenaga Listrik di Indonesia I
Tempat : Jawa Barat
Waktu : Maret 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : 40 orang
- Survei Kunjungan Lapangan
Perjalanan dinas kunjungan kerja ke daerah dalam rangka sinkronisasi rancangan Kebijakan Debottlenecking Isu Ekspor Tenaga Listrik
 - o Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Investasi PLTS

- Tempat : Bali
- Waktu : Oktober 2023
- Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
- Jumlah Peserta : 9 orang
- Alasan : Me-monev PLTS di Bali
- Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Investasi
 - Tempat : Sumatera Utara
 - Waktu : Oktober 2023
 - Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
 - Jumlah Peserta : 9 orang
 - Alasan : Me-monev PLTS di Sumatera Utara
- Kunjungan Lapangan dalam rangka *Benchmarking* PLTS Hybrid di Indonesia
 - Tempat : Sumatera Selatan
 - Waktu : Oktober 2023
 - Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
 - Jumlah Peserta : 9 orang
 - Alasan : Me-monev PLTS di Sumatera Selatan
- Kunjungan Lapangan dalam rangka *Benchmarking* PLTS Hybrid di Indonesia
 - Tempat : Jawa Barat
 - Waktu : Oktober 2023
 - Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
 - Jumlah Peserta : 9 orang
 - Alasan : Me-monev PLTS di Jawa Barat

C. Pelaporan

Tahapan Pelaporan, dilakukan dengan Menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Rapat Koordinasi Perencanaan Rancangan Kebijakan
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : November 2023
 - Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan.
 - Jumlah Peserta : 60 orang
 - Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, KPUPR, Kem ATR/BPN, KLHK.
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan
 - Tempat : Jawa Barat
 - Waktu : November 2023
 - Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan.
 - Jumlah Peserta : 40 orang
 - Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, KPUPR, Kem ATR/BPN, KLHK.

b) Koordinasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan logistik

A. Perencanaan dan Persiapan

o Rapat Koordinasi

Rapat Internal Lintas Keasdepan

Rapat internal terkait Pelabuhan Tanjung Carat pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan

Kebijakan Pelabuhan Tanjung Carat.

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari 2023

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : 45 orang

o Rapat Koordinasi persiapan kerja Lintas Kementerian

Rapat koordinasi lintas K/L terkait Kebijakan Pelabuhan Tanjung Carat pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan **Kebijakan Pelabuhan Tanjung Carat.**

Tempat : Jawa Barat

Waktu : Februari 2023

Peserta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kemenko Ekon

Jumlah Peserta : 40 orang

Narasumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kemenko Ekon

B. Pelaksanaan

• Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait penyusunan Kebijakan Survei Kabel Laut, Kebijakan Pelabuhan Tanjung Carat, dan Kebijakan Pelabuhan Indonesia Maspion dengan adanya penugasan kepada jasa konsultan dan pokja realisasi investasi pelabuhan tanjung carat. Harapannya diperoleh gambaran masalah yang dihadapi, hambatan dan tantangan investasi sektor Kabel Laut, Pelabuhan Tanjung Carat, dan Pelabuhan Indonesia Maspion dari berbagai perspektif stakeholder serta dapat menyusun rekomendasi alternatif solusi. Rapat Koordinasi direncanakan meliputi:

o Rapat Internal

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Maret 2023

Peserta : Internal Marves

Jumlah Peserta : 40 orang

o Rapat Koordinasi Realisasi Investasi Masalah Investasi Pelabuhan Tanjung Carat

Tempat : Sumatera Selatan

Waktu : Maret 2023

Peserta : Antar K/L, Investor Terkait

Jumlah Peserta : 40 orang

- Narasumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kemenko Ekon
- Rapat Koordinasi Masalah Kabel Laut
 - Tempat : Jawa Timur
 - Waktu : Maret 2023
 - Peserta : Kemenko Marves, PT Telkom Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, Kementerian Investasi/BKPM
 - Jumlah Peserta : 40 orang
 - Survei Kunjungan Lapangan
 - Perjalanan dinas kunjungan kerja ke daerah dalam rangka survei dan Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Pelabuhan dan dalam rangka Kebijakan Survei Kabel Laut
 - Kunjungan Lapangan dalam Rangka Evaluasi Realisasi Investasi Pelabuhan Tanjung Carat
 - Tempat : Sumatera Selatan
 - Waktu : Juni 2023
 - Peserta : Kemenkomarves
 - Jumlah Peserta : 9 orang
 - Alasan : Me-monev Survei Kabel Laut di Sumatera Selatan
 - Kunjungan Lapangan ke Lokasi Pelabuhan PT.Maspion
 - Tempat : Jawa Timur
 - Waktu : Juni 2023
 - Peserta : Kemenkomarves
 - Jumlah Peserta : 18 orang
 - Alasan : Me-monev Survei Kabel Laut di Jawa Timur
 - Kunjungan Lapangan dalam Rangka Kebijakan Survei Kabel Laut
 - Tempat : NTB
 - Waktu : Juli 2023
 - Peserta : Kemenkomarves
 - Jumlah Peserta : 9 orang
 - Alasan : Me-monev Survei Kabel Laut di NTB

C. Pelaporan

- Rapat Internal Kemenko Marves
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Desember 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : 36 orang
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Desember 2023

Peserta : Kemenko Marves, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Investor Terkait

Jumlah Peserta : 20 orang

Narasumber : Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Perguruan Tinggi

c) Koordinasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya)

A. Perencanaan dan Persiapan

o Rapat Internal

Rapat Internal Lintas Keasdepan

Rapat internal Rekomendasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan, dan Jasa Lainnya pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata dan Kesehatan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari 2023

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : 65 orang

o Rapat Koordinasi dengan K/L terkait

Rapat koordinasi Rekomendasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan, dan Jasa Lainnya pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata dan Kesehatan

Tempat : Jawa Barat

Waktu : Februari 2023

Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan

Jumlah Peserta : 40 orang

B. Pelaksanaan

o Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait penyusunan Rekomendasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan, dan Jasa Lainnya. Dengan adanya penugasan kepada jasa konsultan dan pokja evaluasi dan promosi investasi pada destinasi pariwisata super prioritas (likupang). Harapannya diperoleh gambaran masalah yang dihadapi, hambatan dan tantangan Investasi Sektor Jasa Pariwisata dari berbagai perspektif stakeholder serta dapat menyusun rekomendasi alternatif solusi. Rapat Koordinasi direncanakan meliputi:

o Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP Likupang

Tempat : Sulawesi Utara
Waktu : Maret 2023
Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Sulawesi Utara, Kementerian Investasi/BKPM
Jumlah Peserta : 40 orang
Narasumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Sulawesi Utara, Kementerian Investasi/BKPM

o Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Bali

Tempat : Bali
Waktu : April 2023
Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Pemprov Bali
Jumlah Peserta : 40 orang
Narasumber : Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Pemprov Bali

• Survei Kunjungan Lapangan

Perjalanan dinas kunjungan kerja ke daerah dalam rangka Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP Likupang

o Kunjungan Lapangan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Bali

Tempat : Bali
Waktu : Juni 2023
Peserta : Kemenkomarves
Jumlah Peserta : 9 orang
Alasan : Me-monev Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Bali

o Kunjungan Lapangan dalam Rangka Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP di Sulawesi Utara

Tempat : Sulawesi Utara
Waktu : Juli 2023
Peserta : Kemenkomarves
Jumlah Peserta : 9 orang
Alasan : Me-monev Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP di Sulawesi Utara

C. Pelaporan

o Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : November 2023
Peserta : Kemenkomarves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan.
Jumlah Peserta : 50 orang
Narasumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Kebijakan Investasi Bidang Jasa												
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Menyusun Agenda Kebijakan												
1	Menginventarisasi isu												
2	Menyusun agenda kebijakan												
3	Menelaah agenda kebijakan												
4	Menetapkan agenda kebijakan												
B	Pelaksanaan												
	Merumuskan kebijakan												
1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan												
2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi												
3	Menelaah alternatif solusi												
4	Menetapkan rekomendasi kebijakan												
C	Pelaporan												
	Menyusun Dokumen Kebijakan												
	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan												
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Menyusun Agenda Kebijakan												
1	Menginventarisasi isu												
2	Menyusun agenda kebijakan												

3	Menelaah agenda kebijakan													
4	Menetapkan agenda kebijakan													
B	Pelaksanaan													
	Merumuskan kebijakan													
1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan													
2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi													
3	Menelaah alternatif solusi													
4	Menetapkan rekomendasi kebijakan													
C	Pelaporan													
	Menyusun Dokumen Kebijakan													
	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya													
A	Perencanaan dan Persiapan													
	Menyusun Agenda Kebijakan													
1	Menginventarisasi isu													
2	Menyusun agenda kebijakan													
3	Menelaah agenda kebijakan													
4	Menetapkan agenda kebijakan													
B	Pelaksanaan													
	Merumuskan kebijakan													
1	Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan													
2	Menetapkan fokus dan alternatif solusi													
3	Menelaah alternatif solusi													
4	Menetapkan rekomendasi kebijakan													
C	Pelaporan													
	Menyusun Dokumen Kebijakan													

Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Kebijakan Investasi Bidang Jasa												
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Menyusun Agenda Kebijakan					■							
B	Pelaksanaan												
	Merumuskan kebijakan											■	
C	Pelaporan											■	
	Menyusun dokumen kebijakan												■
RO	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan logistik												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Menyusun Agenda Kebijakan					■							
B	Pelaksanaan												
	Merumuskan kebijakan											■	
C	Pelaporan											■	
	Menyusun dokumen kebijakan												■
RO	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Menyusun Agenda Kebijakan					■							
B	Pelaksanaan												
	Merumuskan kebijakan											■	
C	Pelaporan											■	
	Menyusun dokumen kebijakan												■

d. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa adalah sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

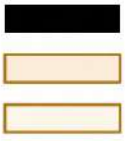
Kode	RO/Komponen Kegiatan/Rincian Komponen Kegiatan	Target	Anggaran
RO	Kebijakan Investasi Bidang Jasa	3 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
051.	Rekomendasi Kebijakan Investasi Jasa Perdagangan		720.000.000
A	Persiapan dan Perencanaan		179.467.000
	Rapat Lintas Keasdepan		33.750.000
	Rapat Lintas Kedeputan		35.650.000
B	Pelaksanaan		465.593.000
	Rapat Koordinasi Internal		41.250.000
	Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan Ekspor Tenaga Listrik di Indonesia		65.584.000
	Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Investasi PLTS		22.926.000
	Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Investasi		24.864.000
	Kunjungan Lapangan Benchmarking PLTS Hybrid di Indonesia		19.662.000
	Kunjungan Lapangan Benchmarking PLTS Hybrid di Indonesia		13.176.000
C	Pelaporan		74.940.000
	Rapat Koordinasi Perencanaan Rancangan Kebijakan		4.500.000
	Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan		42.040.000
052.	Rekomendasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan logistik		680.000.000
A	Persiapan dan Perencanaan		124.866.000
	Rapat Internal Lintas Keasdepan		33.750.000
	Rapat Koordinasi Lintas K/L		41.216.000
B	Pelaksanaan		497.490.000
	Rapat Internal		45.200.000
	Rapat Koordinasi Realisasi Investasi Masalah Investasi Tanjung Carat		57.497.000
	Rapat Koordinasi Masalah Kabel Laut		71.399.000
	Kunjungan Lapangan Evaluasi Realisasi Investasi Pelabuhan Tanjung Carat		24.314.000

	Kunjungan Lapangan Lokasi Pelabuhan PT Maspion		45.312.000
	Kunjungan Lapangan Kebijakan Survei Kabel Laut		26.968.000
C	Pelaporan		57.644.000
	Rapat Internal Kemenko Marves		27.000.000
	Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan		14.569.000
053.	Rekomendasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya		600.000.000
A	Persiapan dan Perencanaan		136.692.000
	Rapat Lintas Keasdepan		48.750.000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait		43.892.000
B	Pelaksanaan		411.558.000
	Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP Likupang		102.696.000
	Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Bali		75.298.000
	Kunjungan Lapangan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Bali		28.908.000
	Kunjungan Lapangan Evaluasi Realisasi Investasi Sektor Jasa Pariwisata di DPSP Sulawesi Utara		31.530.000
C	Pelaporan		51.750.000
	Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan		35.650.000

Jakarta, 2022
 Penanggung Jawab Kegiatan,
 Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa



Farah Heliantina
 NIP.19720505 199903 1 002



UNIT KERJA

ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RO 003
KEBIJAKAN INVESTASI STRATEGIS**

Kementerian	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: Persentase Rumusan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi : Strategis yang Ditindaklanjuti
Unit Eselon I	: Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	: Asisten Deputi Investasi Strategis
Program	: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Indikator Kinerja Program	: Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman : dan Investasi
Kegiatan	: Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	: Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan : Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Rancangan Kebijakan Investasi dan Pertambangan
Klasifikasi Rincian Output	: Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Indikator KRO	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan : Perdagangan
Rincian Output	: Menyesuaikan nomenklatur Asdep
Indikator Rincian Output	: Jumlah rekomendasi kebijakan ... yang dihasilkan
Volume Rincian Output	: Menyesuaikan jumlah komponen
Satuan Rincian Output	: Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (pasal 1; 77);
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Frameworks Convention on Climate Change;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- k. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan;
- l. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- m. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- o. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- u. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- v. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- w. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi;
- x. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);
- y. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;
- z. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
- aa. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- bb. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- cc. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan;
- dd. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- ee. Arahan Presiden ke Menko Marves dalam Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Indonesia EBTKE ConEx (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Konferensi dan Ekshibisi) Ke-10 Tahun 2021 (naskah terlampir);
- ff. Arahan Presiden ke Menko Marves dalam Sambutan Presiden pada Groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia Di Kalimantan Utara, 21 Desember 2021 (Naskah terlampir);
- gg. Amanat Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Hut Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesi (16 Agustus 2021).

2. Gambaran Umum

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019.

Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle-income country). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap).

Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi

sebagai respon dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy).

Guna mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, Pemerintah melaksanakan segala upaya dan strategi untuk membenahi faktor yang dapat menggairahkan investasi yakni kebijakan dan insentif. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Investasi Strategis:

1. Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Sektor kesehatan di Indonesia tidak berkembang seperti yang diharapkan pada masa pandemic *Covid-19* ini, kekurangan sarana dan prasarana kesehatan sangat terasa, namun di sisi lain kebutuhan tentang vaksin dan obat-obatan terpaksa diimpor mengingat keterbatasan industri farmasi di dalam negeri. Dibutuhkan pengendalian kebijakan pengembangan sektor strategis yang cenderung bersifat jangka menengah dan panjang seperti halnya Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes). "Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan", demikian amanat Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (16 Agustus 2021). Kemudian, *bagaimana industrialisasi dapat dikembangkan kembali dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia?* Aspek kelembagaan yang kuat dibutuhkan, yakni berupa aturan main yang mengatur tata hubungan antar elemen masyarakat dalam suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai perbandingan saat ini neraca perdagangan Alat Kesehatan (alkes) Indonesia terus mencatatkan defisit dan meningkat hampir 4x dari USD 161 juta pada 2013 ke USD 531 juta pada 2020. Impor Alat Kesehatan terus meningkat semenjak 2015. Sementara itu, ekspor alat Kesehatan meski masih tumbuh semenjak 2016.

Sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmalkes, Kemenkes dan BRIN didorong untuk memfasilitasi hilirisasi riset alkes dalam rangka meningkatkan pemenuhan alkes dalam negeri. Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 guna mencapai misi Presiden dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Sayangnya sampai saat ini belum tercapai, padahal waktu tersisa hanya 2 tahun lagi.

Atas dasar latar belakang tersebut dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya akan berkontribusi dalam debottlenecking isu ketidakmandirian farmalkes, Asisten Deputi Investasi Strategis melihat pentingnya Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi industri farmalkes melalui pengaturan aspek permodalan dan pembangunan kawasan industri khususnya Kawasan Industri Farmalkes yang saat ini sudah ada di daerah Batang, produksi internasional untuk menguatkan rantai pasok global dan mendorong regional champions di kawasan. Ketergantungan harus dikurangi dan kemandirian harus didorong untuk meningkatkan nilai tambah eksistensi ekonomi di kawasan. Sesuai dengan tema besar yang dipilih Pemerintah, "Recover Together, Recover Stronger". Pemulihan di beberapa negara sudah terjadi, tapi masih belum merata dan rentan. Indonesia tidak hanya harus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memproduksi sendiri vaksin Covid-19 tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada alat kesehatan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan pandemic.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau

Transformasi ekonomi dunia kini tengah bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth. Paradigma ini menjadi referensi dan portofolio bisnis bagi kalangan investor dan telah menjadi standar di negara maju. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Mengapa ini penting, karena hilirisasi industri yang terbukti mampu meningkatkan industrialisasi dan pemerataan ekonomi di Indonesia bagian Timur (BPS, 2021). Selain itu, perusahaan hilirisasi menunjukkan kinerja yang kuat dan menyumbangkan penerimaan pajak yang besar (Wood Mackenzie Company & Verdhana, 2021), serta mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih resilient dengan tidak mengandalkan komoditas mentah, sehingga terwujud Circular Economy yang berdampak pada Environmentally Sustainable.

Provinsi Kalimantan Utara yang telah menjadi daerah otonomi baru sejak 25 Oktober 2012, memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, diantaranya kehutanan, hasil laut, sumberdaya mineral, pertanian, dan perkebunan. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara sebesar 6,24%, kemudian tahun berikutnya (2019) meningkat menjadi 6,47%. Hanya pada tahun 2020 terjadi pelambatan -0,78%. Hal ini disebabkan oleh pandemi dan adanya PPKM.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki 17 potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi di wilayah ini. Gubernur Kaltara menguraikan potensi tersebut antara sektor perikanan, tanaman pangan (food estate), energi baru terbarukan, pariwisata dan infrastruktur. Di segi Kawasan Hijau menciptakan produk energi hijau yang mampu bersaing di pasar global dengan mengutamakan proses industri berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu petrochemical, electronic alumine, steel, new energy battery, industrial silicon, polycrystalline silicon, dan solar panel. Tentunya dengan dukungan potensi sumber daya yang besar untuk energi terbarukan sumber energi yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA"), dan juga solar panel sebagai sumber penyedia listrik untuk kawasan.

Potensi investasi Kaltara: kawasan industri hijau 16.400 Ha (terbesar saat ini di dunia), industri green hydrogen kapasitas 600.000 ton/th. Dibutuhkan pengawalan terhadap komitmen investasi yang telah ditandatangani Pemerintah RI-Tiongkok (21 Desember 2021) pada industri hijau dan hi-tech di Kaltara senilai US\$ 132.0 Miliar, mampu

menyerap tenaga kerja sebanyak 60 ribu orang serta diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis

. Merujuk pada PMK 130/2020 industri pionir adalah industri yang baru atau industri yang belum tersedia dalam skala yang memadai, industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, ada lima cakupan industri pionir yaitu logam dasar, pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Pemerintah juga menetapkan 9 bidang usaha industri pionir, terdiri 1) logam hulu, 2) pengilangan minyak bumi, 3) kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, dan 4) industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. 5) industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, 6) telekomunikasi, informasi dan komunikasi, 7) industri transportasi kelautan, 8) industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus, 9) infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan dan kondisi yang diharapkan di tahun 2023

1. Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Isu ketidakmandirian industri Farmasi dan Alkes antara lain disebabkan: ketidakpercayaan pasar kepada produk dalam negeri, harga tidak bersaing untuk level kualitas dan spesifikasi yang sama, mafia alkes impor mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan, ketidak-konsistenan fasyankes dan K/L untuk membeli alkes dalam negeri, jalur pengadaan misal Katalog Elektronik atau pengadaan daring lain tidak lancar, perusahaan principal tidak nyaman untuk memberikan lisensi, perusahaan principal sudah memiliki basis produksi di negara lain misal : Malaysia, Vietnam, Cina, Eropa, Amerika, India; kerja sama industri dan peneliti belum efektif, ketergantungan kepada komponen dan bahan baku impor. Diperlukan model aktivasi kelembagaan di seluruh rantai pasokan alkes untuk memaksimalkan penguasaan teknologi, kapasitas produksi dan penyerapan produk dalam negeri.

Padahal potensi pengembangan industri farmasi sangat tinggi di Indonesia, meski perlu diakui bahwa berbagai input masih perlu diimpor. Berbagai kendala investasi seperti tingginya ICOR (6,4), rendahnya aglomerasi sarana dan prasarana produksi, kebijakan sektoral pemerintah yang seringkali saling bertentangan, meningkatkan kendala pengembangan industri farmasi di Indonesia. Hasil audit kinerja sektor farmasi untuk kemandirian obat nasional tahun 2021 oleh BPKP menunjukkan: (1) Penggunaan BBO Impor mencapai Rp. 82 T atau 95% dari Obat Produksi DN; (2) Nilai Produksi Obat DN mencapai Rp. 86 T sedangkan sisanya masih di impor dalam bentuk obat jadi; dan (3) Pasar industri farmasi dalam negeri cukup besar, tahun 2019 mencapai Rp.95 Triliun. Karena itu, jika Pemerintah tidak mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan industri farmasi, maka rencana pengembangan kemandirian industri farmalkes dalam negeri yang sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional tidak akan tercapai. Hal ini menyebabkan potensi yang dimiliki Indonesia tidak tergali dengan optimal dan menyebabkan ketergantungan kita akan impor bahan baku obat dan alat kesehatan semakin besar, sehingga kedaulatan industri farmalkes dalam negeri tidak akan tercapai.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Industri Hijau

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dibantu oleh Asisten Deputi Investasi Strategis melihat pentingnya mendorong Indonesia berinvestasi pada ketahanan energi dalam perubahan iklim. Namun seperti umumnya investasi, merintis tumbuhnya investasi hijau kawasan industri dan di Kaltara menemui banyak tantangan karena memerlukan banyak stakeholder untuk maju bersama. Pada tahun 2022, Asisten Deputi Investasi Strategis berfokus pada Debottlenecking isu dan proses percepatan pembangunan kawasan industri. Dalam hal ini berperan aktif dalam penyelesaian hambatan proses perizinan kawasan industri, pelaksanaan berusaha dan meningkatkan ketertarikan minat investor.

Keputusan ini juga diambil untuk mendukung realisasi kemajuan salah satu kawasan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yaitu Kawasan Industri Tanah Kuning.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis

Pada investasi industri pionir, pembangunan kawasan tematik diperlukan studi kelayakan dan perencanaan yang matang yang melibatkan instansi daerah dan pusat serta pihak-pihak yang berkepentingan guna mempermudah proses perizinan. Selanjutnya upaya untuk mendorong pengembangan produk-produk turunan dengan nilai tambah yang lebih besar untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah-langkah reformasi struktural berupa perbaikan SDM, pembangunan infrastruktur, pengembangan riset dan teknologi, serta perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan tetap harus dilakukan. Perlu ada Studi dan Rencana Komprehensif tentang Hilirisasi Industri Indonesia ke depan dan dipadukan dengan eksekusi di lapangan yang cepat.

2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh *stakeholder* (K/L terkait)

1. Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan melalui model aktivasi kelembagaan di seluruh rantai pasokan farmalkes untuk memaksimalkan penguasaan teknologi, kapasitas produksi dan penyerapan produk dalam negeri. Keluaran Kebijakan Industri Farmasi yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian industri farmalkes nasional, mengurangi ketergantungan impor bahan baku, ketersediaan obat dan pelayanan Kesehatan yang baik bagi masyarakat luas, industrialisasi farmalkes dalam negeri dengan mengedepankan penggunaan komponen dalam negeri.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Industri Hijau

Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan diharap diadopsi oleh Kementerian PUPR sebagai Peraturan Menteri terkait penggunaan Wilayah Sungai di Kalimantan, serta oleh Kementerian Perindustrian terkait kawasan industri khusus. Selanjutnya, meningkatnya minat investor untuk berpartisipasi di industri hijau Indonesia yang dicanangkan Presiden sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia. Dari sisi Masyarakat, dapat menjadi lahan pekerjaan sehingga turut meningkatkan taraf kualitas kehidupan masyarakat lokal.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis

Proses hilirisasi yang baru dilakukan pada Nikel telah mampu memberikan dampak besar bagi stabilitas makroekonomi, perubahan struktur ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan pemerataan ekonomi Indonesia. Ke depan, dengan Kalimantan Utara sebagai motor, hilirisasi industri akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang lebih luas. Struktur ekonomi akan lebih kompleks, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6% dan meningkatkan PDB per kapita >2x dalam 1 dekade ke depan. Tesla juga sudah memutuskan rencana investasinya di

Indonesia pada ekosistem baterai mobil dan mobil listrik dengan pembangunan pabriknya di Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan industri seluas 4.300 ha itu menjadi industri terintegrasi antara baterai listrik dan pabrik mobil listrik. Saat ini fokus Pemerintah ialah menyiapkan ekosistem baterai mobil listrik yang komprehensif mulai dari hulu hingga ke hilir, yakni dari tambang, smelter, prekursor, sel baterai, hingga daur ulangnya.

Dampak signifikan akan terjadi seperti tumbuhnya industrialisasi di Kawasan Timur Indonesia dan Pemerataan Ekonomi, dihasilkan kinerja yang kuat dan menyumbangkan penerimaan pajak yang besar, membantu menjaga kinerja neraca transaksi berjalan, serta menjaga stabilitas nilai tukai melalui peningkatan dollar Dalam Negeri.

B. Penerima Manfaat (Akumulasi dari setiap komponen)

Penerima manfaat dari Kebijakan Investasi Strategis adalah:

1. Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan instansi terkait lainnya:
 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal/BKPM;
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Kementerian Keuangan;
 - Kementerian Kesehatan;
 - Kementerian Perindustrian;
 - Kementerian Perdagangan;
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN);
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - Pemerintah Desa Mangkupadi;
3. Kementerian/Lembaga Lainnya:

- Kementerian Kesehatan;
 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Perguruan Tinggi.
4. Unit di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: mengungkit percepatan tercapainya target penggunaan produk dalam negeri melalui program Bangga Buatan Indonesia.
 - Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi: scaling up implementasi UUCK di sektor industri farmalkes.
 - Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa: perbaiki jasa pelayanan kesehatan dengan terurainya masalah dalam industri farmalkes.
 - Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha: potensi KPBU industri farmalkes.
5. Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Stakeholder lain di bidang Kemaritiman dan Investasi:
- Badan Usaha Pengelola Kawasan Industri;
 - Investor Kawasan Industri;
 - Fasyankes;
 - Asosiasi profesi dan pelaku usaha sektor kesehatan (IDI, PPNI, Gakeslab, Aspaki dll);
 - Start up;
 - Masyarakat Kalimantan Utara dan masyarakat lokal wilayah Kawasan Industri Tanah Kuning.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Metode Pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola, dengan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

a. Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

1. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi Inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda kebijakan, menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Januari 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Biro Hukum, Biro Perencanaan

- Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Eselon I maupun Eselon II dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada isu terkait.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Februari 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Biro Hukum, Biro Perencanaan

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan fokus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Koordinasi Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Maret 2023
 - Peserta : K/L terkait
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Kunjungan Lapangan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
 - Tempat : Batang
 - Waktu : April 2023
 - Peserta : K/L terkait
 - Jumlah Peserta : @20 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon
 - Alasan Lokasi : Industri Farmasi dan Alat Kesehatan berada di Batang

- *Focus Group Discussion* Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Mei 2023
 - Peserta : K/L terkait
 - Jumlah Peserta : @60 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Koordinasi Penyelasaran, Penyerasian, dan Penyemimbangan Substansi
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Juni 2023
 - Peserta : K/L terkait
 - Jumlah Peserta : @20 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Diplomasi/*benchmarking* ke Luar Negeri
 - Tempat : China
 - Waktu : Juli 2023
 - Peserta : Internal A3
 - Jumlah Peserta : @2 orang

3. Pelaporan

Tahapan Pelaporan, dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Oktober 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : November 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau

1. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi Inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda kebijakan, menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Internal Lintas Keasdepan

Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri Hijau pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri Hijau.

Tempat : Bandung
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Rapat Internal dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri
Tempat : Bogor
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6, Pemprov Kalimantan Utara
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon
- Rapat Internal dengan Pemerintah Pusat
Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri
Tempat : Bogor
Waktu : Februari 2023
Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM

2. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait penyusunan Kebijakan Debottlenecking Isu PLTA dan Kawasan Industri. Harapannya diperoleh gambaran masalah yang dihadapi, hambatan dan tantangan investasi kawasan industri dan PLTA dari berbagai perspektif stakeholder serta dapat menyusun rekomendasi alternatif solusi.

Rapat Koordinasi direncanakan meliputi:

- Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Industri di Kalimantan Utara
Tempat : Bogor
Waktu : Maret 2023
Peserta : Internal Deputi 6, Pemprov Kalimantan Utara
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM

- Rapat Perizinan Pelabuhan untuk Percepatan Pembangunan PSN Kawasan Industri Tanah Kuning – Kaltara
 - Tempat : Kalimantan Utara
 - Waktu : Maret 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6, Pemprov Kalimantan Utara
 - Jumlah Peserta : @30 orang
 - Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM
- Rapat Perizinan Pelabuhan untuk Percepatan Pembangunan PSN Kawasan Industri Tanah Kuning – Kaltara II
 - Tempat : Kalimantan Utara
 - Waktu : April 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6, Pemprov Kalimantan Utara
 - Jumlah Peserta : @30 orang
 - Narasumber : Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan
- Kunjungan Kerja Pembangunan Kawasan Industri
 - Tempat : Kalimantan Utara
 - Waktu : Agustus 2023
 - Peserta : K/L terkait
 - Jumlah Peserta : @30 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

3. Pelaporan

Tahapan Pelaporan, dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : Oktober 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - Tempat : Jabodetabek
 - Waktu : November 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @40 orang
 - Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir

1. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi Inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda kebijakan, menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Internal Lintas Keasdepan
Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Industri Pionir pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Rapat Internal dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Februari 2023
Peserta : K/L terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

- Rapat Internal dengan Pemerintah Pusat
Rapat internal Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri Pionir pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Debottlenecking Isu dan Kawasan Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Februari 2023
Peserta : Antar K/L/OPD/Investor Terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM

2. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait penyusunan Kebijakan Debottlenecking Isu Kawasan Industri Pionir. Harapannya diperoleh gambaran masalah yang dihadapi, hambatan dan tantangan investasi kawasan industri dan

dari berbagai perspektif stakeholder serta dapat menyusun rekomendasi alternatif solusi.

Rapat Koordinasi direncanakan meliputi:

- Rapat Koordinasi Kawasan Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Maret 2023
Peserta : K/L terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kementerian ESDM
- Rapat Perizinan Investasi di Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Maret 2023
Peserta : K/L terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemenko Ekon, Kemenperin, Kemendag
- Rapat Perizinan Investasi di Industri Pionir II
Tempat : Jabodetabek
Waktu : April 2023
Peserta : K/L terkait
Jumlah Peserta : @30 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon
- FGD Rencana Investasi Industri Pionir
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Agustus 2023
Peserta : K/L terkait
Jumlah Peserta : @60 orang
Narasumber : Kemendag, Kemenperin, KemenkoEkon

3. Pelaporan

Tahapan Pelaporan, dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa Kertas Kerja Kebijakan yang dilaksanakan melalui rapat antara lain:

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
Tempat : Jabodetabek
Waktu : Oktober 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @40 orang
Narasumber : Biro Hukum, Biro Perencanaan
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Tempat : Jabodetabek
Waktu : November 2023

Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @40 orang
Narasumber : Biro Hukum, Biro Perencanaan

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
RO	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis												
051.	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan												
A.	Perencanaan												
i.	Menyusun Agenda Kebijakan												
1	Menginventarisasi Isu Privat Dan Isu Publik	■	■										
2	Menyusun Agenda Kebijakan		■	■									
3	Menelaah Agenda Kebijakan			■	■								
4	Menetapkan Agenda Kebijakan			■	■	■							
B.	Pelaksanaan												
ii.	Merumuskan Kebijakan												
1	Merumuskan Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup Kebijakan					■	■						
2	Menetapkan Fokus Dan Alternatif Solusi						■	■					
3	Menelaah Alternatif Solusi							■	■	■	■		
4	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan								■	■	■	■	

iii.	Mengevaluasi Kebijakan													
1	Mengidentifikasi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kebijakan													
2	Menyusun Instrumen Pengukuran Kinerja Program Kebijakan													
3	Melakukan Analisis Kinerja Program Kebijakan													
4	Menetapkan Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Kebijakan													
C.	Pelaporan													
iv.	Menyusun Laporan Kebijakan													
1	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													
052.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau													
A.	Perencanaan													
i.	Menyusun Agenda Kebijakan													
1	Menginventarisasi Isu Privat Dan Isu Publik													
2	Menyusun Agenda Kebijakan													
3	Menelaah Agenda Kebijakan													
4	Menetapkan Agenda Kebijakan													
B.	Pelaksanaan													
ii.	Merumuskan Kebijakan													

1	Merumuskan Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup Kebijakan																		
2	Menetapkan Fokus Dan Alternatif Solusi																		
3	Menelaah Alternatif Solusi																		
4	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan																		
C.	Pelaporan																		
iii.	Menyusun Laporan Kebijakan																		
1	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan																		
053.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir																		
A.	Perencanaan																		
i.	Menyusun Agenda Kebijakan																		
1	Menginventarisasi Isu Privat Dan Isu Publik																		
2	Menyusun Agenda Kebijakan																		
3	Menelaah Agenda Kebijakan																		
4	Menetapkan Agenda Kebijakan																		
B.	Pelaksanaan																		
ii.	Merumuskan Kebijakan																		
1	Merumuskan Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup Kebijakan																		
2	Menetapkan Fokus Dan Alternatif Solusi																		

3	Menelaah Alternatif Solusi													
4	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan													
C.	Pelaporan													
iii.	Menyusun Laporan Kebijakan													
1	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan													

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KRO	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
RO	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis													
051	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan													
1.	Menyusun Agenda Kebijakan													
2.	Merumuskan Kebijakan													
3.	Mengevaluasi Kebijakan													
4.	Menyusun Laporan Kebijakan													
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau													
1.	Menyusun Agenda Kebijakan													
2.	Merumuskan Kebijakan													
3.	Menyusun Laporan Kebijakan													
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir													
1.	Menyusun Agenda Kebijakan													

2.	Merumuskan Kebijakan												
3.	Menyusun Laporan Kebijakan												

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan rekomendasi kebijakan investasi strategis adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

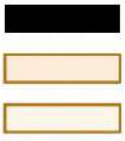
Kode	KRO/RO/Komponen Kegiatan/Rincian Komponen Kegiatan	Target	Anggaran
KRO	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		
RO	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis	3 Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
051	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan		490.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		124.096.000
B	Pelaksanaan		290.458.000
C	Pelaporan		75.446.000
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau		1.100.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		196.326.000
B	Pelaksanaan		723.968.000
C	Pelaporan		179.706.000
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir		510.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		96.381.000
B	Pelaksanaan		327.338.000
C	Pelaporan		86.281.000

Jakarta,2022
Penanggung jawab Kegiatan



Bimo Wijayanto

NIP 19770705 200212 1 002



UNIT KERJA
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA INVESTASI
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
REKOMENDASI KEBIJAKAN KERJA SAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
TA 2023

Kementerian	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
IKU Eselon II	:	1.Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi Pemerintah dan Badan Usaha yang Ditindaklanjuti 2.Persentase Rumusan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Pemerintah dan Badan Usaha yang Ditindaklanjuti
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Program	:	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	:	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan
Indikator Kinerja Program	:	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan
Kegiatan	:	6008 Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Rumusan Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Klasifikasi Rincian Output	:	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Indikator KRO	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Perdagangan
Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
Volume Rincian Output	:	3 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- d. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

2. Gambaran Umum

Memasuki tahun ketiga RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJM ke-4, pemerintah telah mencanangkan tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Untuk mewujudkan sasaran pada tema tersebut, dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menggariskan arah kebijakan-kebijakan sesuai agenda pembangunan yang akan dicapai, dimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 diarahkan pada "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Saat ini kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur semakin tinggi, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPBU) menjadi salah satu skema pendanaan yang menjanjikan. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Hingga saat ini paling tidak telah terdapat 17 Proyek KPBU yang telah ditandatangani perjanjian kerjasamanya. Dalam jangka Panjang, jumlah proyek

pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU akan terus bertambah. Selain memberikan alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur, skema KPBU dapat memunculkan resiko fiskal yang perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Salah satu karakteristik utama dalam KPBU adalah terdapat alokasi risiko. Keterlibatan pihak swasta dalam KPBU tidak berarti mengalihkan seluruh risiko kepada pihak swasta. Alokasi risiko yang optimal dalam KPBU adalah bahwa risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelola atau menanggungnya. Sementara risiko keuangan proyek, pihak yang paling tepat untuk menanggungnya adalah pihak swasta mengingat pihak swasta lebih memiliki fleksibilitas untuk melakukan mitigasi risiko.

Selain itu, masih adanya permasalahan dalam keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan dalam perubahan tarif atau terjadinya terminasi tentu saja tidak dapat diperkirakan pada saat PJK dan badan usaha menandatangani perjanjian kerja sama. Diperlukan Kerjasama dan koordinasi yang baik dan terarah antara stakeholder dalam melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan Kerjasama pemerintah dan badan usaha yang optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang berkualitas.

Agar bisa mencapai kondisi tersebut, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama pada sektor kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha yang didorong melalui pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan baik di sektor ekonomi, sosial dan kerja sama pemerintah dan badan usaha lainnya. Asisten Deputi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha mendorong pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan baik di sektor ekonomi, sosial dan kerja sama pemerintah dan badan usaha lainnya melalui penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan rincian output sebagai berikut: (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha, (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi.

Pada tahun 2023, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur pada Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha akan difokuskan pada proyek berikut:

1. Pembangunan SPAM Karian Serpong-Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
2. Pembangunan SPAM Jatiluhur-Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat
3. Pembangunan SPAM Djuanda-Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat
4. Pembangunan SPAM Buaran 3
5. Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6. Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya-Kulonprogo
7. Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
8. Pecepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
9. Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
10. Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
11. Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
12. Pembangunan Tanggul Rawa Jabung
13. Pembangunan LRT Jabodebek
14. Pembangunan Bandar Udara Kediri
15. Kawasan Industri Ngawi

2.1 Permasalahan yang Ingin Diselesaikan dan Kondisi yang Diharapkan di Tahun 2023

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi focus utama saat ini, yaitu (1) Keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan, untuk kedepannya akan didorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang lebih inovatif melalui skema pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha; (2) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang terlibat baik dari sisi pelaksana proyek maupun stakeholder yang terlibat, untuk kedepannya akan dilakukan follow up secara rutin untuk keberlanjutan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha; (3) Proses pembebasan lahan membutuhkan waktu yang sangat panjang, hal ini memperlambat proses pembangunan infrastruktur khususnya untuk jalan tol, SPAM, Pelabuhan, Bandara, LRT, dll untuk kedepannya akan dilakukan analisis resiko atas pelaksanaan proyek tersebut; (4) Ditetapkannya

kebijakan yang terintegrasi dan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program dan kegiatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

2.2 Dampak yang Akan Dirasakan oleh Stakeholder (K/L) Terkait

Dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder yang terlibat adalah (1) Kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi dengan adanya peluang kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha baik dalam negeri dan investasi asing; (2) Pembangunan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dengan adanya koordinasi yang optimal antar stakeholder; (3) Meminimalisir resiko yang timbul dari proses pembebasan lahan dalam pembangunan proyek infrastruktur; (4) Mewujudkan kerjasama pemerintah dan badan usaha yang optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang berkualitas.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha adalah:

- a. Unit Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:
 - Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
 - Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
 - Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa;
 - Asisten Deputi Investasi Strategis;
 - Asisten Deputi Pertambangan;
 - Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air;
 - Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah;
 - Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas;
- b. K/L dan instansi terkait lainnya dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman:
 - Kementerian Perhubungan;
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;
 - Kementerian Keuangan;
 - Kementerian Dalam Negeri;

- Kementerian Perindustrian;
- Kementerian Perdagangan;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- Seluruh Provinsi di Sumatera
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah;
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Provinsi Jawa Timur;
- Provinsi Sulawesi Selatan;
- Provinsi Sulawesi Utara;
- Provinsi Kalimantan Timur
- dll.

d. Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder di bidang Kemaritiman dan Investasi:

- Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Jasa Tirta I , Perum Jasa Tirta II, PT. PP, PT Wijaya Karya, dll;
- Badan Usaha Milik Daerah di berbagai provinsi;
- Investor yang terlibat dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

051. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Sosial

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda, kebijakan,

menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur sosial dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Internal Inventarisasi Isu Privat dan Isu Publik

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @30 Orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @25 Orang

- Rapat Koordinasi Penelaahan Kebijakan dan Penetapan Agenda Kebijakan

Tempat : Banten
Waktu : Maret 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta : @20 Orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan focus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur sosial melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Perumusan Lingkup Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : April 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta : @50 Orang

- Rapat Koordinasi Penetapan Fokus dan Alternatif Solusi

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Mei 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

- | | |
|----------------|-------------|
| Jumlah Peserta | : @50 Orang |
|----------------|-------------|
- Kunjungan Lapangan

Tempat	: Jawa Tengah
Waktu	: Juni 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @10 Orang
 - Kunjungan Lapangan

Tempat	: Jawa Timur
Waktu	: Juli 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @10 Orang
 - Kunjungan Lapangan

Tempat	: Bekasi
Waktu	: Agustus 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @10 Orang
 - Jasa Konsultasi Legal Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial Sistem Penyediaan Air Minum Tahap 1 dan 2

Waktu	: 1 tahun
Jumlah Kajian	: 2 Kajian

C. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa kertas kerja kebijakan yang dilaksanakan dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur sosial melalui rapat antara lain:

- Rapat Koordinasi Hasil Montoring dan Evaluasi

Tempat	: DKI Jakarta
Waktu	: Oktober 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @50 Orang
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kebijakan

Tempat	: DKI Jakarta
Waktu	: Oktober 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @50 Orang

- Rapat Koordinasi Capaian TA 2023

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : November 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @37 Orang

052. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda, kebijakan, menelaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat Internal Inventarisasi Isu Privat dan Isu Publik

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2023

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : @40 Orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari 2023

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : @20 Orang

- Rapat Koordinasi Penelaahan Kebijakan dan Penetapan Agenda Kebijakan

Tempat : Banten

Waktu : Maret 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @20 Orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan focus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan proyek

kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Perumusan Lingkup Kebijakan
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : April 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 - Jumlah Peserta : @50 Orang
- Rapat Koordinasi Penetapan Fokus dan Alternatif Solusi
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Mei 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 - Jumlah Peserta : @32 Orang
- Kunjungan Lapangan
 - Tempat : Jawa Tengah
 - Waktu : Juni 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 - Jumlah Peserta : @10 Orang
- Kunjungan Lapangan
 - Tempat : Bekasi
 - Waktu : Juli 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 - Jumlah Peserta : @8 Orang
- Kunjungan Lapangan
 - Tempat : Jawa Timur
 - Waktu : Agustus 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 - Jumlah Peserta : @6 Orang
- Jasa Konsultansi Legal Perorangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - Waktu : 1 tahun
 - Jumlah Kajian : 1 Kajian

C. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa kertas kerja kebijakan yang dilaksanakan dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

percepatan pembangunan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha melalui rapat antara lain:

- Rapat Koordinasi Hasil Montoring dan Evaluasi

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Oktober 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta : @40 Orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Oktober 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta : @30 Orang

- Rapat Koordinasi Capaian TA 2023

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : November 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta : @30 Orang

053. Koordinasi dan Sinkorinsasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi

A. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan meliputi inventarisasi isu privat dan isu publik, penyusunan agenda, kebijakan, menalaah agenda kebijakan dan menetapkan agenda kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur ekonomi dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- Rapat internal Inventatisasi isu privat dan isu publik

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @50 Orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : @30 Orang

- Rapat Koordinasi Penelaahan Kebijakan dan Penetapan Agenda Kebijakan

Tempat : Bogor

Waktu : Maret 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @30 Orang

B. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan merumuskan kebijakan meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan, menetapkan focus dan alternatif solusi, menelaah alternatif solusi dan menetapkan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur ekonomi melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Perumusan Lingkup Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : April 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @50 Orang

- Rapat Koordinasi Penetapan Fokus dan Alternatif Solusi

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Mei 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @30 Orang

- Kunjungan Lapangan

Tempat : Jawa Tengah

Waktu : Juni 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @10 Orang

- Kunjungan Lapangan

Tempat : Bekasi

Waktu : Juli 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait

Jumlah Peserta : @8 Orang

- Kunjungan Lapangan

Tempat : Bogor

Waktu : Agustus 2023

- | | |
|----------------|--|
| Peserta | : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait |
| Jumlah Peserta | : @8 Orang |
- Kunjungan Lapangan

Tempat	: Jawa Timur
Waktu	: Agustus 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @8 Orang
 - Jasa Tenaga Pendukung Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi Jalan Tol Jawa Bagian Tengah

Waktu	: 1 tahun
Jumlah Kajian	: 1 Kajian
 - Diplomasi/*benchmarking* ke Luar Negeri

Perjalanan dinas kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka konsultasi untuk mewujudkan peningkatan nilai proyek investasi asing di Indonesia dan mendorong investor internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan melakukan pendekatan langsung baik kepada pelaku usaha asing maupun pemerintah negara lain.

Tempat	: Tiongkok
Waktu	: Juli 2023
Peserta	: Internal A4
Jumlah Peserta	: @1 Orang

C. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan kebijakan berupa kertas kerja kebijakan yang dilaksanakan dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha pada sector infrastruktur ekonomi melalui rapat antara lain:

- Rapat Koordinasi Hasil Montoring dan Evaluasi

Tempat	: DKI Jakarta
Waktu	: Oktober 2023
Peserta	: Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
Jumlah Peserta	: @50 Orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kebijakan

Tempat : DKI Jakarta
 Waktu : Oktober 2023
 Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 Jumlah Peserta : @18 Orang

- Rapat Koordinasi Capaian TA 2023

Tempat : DKI Jakarta
 Waktu : November 2023
 Peserta : Kementerian/Lembaga/Perusahaan terkait
 Jumlah Peserta : @18 Orang

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan										
RO	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha												
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial												
A.	Perencanaan dan Persiapan												
I	Menyusun Agenda Kebijakan												
1.	Menginventarisasi Isu Privat dan Isu Publik	■	■										
2.	Menyusun Agenda Kebijakan		■	■									
3.	Menelaah Agenda Kebijakan			■	■								
4.	Menetapkan Agenda Kebijakan				■	■							
B.	Pelaksanaan												
II	Merumuskan Kebijakan												
1.	Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan					■	■						
2.	Menetapkan Fokus dan Alternatif Solusi						■	■	■				
3.	Menelaah Alternatif Solusi								■	■	■		
4.	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan										■	■	
C.	Pelaporan												

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Menyusun Laporan Kebijakan												
1.	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan												
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha												
A.	Perencanaan dan Persiapan												
I	Menyusun Agenda Kebijakan												
1.	Menginventarisasi Isu Privat dan Isu Publik												
2.	Menyusun Agenda Kebijakan												
3.	Menelaah Agenda Kebijakan												
4.	Menetapkan Agenda Kebijakan												
B.	Pelaksanaan												
II	Merumuskan Kebijakan												
1.	Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan												
2.	Menetapkan Fokus dan Alternatif Solusi												
3.	Menelaah Alternatif Solusi												
4.	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan												
C.	Pelaporan												
III.	Menyusun Laporan Kebijakan												
1.	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan												
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi												
A.	Perencanaan dan Persiapan												
I	Menyusun Agenda Kebijakan												
1.	Menginventarisasi Isu Privat dan Isu Publik												

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Menyusun Agenda Kebijakan		■	■									
3.	Menelaah Agenda Kebijakan			■	■								
4.	Menetapkan Agenda Kebijakan				■	■							
B. Pelaksanaan													
II Merumuskan Kebijakan													
1.	Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kebijakan					■	■						
2.	Menetapkan Fokus dan Alternatif Solusi						■	■	■				
3.	Menelaah Alternatif Solusi								■	■	■		
4.	Menetapkan Rekomendasi Kebijakan										■	■	
C. Pelaporan													
III. Menyusun Laporan Kebijakan													
1.	Menyusun Kertas Kerja Kebijakan											■	■

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha												
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial												
1.	Menyusun Agenda Kebijakan	■	■	■	■	■							
2.	Merumuskan Kebijakan					■	■	■	■	■	■		
3.	Menyusun Laporan Kebijakan											■	■
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha												

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menyusun Agenda Kebijakan												
2.	Merumuskan Kebijakan												
3.	Menyusun Laporan Kebijakan												
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi												
1.	Menyusun Agenda Kebijakan												
2.	Merumuskan Kebijakan												
3.	Menyusun Laporan Kebijakan												

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha adalah sebesar Rp 1.900.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

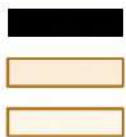
No.	KRO/RO/KOMPONEN	TARGET KELUARAN	ANGGARAN (Rp)
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
RO	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	3 Rekomendasi Kebijakan	1.900.000.000
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	680.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		73.643.000
B	Pelaksanaan		526.141.000
C	Pelaporan		80.216.000
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pecepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	585.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		81.378.000
B	Pelaksanaan		424.037.000
C	Pelaporan		79.585.000

No.	KRO/RO/KOMPONEN	TARGET KELUARAN	ANGGARAN (Rp)
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	635.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan		105.714.000
B	Pelaksanaan		395.470.000
C	Pelaporan		133.816.000

Jakarta, 2022
 Penanggung Jawab Kegiatan



(Ir. Hari Kusmardianto, M.Sc.)
 NIP 19650525 199103 1 008



UNIT KERJA

ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN



**KERANGKA ACUAN KERJA
REKOMENDASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN**

Kementerian	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Pertambangan
Program	:	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	:	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan
Indikator Kinerja Program	:	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan
Output Program	:	Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan
Indikator Output Program	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan yang Dihasilkan dan Ditindaklanjuti
Kegiatan	:	Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Rancangan Kebijakan Investasi dan Pertambangan
Klasifikasi Rincian Output	:	ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
Indikator KRO	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan Pertambangan
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertambangan
Volume Rincian Output	:	3 Dokumen
Satuan Rincian Output	:	Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba;
- c. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
- f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
- g. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- i. Keputusan Menteri ESDM nomor 261 tahun 019 tentang DMO Batubara
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;
- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2. Gambaran Umum

Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Indonesia telah menetapkan arah Kebijakan Jangka Panjang: Indonesia Maju 2045, *Net Zero Emission* 2060 (transisi energi), Pengembangan Industri Baterai dan *Electric Vehicle* (EV), Pengembangan Industri Pertahanan, Industri Kesehatan. Mineral Kritis adalah mineral yang dapat menghasilkan nilai tambah strategis untuk kesejahteraan rakyat yang bersumber dari kekayaan di Indonesia, memiliki peran penting dalam rantai pasok kebutuhan industri, pengembangan energi terbarukan untuk domestik dan global, serta memiliki fungsi apabila tanpanya akan berdampak pada ekonomi, geopolitik, keamanan nasional dan ketahanan sumber daya. Maka mineral yang berpotensi dianggap kritis/strategis, yaitu: Lithium (Li), Copper (Cu), Timah (Ti), Aluminium (Al), Rare-Earth Elements (REE), Nikel (Ni), Cobalt (Co), Batubara, Timbal (Pb), dan Logam Mulia (Perak & Emas).

Asisten Deputi Pertambangan melihat pentingnya untuk menyepakati pengertian, kriteria dan jenis mineral kritis di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan tersebut, potensi keterdapatan mineral kritis dapat diidentifikasi dan pengelolaannya dapat dirumuskan. Selain itu belum adanya peraturan perundang-undangan yang

menjelaskan mengenai definisi mineral kritis dari aspek perekonomian dan pengamanan rantai pasok.

Proses hilirisasi mineral dan batu bara harus dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, dalam hilirisasi mineral dan batubara, pemerintah mengedepankan peningkatan nilai tambah dari mineral tersebut. Sehingga mineral dan batubara tidak hanya menjadi komoditas sebagai kontribusi bagi penerimaan negara namun juga sebagai pasokan dalam menumbuhkembangkan industri dalam negeri.

2.1 Permasalahan yang ingin diselesaikan

Untuk menyepakati pengertian, kriteria dan jenis mineral kritis di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan tersebut, potensi ketersediaan mineral kritis dapat diidentifikasi dan pengelolaannya dapat dirumuskan. Selain itu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai definisi mineral kritis dari aspek perekonomian dan pengamanan rantai pasok.

Dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan dan memperbaiki neraca perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah mengatur harga transaksi bijih mineral, salah satunya bijih nikel yang jumlah produksinya terbesar di dunia. Harga Patokan Mineral bijih nikel telah diatur dalam Permen ESDM No.11 tahun 2020. Dengan adanya HPM tersebut, maka harga penjualan/pembelian bijih nikel tidak boleh dibawahnya. Komponen formula HPM meliputi HMA, kadar nikel, correction factor, moisture, dan payable metal (dalam hal ini kobalt). Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin sudah berlangsung sejak lama dan telah menopang perekonomian penduduk sekitar, namun pertambangan ini juga menimbulkan dampak negative bagi social dan lingkungan. Kegiatan penyelundupan juga marak terjadi seperti penyelundupan emas, timah, batubara, bahan bakar minyak. Gambaran diatas secara ekonomi berdampak atas hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah. Maka dalam kegiatan ini juga bergerak pada implementasi arahan percepatan penanggulangan pencurian dan penyelundupan sumber daya alam industry ekstraktif.

Perlu melakukan upaya improvisasi yang komprehensif dan sinergis dengan K/L, pelaku usaha (baik usaha pertambangan maupun pemurnian), industri pengguna akhir agar cadangan nikel Indonesia dapat sustain menopang strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, serta mengurangi defisit perdagangan dari industri pertambangan. Upaya hilirisasi mineral batubara didalam negeri membutuhkan dukungan kebijakan yang searah. Kegiatan kajian, pengendalian, dan pengawasan dalam hal hilirisasi mineral dan batubara sangat penting jika diinginkan untuk optimalisasi kegiatan tersebut.

2.2 Dampak yang akan dirasakan oleh *stakeholder*

- Tersedianya daftar mineral kritis di Indonesia.
- Mengurangi potensi kehilangan pendapatan negara/daerah dari kegiatan illegal mining, illegal drilling, dan penyelundupan komoditas minerba dan migas.

- Kebijakan pemerintah dan arah industrialisasi sangat mempengaruhi kondisi hilirisasi mineral dan batubara, sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan optimalisasi hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rekomendasi Kebijakan Pertambangan adalah

- a. K/L dan instansi terkait lainnya dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian ESDM; Kementerian Perdagangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertahanan; BRIN; dan Perguruan Tinggi
- b. Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder di bidang Kemaritiman dan Investasi
- c. Unit Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- a. Komponen 051 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) subkomponen sebagai berikut:

▪ **Perencanaan dan Persiapan**

- 1) Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu, penyiapan rencana, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan
- 2) Identifikasi kebijakan/ permasalahan terkait Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yang telah ada
- 3) Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia
Adapun aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yaitu:
 - Rapat Internal
 - Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan

▪ **Pelaksanaan**

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yaitu:

- Rapat Koordinasi
- FGD
- Pembentukan Tim Koordinasi Penyelasaran, Penyerasian, dan Penyimbangan Substansi
- Penugasan kepada Jasa Konsultan

▪ **Pelaporan**

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan untuk Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yaitu:

- Rapat Internal lintas Unit Kerja
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

b. Komponen 052 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia

Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada kegiatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia dibagi menjadi 3 komponen kegiatan utama sebagai berikut :

▪ **Persiapan (Agenda Setting)**

- Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu persiapan rencana, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan.
- Identifikasi kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah ada
- Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Adapun aktivitas tahapan persiapan kegiatan persiapan Kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu:
- Rapat Internal
- Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan
- Kunjungan Lapangan

▪ **Pelaksanaan (Koordinasi dan Formulasi Kebijakan)**

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu:

- Rapat Koordinasi
- Kunjungan Lapangan
- Fasilitasi Percepatan Penyusunan Dokumen,
- FGD
- Koordinasi Penyelasaran, Penyerasian, dan Penyeimbangan Substansi
- Sekretariat Tim percepatan penanggulangan pencurian dan penyelendupan sumber daya alam industry ekstraktif

▪ **Pelaporan (Perumusan dan Evaluasi)**

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu:

- Rapat Internal lintas Unit Kerja
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

c. Komponen 053 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia

▪ **Perencanaan dan Persiapan**

- Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu persiapan rencana, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kebijakan Peningkatan Cadangan Mineral dan Batu Bara dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan.

- Identifikasi kebijakan Peningkatan Cadangan Mineral dan Batu Bara yang telah ada
- Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Adapun aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan Kebijakan Peningkatan Cadangan Mineral dan Batu Bara yaitu:
 - Rapat Internal
 - Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan
 - Kunjungan Lapangan

▪ Pelaksanaan

1) Rapat Internal

Melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan. Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas eselon 1 pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lainnya pada isu terkait.

2) Rapat Koordinasi/FGD/WORKSHOP/BIMTEK

Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Rapat Koordinasi dilakukan dengan agenda satu rapat koordinasi menyelesaikan satu permasalahan utama.

3) Kunjungan Lapangan

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pertambangan.

4) Interaksi dan Komunikasi

Dengan komunitas nasional maupun internasional untuk mendapatkan cara terbaik dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan di sektor Pertambangan.

5) Melakukan Penugasan

Kepada institusi yang berkompeten untuk menyediakan, mengkaji dan menganalisis, serta menarik kesimpulan dan merekomendasikan masukan dari data dan informasi baik teknis, administratif ataupun regulasi/kebijakan, sebagai bahan dasar perumusan dan rekomendasi kebijakan [*policy reccomendation*] terkait dengan pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang pertambangan.

▪ Pelaporan

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan untuk Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia yaitu:

- Rapat Internal lintas Unit Kerja
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

D. Metode Pelaksanaan

a. Komponen 051 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia

1) Rapat Internal

- Rapat Internal Lintas Keasdepan

Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan.

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : 30 orang

- Rapat Internal Lintas Kedeputian

Rapat internal Kebijakan Dukungan Transisi Energi dan Mineral Kritis pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Dukungan Transisi Energi dan Mineral Kritis.

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Jumlah Peserta : 30 orang

2) Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.

- Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah Pendefinisian Mineral Kritis

Tempat : Jawa Barat
Waktu : April 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait
Jumlah Peserta : 30 orang

- FGD Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam Pengembangan Mineral Kritis dari Pengamanan Rantai Pasok

Tempat : Jawa Barat
Waktu : September 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait
Jumlah Peserta : 20 orang

3) Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk meninjau lokasi keterdapatn mineral kritis di Indonesia serta mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan.

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan Data Mineral Kritis

Tempat : Bangka Belitung
Waktu : Maret - April 2022
Peserta : Internal Kemenko Marves
Jumlah Peserta : @5 Orang

Alasan : Di Bangka Belitung terdapat banyak bijih Timah dan sisa hasil pengolahan dan pemurnian bijih Timah diperkirakan mengandung mineral kritis.

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan Data Mineral Kritis
Tempat : Sulawesi Selatan
Waktu : September-Oktober 2022
Peserta : Internal Kemenko Marves
Jumlah Peserta : @5 Orang
Alasan : Di Sulawesi Selatan terdapat banyak bijih Nikel dan sisa hasil pengolahan dan pemurnian bijih Nikel diperkirakan mengandung mineral kritis.

b. Komponen 052 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

1) Rapat Internal

- Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan.
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2022
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @30 Orang
- Rapat eksternal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Kementerian dan Lembaga pada isu terkait.
Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2022
Peserta : Lintas Kementerian dan Lembaga
Jumlah Peserta : @30 Orang

2) Rapat Koordinasi/FGD

Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.

- Rapat Koordinasi Peta Jalan (Road Map) perumusan Percepatan Penanggulangan Pencurian dan Penyelundupan SDA Industri Ekstarktif
Tempat : Bogor, Jawa Barat
Waktu : Maret 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @20 Orang
- FGD Hilirisasi Batu Bara
Tempat : Jawa Barat
Waktu : Juli 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah
Jumlah Peserta : @30 Orang
Narasumber : KESDM, Kemenko Ekon, Kemenperin, Kemendag, BPS

- Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Paket Kebijakan Hilirisasi Tembaga & Besi Baja
 - Tempat : D.I. Yogyakarta
 - Waktu : September 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @15 Orang
 - Narasumber : KESDM, Kemenko Ekon, Kemenperin, Kemendag, BPS, BI

3) Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan Data dan kondisi dilapangan terkait penerapan HPM pada Smelter
 - Tempat : Maluku Utara
 - Waktu : Maret - April 2022
 - Peserta : Internal Kemenko Marves
 - Jumlah Peserta : @5 Orang
 - Alasan : Banyak smelter di Maluku Utara

4) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri ke Amerika Serikat bertujuan untuk mengikuti *expert course* penetapan dan pemanfaatan mineral kritis, mineral strategis, dan mineral kritis & strategis serta mengetahui secara langsung kebijakan dari hulu ke hilir, penggunaan teknologi, dan pemanfaatan mineral kritis, mineral strategis, dan mineral kritis & strategis termasuk market-nya.

- Kegiatan menghadiri *expert course* penetapan dan pemanfaatan mineral kritis, mineral strategis, dan mineral kritis & strategis ke Amerika Serikat
 - Tempat : Amerika Serikat
 - Waktu : Juli 2023
 - Peserta : Asisten Deputi Pertambangan
 - Jumlah Peserta : 1 orang

c. Komponen 053 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

1) Rapat Koordinasi/FGD

Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.

- Rapat Koordinasi dengan K/L terkait *kick off meeting* Penyusunan Road Map Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia.
 - Tempat : Jawa Barat
 - Waktu : Februari 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @25 Orang

- Rapat Koordinasi dengan K/L terkait Teknologi Hilirisasi Cadangan Mineral (Emas, Nikel, Baja, Besi, Mangan, dll)
Tempat : Jawa Barat
Waktu : Juni 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @25 Orang

- Rapat Koordinasi dengan K/L terkait pengendalian hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia.
Tempat : D.I. Yogyakarta
Waktu : Oktober 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @15 Orang

2) Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia.

- Kunjungan Kerja (Pengendalian dan pengawasan) Smelter Nikel di Sulawesi Tenggara
Tempat : Morowali, Sulawesi Tengah
Waktu : April 2023
Peserta : dengan K/L terkait
Jumlah Peserta : @10 Orang
Alasan : Smelter nikel mayoritas berada di Sulawesi Tengah

3) Jasa Konsultan

Kajian Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Mineral dan Batubara

- Jumlah : 2
Waktu kontrak : 5 bulan
Alasan : Memberikan dukungan keahlian dalam analisa dan formulasi pelaksanaan kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia.

E. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam												
RO	Rekomendasi Kebijakan Pertambangan												
051	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia												
A	Perencanaan dan Persiapan												
i	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
ii	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves												
B	Pelaksanaan												
i	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, dan Stakeholders terkait												
ii	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja												
iii	Penugasan kepada Jasa Konsultan												
C	Pelaporan												
i	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves												
ii	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait												
052	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
A	Perencanaan dan Persiapan												
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rapat Internal antar Unit Eselon II di Kemenko Marves													
	Rapat Internal antar Unit Eselon 1 di Kemenko Marves													
	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait													
B	Pelaksanaan													
a.	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait													
b.	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja Kegiatan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara													
c.	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan data dan Pengecekan Kondisi Lapangan													
d.	Penugasan kepada Jasa Konsultan													
e.	Kunjungan Luar Negeri													
C	Pelaporan													
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves													
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait													
053	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia													
A.	Perencanaan dan Persiapan													

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	■											
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves		■										
	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait		■	■									
B.	Pelaksanaan												
a.	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait			■	■	■	■	■	■	■	■		
b.	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Peningkatan Cadangan Mineral dan Batubara				■	■	■	■	■	■			
c.	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja				■	■	■	■	■	■			
C.	Pelaporan												
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves										■	■	
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait											■	■

F. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO	Rekomendasi Kebijakan Pertambangan												
052	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia												
a.	Data dan Informasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
b.	Bahan Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
c.	Kertas Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
d.	Rancangan Kebijakan Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
053	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
a.	Data dan Informasi Kebijakan Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
b.	Bahan Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
c.	Kertas Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												

No.	KRO/RO/KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d.	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
054	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia												
a.	Data dan Informasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
b.	Bahan Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
c.	Kertas Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												
d.	Rancangan Kebijakan Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia												

G. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Rekomendasi Kebijakan Pertambangan adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	Anggaran (Rp)
051	Kebijakan Pengembangan Mineral kritis Indonesia	420.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan	105.916.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	50.000.000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	55.916.000
B	Pelaksanaan	210.235.000

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	Anggaran (Rp)
	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, dan Stakeholders terkait	150.235.000
	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja	60.000.000
C	Pelaporan	103.849.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	30.549.000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	73.300.000
052	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	834.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan	181.482.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	40.082.000
	Rapat Internal antar Unit Eselon II di Kemenko Marves	55.400.000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	86.000.000
B	Pelaksanaan	529.700.000
	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait	27.000.000
	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja Kegiatan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	20.000.000
	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan data dan Pengecekan Kondisi Lapangan	165.000.000
	Kunjungan Luar Negeri	267.700.000
	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait	50.000.000
C	Pelaporan	122.818.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	22.818.000

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	Anggaran (Rp)
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	100.000.000
053	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia	846.000.000
A	Perencanaan dan Persiapan	202.126.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	52.126.000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	105.000.000
	Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait	45.000.000
B	Pelaksanaan	479.998.000
	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait	50.000.000
	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Peningkatan Cadangan Mineral dan Batubara	279.998.000
	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja	50.000.000
	Belanja Jasa Konsultan	100.000.000
C	Pelaporan	163.876.000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves	23.876.000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait	140.000.000

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
Rekomendasi Kebijakan Pertambangan

TA 2023

Program : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
 Kegiatan : Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 Klasifikasi Rincian Output : ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
 Volume : 1
 Satuan : Rekomendasi Kebijakan
 Alokasi Anggaran (Rp) : 2.100.000.000

Kode	Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
KRO	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				
RO	Rekomendasi Kebijakan Pertambangan				2,100,000,000
RO	Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia				420,000,000
A	Persiapan dan Perencanaan				105,916,000
521211	Belanja Bahan				
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	500	ORG	22,000	11,000,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	500	ORG	53,000	26,500,000
	Seminar Kit	30	ORG	300,000	9,000,000
	Desain dan Cetak Spanduk	2	PKT	250,000	500,000
	Penggandaan	2	PKT	400,000	800,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	6	OJ	1,000,000	6,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	9	OJ	900,000	8,100,000
524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon I/II	4	ORG	667,000	2,668,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah	56	ORG	433,000	24,248,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor	60	ORG	130,000	7,800,000
	Satuan biaya transportasi	60	ORG	150,000	9,000,000

	Uang Representasi II	4	ORG	75,000	300,000
B	Pelaksanaan				210,235,000
521211	Belanja Bahan				
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	500	ORG	22,000	11,000,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	500	ORG	53,000	26,500,000
	Seminar Kit	30	PKT	300,000	9,000,000
	Desain dan Cetak Spanduk	1	PKT	250,000	250,000
	Penggandaan	1	PKT	850,000	850,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	6	OJ	1,000,000	6,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	18	OJ	900,000	16,200,000
	Honorarium Moderator	2	OJ	700,000	1,400,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,110,000	2,220,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	58	ORG	822,000	47,676,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	60	ORG	150,000	9,000,000
	Uang Harian Dinas Biasa	30	ORG	430,000	12,900,000
	Satuan Biaya Transportasi	60	ORG	300,000	18,000,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
522141	Belanja Sewa				
	Sewa Kendaraan/Transportasi Bangka Belitung	4	UNIT	1,258,000	5,032,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Bangka Belitung				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	5	ORG	2,139,000	10,695,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I	2	ORG	3,827,000	7,654,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II	2	ORG	2,838,000	5,676,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV	4	ORG	1,957,000	7,828,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	2	ORG	622,000	1,244,000

	Uang Taksi D K I Jakarta	10	ORG	256,000	2,560,000
	Uang Taksi Daerah	10	ORG	90,000	900,000
	Uang Harian	15	ORG	410,000	6,150,000
	Uang Representasi I	3	ORG	200,000	600,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
C	Pelaporan				103,849,000
521211	Belanja Bahan				
	ATK	1	PKT	1,000,000	1,000,000
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	180	ORG	22,000	3,960,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	180	ORG	53,000	9,540,000
	Seminar Kit	13	PKT	300,000	3,900,000
	Desain dan Cetak Spanduk	1	PKT	250,000	250,000
	Penggandaan	2	PKT	653,000	1,306,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	1	ORG	1,110,000	
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	19	ORG	822,000	15,618,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	20	ORG	150,000	3,000,000
	Uang Harian Dinas Biasa	20	ORG	430,000	8,600,000
	Satuan Biaya Transportasi	40	ORG	300,000	12,000,000
	Uang Representasi II	2	ORG	150,000	300,000
522141	Belanja Sewa				
	Sewa Kendaraan/Transportasi Sulawesi Selatan	2	UNIT	796,000	1,592,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Sulawesi Selatan				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	5	ORG	3,829,000	19,145,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II	2	ORG	1,938,000	3,876,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV	4	ORG	1,138,000	4,552,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	4	ORG	745,000	2,980,000
	Uang Taksi D K I Jakarta	10	ORG	256,000	2,560,000

	Uang Taksi Daerah	10	ORG	166,000	1,660,000
	Uang Harian	15	ORG	430,000	6,450,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
RO	Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia				834,000,000
A	Persiapan dan Perencanaan				181,482,000
521211	Belanja Bahan				181,482,000
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	400	ORG	22,000	8,800,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	400	ORG	53,000	21,200,000
	Seminar Kit	80	PKT	300,000	24,000,000
	Desain dan Cetak Spanduk	2	PKT	250,000	500,000
	Penggandaan	1	PKT	100,000	100,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	2	OJ	1,000,000	2,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6	OJ	900,000	5,400,000
	Honorarium Moderator	1	OJ	700,000	700,000
524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon I/II	4	ORG	667,000	2,668,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah	76	ORG	433,000	32,908,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor	80	ORG	130,000	10,400,000
	Satuan biaya transportasi	80	ORG	150,000	12,000,000
	Uang Representasi II	4	ORG	75,000	300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,110,000	2,220,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	38	ORG	822,000	31,236,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	40	ORG	150,000	6,000,000
	Uang Harian Dinas Biasa	20	ORG	430,000	8,600,000
	Satuan Biaya Transportasi	40	ORG	300,000	12,000,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000

B	Pelaksanaan				529,700,000
521211	Belanja Bahan				
	ATK	2	PKT	1,000,000	2,000,000
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	400	ORG	22,000	8,800,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	400	ORG	53,000	21,200,000
	Seminar Kit	50	PKT	300,000	15,000,000
	Desain dan Cetak Spanduk	4	PKT	250,000	1,000,000
	Penggandaan	2	PKT	491,000	982,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	0	OJ	1,400,000	0
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	3	OJ	1,000,000	3,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	8	OJ	900,000	7,200,000
	Honorarium Moderator	2	OJ	700,000	1,400,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	4	ORG	1,110,000	4,440,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	56	ORG	822,000	46,032,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	60	ORG	150,000	9,000,000
	Uang Harian Dinas Biasa	30	ORG	430,000	12,900,000
	Satuan Biaya Transportasi	60	ORG	300,000	18,000,000
	Uang Representasi II	6	ORG	150,000	900,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri				
	Amerika Serikat				
	Visa	2	ORG	2,320,000	4,640,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara	2	ORG	56,625,500	113,251,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A/B/C/D	20	ORG	8,304,250	166,085,000
522141	Belanja Sewa				
	Sewa Kendaraan/Transportasi Maluku Utara	8	UNIT	1,061,000	8,488,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Maluku Utara				

	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	5	ORG	6,664,000	33,320,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I	4	ORG	3,440,000	13,760,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II	4	ORG	3,175,000	12,700,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV	4	ORG	1,073,000	4,292,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	8	ORG	600,000	4,800,000
	Uang Taksi D K I Jakarta	10	ORG	256,000	2,560,000
	Uang Taksi Daerah	10	ORG	215,000	2,150,000
	Uang Harian	25	ORG	430,000	10,750,000
	Uang Representasi I	3	ORG	200,000	600,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
C	Pelaporan				122,818,000
521211	Belanja Bahan				
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	350	ORG	22,000	7,700,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	350	ORG	53,000	18,550,000
	Seminar Kit	25	PKT	300,000	7,500,000
	Desain dan Cetak Spanduk	1	PKT	250,000	250,000
	Penggandaan	1	PKT	500,000	500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	D.I.Yogyakarta				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	15	ORG	2,268,000	34,020,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,204,000	2,408,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	28	ORG	750,000	21,000,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	30	ORG	140,000	4,200,000
	Uang Harian Dinas Biasa	15	ORG	420,000	6,300,000
	Uang Taksi D K I Jakarta	30	ORG	256,000	7,680,000
	Uang Taksi Daerah	30	ORG	222,000	6,660,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah	10	ORG	310,000	3,100,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor	10	ORG	100,000	1,000,000
	Uang Transportasi Lokal	10	ORG	150,000	1,500,000

RO	Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia				846,000,000
A	Persiapan dan Perencanaan				202,126,000
521211	Belanja Bahan				
	ATK	1	PKT	1,000,000	1,000,000
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	22,000	16,500,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	53,000	39,750,000
	Seminar Kit	25	PKT	300,000	7,500,000
	Penggandaan	5	PKT	1,000,000	5,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	30	OJ	1,000,000	30,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	30	OJ	900,000	27,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,110,000	2,220,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	48	ORG	822,000	39,456,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	50	ORG	150,000	7,500,000
	Uang Harian Dinas Biasa	25	ORG	430,000	10,750,000
	Satuan Biaya Transportasi	50	ORG	300,000	15,000,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
B	Pelaksanaan				479,998,000
521211	Belanja Bahan				
	ATK	1	PKT	1,000,000	1,000,000
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	22,000	16,500,000
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	53,000	39,750,000
	Seminar Kit	25	PKT	300,000	7,500,000
	Desain dan Cetak Spanduk	4	PKT	250,000	1,000,000
	Penggandaan	10	PKT	1,000,000	10,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I)	30	OJ	1,400,000	42,000,000

	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	30	OJ	1,000,000	30,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	30	OJ	900,000	27,000,000
	Honorarium Moderator	2	OJ	700,000	1,400,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Jawa Barat				
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,110,000	2,220,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	48	ORG	822,000	39,456,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	50	ORG	150,000	7,500,000
	Uang Harian Dinas Biasa	25	ORG	430,000	10,750,000
	Satuan Biaya Transportasi	50	ORG	300,000	15,000,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
522141	Belanja Sewa				
	Sewa Kendaraan/Transportasi Sulawesi Tengah	12	UNIT	824,000	9,888,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Sulawesi Tengah				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	10	ORG	5,113,000	51,130,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I	3	ORG	2,309,000	6,927,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II	9	ORG	2,027,000	18,243,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV	6	ORG	1,567,000	9,402,000
	Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	12	ORG	951,000	11,412,000
	Uang Taksi D K I Jakarta	20	ORG	256,000	5,120,000
	Uang Taksi Daerah	20	ORG	165,000	3,300,000
	Uang Harian	30	ORG	370,000	11,100,000
	Uang Representasi I	3	ORG	200,000	600,000
	Uang Representasi II	9	ORG	150,000	1,350,000
522131	Belanja Jasa Konsultan				
	Kajian Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Mineral dan Batubara	2	PKT	50,000,000	100,000,000
C	Pelaporan				163,876,000
521211	Belanja Bahan				
	Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	22,000	16,500,000

	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA	750	ORG	53,000	39,750,000
	Seminar Kit	25	PKT	300,000	7,500,000
	Desain dan Cetak Spanduk	1	PKT	250,000	250,000
	Penggandaan	2	PKT	1,029,000	2,058,000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	5	OJ	1,000,000	5,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	5	OJ	900,000	4,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	D.I.Yogyakarta				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi	15	ORG	2,268,000	34,020,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II	2	ORG	1,204,000	2,408,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah	28	ORG	750,000	21,000,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor	30	ORG	140,000	4,200,000
	Uang Harian Dinas Biasa	15	ORG	420,000	6,300,000
	Uang Taksi D K I Jakarta	30	ORG	256,000	7,680,000
	Uang Taksi Daerah	30	ORG	222,000	6,660,000
	Uang Representasi II	3	ORG	150,000	450,000
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah	10	ORG	310,000	3,100,000
	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor	10	ORG	100,000	1,000,000
	Uang Transportasi Lokal	10	ORG	150,000	1,500,000

Jakarta, 22 Agustus 2022
Penanggung Jawab Kegiatan



Tubagus Nugraha
NIP 197208181999031009



UNIT KERJA

SEKRETARIAT DEPUTI



KERANGKA ACUAN KERJA
LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
2023

Kementerian	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	1. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 2. Persentase ketaatan pelaporan lingkup deputi
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	:	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Program	:	Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terlaksananya Layanan Manajemen Internal
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Output Program	:	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Indikator Output Program	:	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	:	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal
Rincian Output	:	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Dokumen Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Volume Rincian Output	:	18
Satuan Rincian Output	:	Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Anggaran 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dan penelaahan rencana kerja Kementerian/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan.

2. Gambaran Umum (Penanganan Isu yang ditangani)

Dalam rangka membangun ekonomi yang tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian

Peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (FDI).

Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan layanan kesekretariatan, salah satunya adalah dukungan/ fasilitasi layanan pemantauan dan evaluasi yang meliputi kegiatan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja, pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi. Adapun masalah yang ingin diselesaikan dalam layanan pemantauan dan evaluasi pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan antara lain: pertama, jumlah sumber daya manusia (SDM) baik itu pejabat dan staf yang masih belum optimal dan terdapat jabatan strategis yang masih kosong; kedua, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam pencapaian kinerja yang juga merupakan indikator outcome dari Kementerian/Lembaga lain dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang turut berpengaruh pada kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya.

Kondisi saat ini pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan khususnya di bagian program layanan pemantauan dan evaluasi adalah memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, dan memaksimalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang sudah disusun melalui daring.

Kondisi yang ingin dicapai dalam layanan pemantauan dan evaluasi adalah terlaksananya review dan evaluasi terhadap Laporan Pengelolaan Kinerja dan Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, fokus pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang merupakan bagian dari target kinerja pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sehingga dapat terlaksananya koordinasi program dan anggaran yang optimal dan efektif.

Adapun kegiatan pada layanan pemantauan dan evaluasi di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan antara lain, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pengisian SIK-M (Sistem Informasi Kinerja-Maritim), Evaluasi SIK-M (Sistem Informasi Kinerja-Maritim), Pemantauan/PCM/Penugasan, Pengisian e-Monev, Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Koordinasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Eselon II, Penyusunan LKj (Laporan Kinerja), Evaluasi Program Prioritas dan Quick Wins, Persiapan Rapat Kerja untuk Penyusunan Laporan

Kegiatan.

2.1 Permasalahan yang ingin diselesaikan dan kondisi yang diharapkan di tahun 2023

- a. Pemantauan program dan kegiatan yang terintegrasi dan terpadu
- b. Penajaman indikator kinerja individu yang cascading dengan indikator unit kerja

2.2 Dampak yang akan dirasakan oleh *stakeholder* (K/L terkait)

- a. Tata kelola organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang baik
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terlaksana dengan baik hingga level individu.
- c. Data dan Informasi terkait pengukuran program dan kegiatan yang dimanfaatkan dalam perbaikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Kebijakan Layanan Pemantauan dan Evaluasi adalah:

- 1) Penerima Manfaat (K/L dibawah koordinasi yang akan melaksanakan kebijakan) antara lain:
 - § Kementerian Keuangan
 - § Kementerian PPN/Bappenas
- 2) Penerima Manfaat Lain (Pemda/Intansi/Pihak Swasta/Masyarakat) antara lain
 - § Pelaku Usaha
 - § Stake Holder di bidang Kemaritiman dan Investasi
 - § Masyarakat
- 3) Penerima Manfaat Internal Kemenko Marves antara lain:
 - § Sekretariat Kemenkterian Koordinator Kemaritiman dan Investasi
 - § Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - § Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - § Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

- **Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan implementasi dari Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembahasan, penyusunan, cetak dan perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Keluaran Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah 1 (satu) dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

§ Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Periodik

Tempat : Bogor
Waktu : Januari 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Kemenpan RB

- **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja**

Rapat koordinasi akan dilaksanakan pada pembahasan evaluasi kinerja sektor investasi dan pertambangan bersama BAPPENAS, BKPM, Kementerian Keuangan dan ESDM, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain itu terdapat pula rapat koordinasi terkait data dan informasi investasi bersama stakeholder K/L teknis, Asosiasi dan Badan Usaha. Kegiatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja antara lain evaluasi kinerja triwulan, bimbingan teknis SIK-M, Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Deputi.

§ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

Tempat : Bogor
Waktu : Maret, Juni, September, Desember 2023
Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan, BAPPENAS, ESDM
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Investasi/BKPM

- **Penyusunan Laporan Kinerja**

Setiap entitas kinerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan/atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Evaluasi Triwulan dan Tahunan, Pemantauan Kegiatan Deputi, Penyusunan Laporan Kinerja.

§ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja

Tempat : Bogor

Waktu : Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember

2023 Peserta : Deputi 6, Kementerian PAN dan RB

Jumlah Peserta : @20 Orang

Narasumber : Kementerian PAN dan RB

- **Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins**

Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins dilaksanakan pada triwulan II dan IV. Dilaksanakan dengan K/L terkait yaitu BAPPENAS dan Kemen ESDM.

§ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins

Tempat : Bogor

Waktu : Mei dan Oktober 2023

Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan, BAPPENAS, ESDM

Jumlah Peserta : @20 Orang

Narasumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- **Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev**

Kunjungan lapangan akan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data terkait kondisi kemudahan berusaha di Indonesia serta hambatan – hambatan investasi dan KPBU di daerah sebagai indikator utama dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Kunjungan lapangan meliputi lokus Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan.

§ Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev Investasi

Tempat : Jawa Tengah
Waktu : April dan Juli 2023
Peserta : Deputi 6, BAPPENAS, Kementerian Investasi/BKPM,
Kementerian Pariwisata, Pemda
Jumlah Peserta : @5 Orang
Alasan Lokasi : Pemulihan Investasi Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19

§ Kunjungan lapangan dalam rangka Pemantuan Investasi Tol Jawa

Tempat : Jawa Tengah
Waktu : Setiap Bulan Tahun 2023
Peserta : Deputi 6, PUPR, ATR/BPN, Pemda
Jumlah Peserta : @4 Orang
Alasan Lokasi : Pemantauan Investasi Tol Jawa Magelang - Bawen

2. Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

• **Penyusunan Laporan Kegiatan**

Rapat penyusunan laporan kegiatan dilaksanakan pada setiap bulan dalam satu tahun. Tujuannya untuk memberikan gambaran bagaimana progress kegiatan yang mendukung capaian kinerja telah tercapai. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan, Laporan Kegiatan Tahunan.

§ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan

Tempat : Bogor
Waktu : Setiap Bulan Tahun 2023
Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian ESDM

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal										
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi												
051	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
A	Penyusunan Perjanjian Kinerja												
i	Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Periodik												
B	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja												
i	Rapat Pemantauan dan Evaluasi												
C	Penyusunan Laporan Kinerja												
i	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja												
D	Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins												
i	Rapat Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins												

E	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev Investasi												
i	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev												
ii	Kunjungan Lapangan dalam rangka Pemantauan Investasi Tol Jawa												
052	Laporan Pengelolaan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
A	Penyusunan Laporan Kegiatan												
i	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan												

E. Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
051	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan				
A	Penyusunan Perjanjian Kinerja				
i	Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Periodik				
B	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja				
i	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja				
C	Penyusunan Laporan Kinerja				
i	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan				

	Laporan Kinerja				
D	Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins				
i	Rapat Koordinasi Pemantauan Program Prioritas dan Quickwins				
F	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev Investasi				
i	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev				
ii	Kunjungan Lapangan dalam rangka Pemantauan Investasi Tol Jawa				
052	Laporan Pengelolaan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan				
B	Penyusunan Laporan Kegiatan				
i	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan				

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi adalah sebesar Rp. 880.000.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	KRO/RO/KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
058	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	
A	Pengelolaan Kinerja Periodik	660.000.000,-
064	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	
A	Pengelolaan Laporan Kegiatan Periodik	220.000.000,-

Jakarta, 19 Oktober 2022

Penanggung Jawab Kegiatan



Rifky Setiawan, M.H

NIP. 197010042002121002



**KERANGKA ACUAN KERJA RO (RINCIAN OUTPUT)
LAYANAN UMUM SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

Kementerian	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Unit Eselon I	: Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	: Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terlaksananya Layanan Manajemen Internal
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Output Program	: Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Indikator Output Program	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kegiatan	: Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sasaran Kegiatan	: Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Klasifikasi Rincian Output	: EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	: 962 Layanan Umum
Indikator Rincian Output	: Jumlah Layanan Umum Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Volume Rincian Output	: 1 (Satu)
Satuan Rincian Output	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan DIPA
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
- i. Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1326)
- j. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)
- k. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- l. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

- m. Peraturan Menko Kemaritiman Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dan penelaahan rencana kerja Kementerian/lembaga
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka membangun ekonomi yang tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Melalui Program Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi yang fokus untuk mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (FDI).

Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan layanan kesekretariatan, salah satunya adalah dukungan/ fasilitasi layanan administrasi umum yang meliputi kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, sehingga capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, terukur dan terdokumentasikan dengan baik.

Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Deputy mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Peran tugas dan fungsi pemberian layanan administrasi umum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy sangatlah penting, karena layanan administrasi umum yang baik dan tertib akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi unit kerja.

Pada tahun 2023 kegiatan layanan umum mencakup pelayanan administrasi rutin seperti persuratan, ketatausahaan, dan arsip. Selain itu juga layanan umum ini mencakup pengelolaan kepegawaian dan mendukung pengembangan pegawai. Dalam pengelolaan kearsipan perlu dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan sehingga dapat terhindar dari kesulitan dan kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah yang mungkin timbul di kelak kemudian hari. Maka diperlukan pekerjaan swakelola Penataan arsip di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

- 2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan
 - a. Tata Kelola organisasi yang baik.
 - b. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 90.
 - c. Pelaksanaan administrasi yang tertib dan akuntabel.
- 2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder
 - a. Kenyamanan dan keamanan bekerja.
 - b. Dukungan prima terhadap sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 - c. Membangun SDM Aparatur yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rincian Ouput (RO) Layanan Umum adalah:

- a. Unit Kerja lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yaitu:
 - Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

- Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Administrasi Umum Perkantoran

a. Rapat Koordinasi Internal

Pelaksanaan rapat internal dilaksanakan guna mempersiapkan langkah – langkah teknis yang akan dilakukan. Rapat akan mengundang Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Ketatausahaan akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

Tempat : Gedung BPPT I
 Waktu : Januari 2023
 Peserta : Internal Deputy 6
 Jumlah Peserta : @30 Orang

b. Rapat Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Administrasi Umum Perkantoran

Dalam hal pengarsipan dan persuratan, akan dilakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi tentang teknis surat menyurat. Selain itu, agar tertatanya fisik dan informasi arsip sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan sehingga pemeliharaan arsip dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sistematis, maka diperlukan tenaga Konsultan untuk penataan arsip agar terjaminnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Adapun detail kegiatan sebagai berikut:

Tempat : DKI Jakarta
 Waktu : Maret, Juni, September, Desember 2023
 Peserta : Deputy 6, ANRI
 Jumlah Peserta : @40 Orang
 Narasumber : ANRI

2. Pengelolaan Kepegawaian

a. Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan BKN, Kemenpan RB serta Instansi Pembina.

Dilakukan monitoring dan evaluasi pegawai setiap triwulan dalam rangka pengelolaan pegawai yang berkinerja dan disiplin. Adapun detail kegiatan sebagai berikut:

Tempat : DKI Jakarta
 Waktu : Mei 2023
 Peserta : Deputy 6, BKN, Kemenpan RB, dan Instansi Pembina
 Jumlah Peserta : @20 Orang
 Narasumber : BKN, Kemenpan RB

c. Rapat Evaluasi Pegawai.

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : April, Agustus, Desember 2023
Peserta : Deputi 6, BKN, Kemenpan RB, dan Instansi Pembina
Jumlah Peserta : @40 Orang
Narasumber : BKN, Kemenpan RB

d. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kepegawaian dan SKP berbasis Indikator Kinerja Workshop yang akan dilaksanakan antara lain workshop upgrading bagi pegawai di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang akan bekerjasama dengan Pihak ketiga untuk penyelenggaraan tersebut.

Tempat : Jawa Barat
Waktu : April, Agustus 2023
Peserta : Deputi 6
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : BKN, Kemenpan RB

3. Belanja Keperluan Perkantoran

memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pegawai, maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan

- Langganan Koran dan Majalah = 1 PKT x 12 Bulan
- Cetak Kalender = 120 PKT x 1 Kali
- Cetak Map Kedeputian = 500 PKT x 2 Kali

4. Dukungan Layanan Pimpinan

a. Perjalanan Dinas Biasa Pimpinan (Eselon I dan II) Kunjungan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan lapangan akan dilaksanakan oleh pimpinan kami dalam rangka pengumpulan data kemudahan dan hambatan apa saja dalam berinvestasi di Indonesia Kunjungan lapangan meliputi lokasi Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

Tempat : Jawa Timur
Waktu : April, Oktober 2023
Peserta : Deputi 6
Jumlah Peserta : @3 Orang
Alasan Lokasi : PSN Tol Probo- Wangi, SPAM Juanda

b. Rapat Koordinasi Pimpinan.

Rapat Pimpinan akan dilaksanakan oleh pimpinan kami dalam rangka penyelesaian masalah atas hambatan dalam berinvestasi di Indonesia.

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Maret, September 2023
Peserta : Deputi 6
Jumlah Peserta : @40 Orang

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
RO	Layanan Umum												
067	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
A.	Pengelolaan Ketatausahaan												
I.	Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Administrasi Umum Perkantoran												
	Operasional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Rapat Pengelola Arsip			■			■			■			■
	Jasa Konsultan			■	■	■							
II.	Pengelolaan Kepegawaian												
	Koordinasi Kepegawaian dengan BKN, Kemenpan RB serta Instansi Pembina					■							
	Rapat Evaluasi Pegawai				■				■				■
III.	Dukungan Layanan Pimpinan												
	Rapat Pimpinan			■						■			
	Koordinasi dan Fasilitasi Kepegawaian				■				■				

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Kode	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Layanan Umum				
A	Pengelolaan Ketatausahaan				
	Laporan Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Administrasi Umum Perkantoran	■	■	■	■
	Laporan Pengelolaan Kepegawaian	■	■	■	■
	Laporan Dukungan Layanan Pimpinan	■	■	■	■

F. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan adalah sebesar Rp500.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Kode RO	Rincian Output/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)
	Layanan Umum	Rp500.000.000
067.	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp500.000.000
A	Pengelolaan Ketatausahaan	Rp500.000.000
	Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Administrasi Umum Perkantoran	Rp 120.600.000
	Pengelolaan Kepegawaian	Rp170.592.000
	Dukungan Layanan Pimpinan	Rp207.808.000

Jakarta, 19 Oktober 2022
Penanggung Jawab Kegiatan



Rifky Setiawan, M.H

NIP. 197010042002121002



**KERANGKA ACUAN KERJA RO (RINCIAN OUTPUT)
LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

Kementerian	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Unit Eselon I	: Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	: Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terlaksananya Layanan Manajemen Internal
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Output Program	: Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Indikator Output Program	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kegiatan	: Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sasaran Kegiatan	: Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Klasifikasi Rincian Output	: EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	: 960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Indikator Rincian Output	: Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Volume Rincian Output	: 1 (Satu)
Satuan Rincian Output	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan DIPA
- g. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

2. Gambaran Umum

Dalam rangka membangun ekonomi yang tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Melalui Program Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi yang fokus untuk mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (FDI).

Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan layanan kesekretariatan, salah satunya adalah dukungan/ fasilitasi layanan administrasi umum yang meliputi kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh para Asisten Deputi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, sehingga capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, terukur dan terdokumentasikan dengan baik.

Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Deputi mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Peran tugas dan fungsi pemberian layanan administrasi umum didalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sangatlah penting, karena layanan administrasi umum yang baik dan tertib akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi unit kerja begitu juga sebaliknya.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia aparatur. Sesuai dengan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

- 2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan
 - a. Menyempurnakan perubahan 8 (delapan) area perubahan lingkup Deputi bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
 - b. Nilai PMPRB mencapai 90.
 - c. Mencetak Pegawai unggul yang berkompeten.
 - d. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- 2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder.
 - a. Membangun SDM Aparatus yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
 - b. Lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c. Semangat dan etos kerja yang tinggi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rincian Ouput (RO) Laporan Kegiatan adalah:

- a. Unit Kerja lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yaitu:
 - Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

- Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dibagi menjadi 1 (satu) komponen Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi sebagai berikut :

1. Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

a. Rapat Internal

Rapat Internal Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2022

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : @30 Orang

b. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Zona Integritas

Tempat : Jawa Barat

Waktu : Februari 2022

Peserta : Deputi 6, Kementerian PAN dan RB

Jumlah Peserta : 25 Orang

2. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani

a. Rapat Koordinasi Workshop ZI, WBK, WBBM dan Anti Korupsi

Sebagai upaya penancangan dan aktualisasi Gerakan anti Korupsi, diperlukan suatu giat nyata dalam pembentukan karakter dan penambahan wawasan tentang kiat-kiat membangun lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas korupsi. Adapun kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat.

Tempat : Jawa Barat

Waktu : Februari 2022

Peserta : Deputi 6, Kementerian PAN dan RB

Jumlah Peserta : 25 Orang

b. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan guna mempersiapkan langkah – langkah teknis yang akan dilakukan dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi. Rapat ini akan turut

mengundang Biro Hukum, khususnya di Bagian Tata Laksana dan Organisasi selaku pembina Reformasi Birokrasi di Kemenko MARVES.

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Januari 2022
Peserta : Deputi 6, Kemenpan RB
Jumlah Peserta : 25 Orang

c. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RB

Rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodic untuk memantau progress capaian RB yang telah dilaksanakan. Adapun rapat tersebut akan dihadiri oleh Kementerian PAN-RB dan Biro Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tempat : Jawa Barat
Waktu : April, Juni, Oktober, Desember 2022
Peserta : Deputi 6, Kemenpan RB
Jumlah Peserta : 30 Orang

3. *Agent of Change* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

a. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan Rencana Kerja AoC.

Reformasi birokrasi menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa waktu belakangan, sehingga perlu adanya rencana kerja terstruktur untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien serta perbaikan-perbaikan dari kebiasaan lama yang acapkali dianggap kurang baik oleh masyarakat. Maka dimunculkanlah sosok *Agent of Change* dengan harapan akan membawa birokrasi yang ada menuju kearah yang lebih baik. Adapun kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Januari 2022
Peserta : Deputi 6, Kemenpan RB
Jumlah Peserta : 25 Orang

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal										
RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal												
058	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
A.	Pengelolaan Reformasi Birokrasi												
I	Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas												
a.	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
b.	Pembentukan Tim Zona Integritas												
II	Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani												
a.	Workshop ZI, WBK, WBBM dan Anti Korupsi												
b.	Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi												
c.	Monitoring dan Evaluasi RB												
III	<i>Agent of Change</i>												
a.	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan Rencana Kerja AoC												

E. Waktu Pencapaian Keluaran


Kode	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
A.	Pengelolaan Reformasi Birokrasi				
	Laporan Pengelolaan Reformasi Birokrasi				

F. Biaya Yang Diperlukan


Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan adalah sebesar Rp.380.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Kode RO	Rincian Output/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp380.000.000
058.	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp380.000.000
A	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Rp380.000.000
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Rp190.600.000
	Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani	Rp120.300.000
	<i>Agent of Change</i> Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp69.100.000

Jakarta, 19 Oktober 2022
Penanggung Jawab Kegiatan



Rifky Setiawan, M.H
NIP. 197010042002121002



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEBIJAKAN LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Kementerian	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: 1. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 2. Persentase ketaatan pelaporan lingkup deputyUnit
Eselon I	: Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	: Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan
PertambanganProgram	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terlaksananya Layanan Manajemen Internal
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
InvestasiOutput Program	: Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Indikator Output Program	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kegiatan	: Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator BidangKemaritiman dan Investasi
Sasaran Kegiatan	: Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Klasifikasi Rincian Output KRO	: EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Indikator
Rincian Output	: Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator Rincian Output	: 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Volume Rincian Output	: Jumlah Dokumen Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Satuan Rincian Output	: 4 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Anggaran 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
- g. Peraturan Menko Kemaritiman Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dan penelaahan rencana kerja Kementerian/Lembaga;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan.

2. Gambaran Umum (Penanganan Isu yang ditangani)

Dalam rangka membangun ekonomi yang tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Melalui Program Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi yang fokus untuk mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (FDI).

Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan layanan kesekretariatan, salah satunya adalah dukungan/ fasilitasi layanan perencanaan dan penganggaran yang meliputi kegiatan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta dukungan administrasi penyusunan peraturan perundangundangan dan kerja sama. Adapun masalah yang ingin diselesaikan antara lain sumber daya manusia (SDM) yang memadai dengan memberikan pelatihan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti bimbingan teknis, dan pelatihan lainnya yang menunjang. Tujuannya, agar setiap perencanaan dan penganggaran dapat disusun dengan baik, dan terukur.

Kondisi saat ini pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan khususnya pada layanan perencanaan dan penganggaran di bagian program adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih dalam tahap diberikan bimbingan teknis terkait kegiatan- kegiatan yang mendukung seperti penyusunan RKA K/L secara berkala, adanya perubahan peraturan mengenai anggaran, dan perubahan atau pergeseran anggaran.

Adapun kegiatan pada layanan perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan antara lain, Penyusunan Rencana Kerja, Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan IKU dengan K/L dan BAPPENAS, Penelaahan Rencana Kerja, Reviu Renstra, Penelaahan Renstra Eselon II, Bimbingan Teknis RKA K/L, Penyusunan RKA K/L, dan Revisi Anggaran. Kondisi yang ingin dicapai dalam layanan perencanaan dan anggaran adalah tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, terukur, dan terencana dengan baik.

2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan dan kondisi yang diharapkan di tahun 2023

- a. Perencanaan Jangka Menengah yang perlu ada perbaikan sesuai dengan SOTK baru (penyederhanaan birokrasi) yang telah disahkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

- b. Persiapan pada penyusunan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang pada bidang investasi dan pertambangan
- c. Perencanaan penganggaran yang proporsional dengan rencana pembangunan nasional

2.2. Dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder (K/L terkait)

- a. Tata kelola organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang baik
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terlaksana dengan baik hingga level individu.
- c. Perencanaan yang harmonis dan saling mendukung dalam pembangunan nasional di Indonesia

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Kebijakan Layanan Perencanaan dan Penganggaran adalah:

- 1) Penerima Manfaat (K/L dibawah koordinasi yang akan melaksanakan kebijakan) antara lain:
 - § Kementerian Keuangan
 - § Kementerian PPN/Bappenas
- 2) Penerima Manfaat Lain (Pemda/Intansi/Pihak Swasta/Masyarakat) antara lain
 - § Pelaku Usaha
 - § Stake Holder di bidang Kemaritiman dan Investasi
 - § Masyarakat
- 3) Penerima Manfaat Internal Kemenko Marves antara lain:
 - § Sekretariat Kemenkterian Koordinator Kemaritiman dan Investasi
 - § Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - § Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - § Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- **Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 merupakan bagian dan sinergitas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Renstra pada dasarnya masih bersifat umum

berupa garis- garis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing unit di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis 2023

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Januari 2023
Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan, Bappenas, Kemenpan RB
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Bappenas, BKPM, Kemenpan RB, ESDM

• **Rencana Kerja TA 2024**

Rencana Kerja TA 2024 merupakan penjabaran tahunan atas rencana jangka menengah pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Rencana kerja ini diselaraskan dengan target pembangunan KL terkait. Output rangkaian kegiatan ini berupa dokumen rencana kerja TA 2024.

- Rapat Penyusunan Rencana Kerja TA 2024

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Maret 2023
Peserta : Internal Deputi 6
Jumlah Peserta : @20 Orang

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan IKU dengan K/L dan Bappenas TA 2024

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Mei dan Juni 2023
Peserta : Deputi 6, K/L terkait, Bappenas
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Bappenas, BKPM, Kemen ESDM, Kemenkeu DJA

• **RKAKL TA 2024**

Penyusunan RKAKL pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilaksanakan pada semester II tahun 2022. Penyusunan RKA-K/L terdapat tiga tahapan yaitu

pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran. Kegiatan dari RKA-K/L berupa, penelitian RKAKL dan penelaahan RKAKL di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RKAKL 2023

Tempat : Bogor
Waktu : Juni, Agustus, September 2023
Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan, BKPM, Kemen ESDM, Kemenkeu
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Bappenas, Kemenkeu DJA

- Rapat Penyusunan KAK 2023

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Desember 2023
Peserta : Internal Sekretariat Deputi 6
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Bappenas, Kemenkeu DJA

• **Revisi RKAKL TA 2023**

Revisi dilaksanakan karena rencana anggaran yang telah tertuang dalam dokumen RKA-K/L, DIPA, atau POK menjadi tidak sama dengan yang akan dilaksanakan (pelaksanaan anggaran). Revisi RKAKL pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilaksanakan atas alasan/pertimbangan adanya perubahan kebijakan atau penugasan baru, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Revisi Anggaran 2023

Tempat : Bogor
Waktu : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember 2023
Peserta : Deputi 6, Biro Perencanaan, BKPM, Kemen ESDM, Kemenkeu
Jumlah Peserta : @20 Orang
Narasumber : Bappenas, Kemenkeu DJA

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULA NI			TRIWULA NII			TRIWULA NIII			TRIWULA NIV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												
051	Layanan Perencanaan dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
A	Rencana Strategis												
i	Reviu Renstra												
B	Rencana Kerja TA 2024												
i	Penyusunan Rencana Kerja TA 2024												
ii	Koordinasi Rencana Kerja dan IKU dengan K/L dan Bappenas TA 2024												
C	RKAKL TA 2024												
i	Penyusunan RKAKL 2023												
ii	Penyusunan KAK 2023												
D	Revisi RKAKL TA 2023												
i	Revisi Anggaran 2023												

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Kode	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I	TRIWULA N II	TRIWULA N III	TRIWULAN IV
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
051	Layanan Perencanaan dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan				
A	Rencana Strategis				
i	Reviu Renstra				
B	Rencana Kerja TA 2024				

i	Penyusunan Rencana Kerja TA 2024				
iii	Koordinasi Rencana Kerja dan IKU dengan K/L dan Bappenas TA 2024				
C	RKAKL TA 2024				
i	Penyusunan RKAKL 2023				
ii	Penyusunan KAK 2023				
D	Revisi RKAKL TA 2023				
i	Revisi Anggaran 2023				

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran adalah sebesar Rp 440.000.000,- (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	Anggaran (Rp)
051	Perencanaan dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	440,000,000,-
A	Rencana Strategis	100,000,000,-
B	Rencana Kerja TA 2024	160,000,000,-
C	RKAKL TA 2024	100,000,000,-
D	Revisi RKAKL TA 2023	80,000,000,-

Jakarta, 19 Oktober 2022
 Penanggung Jawab Kegiatan


Rifky Setiawan, M.H
 NIP.197010042002121002

KERANGKA ACUAN KERJA
REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: 1. PDB Maritim 2. Indeks Daya Saing Global (IDSG)
Unit Eselon I	: Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Unit Eselon II	: Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Program	: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Sasaran Program	: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Program	: Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Output Program	: Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Indikator Output Program	: Jumlah Rekomendasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kegiatan	: Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan
Sasaran Kegiatan	: Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan
Klasifikasi Rincian Output	: 6008.ABB.Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Indikator KRO	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Investasi dan Perdagangan
Rincian Output	: 6008.ABB.005 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan
Indikator Rincian Output	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan
Volume Rincian Output	: 3 Dokumen
Satuan Rincian Output	: Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang tentang Hubungan Luar Negeri;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Anggaran 2007 tentang Penanaman Modal;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
- i. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 885 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 556/M-DAG/Kep/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka memperkuat ekonomi yang tumbuh lebih berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Melalui program pengembangan kebijakan kemaritiman dan investasi yang fokus untuk mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, serta pembangunan dan pembenahan iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (FDI).

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada investasi Indonesia, antara lain: (1) dinamika politik dan perdangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan; (2) persaingan regional Kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja; (3) tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Sebagaimana arah pembangunan yang digariskan oleh RPJMN Tahun 2020-2024 Pembangunan Ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pertumbuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: (1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan;
(3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam mengawal target pembangunan ini Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan melaksanakan strategi kebijakan terkait koordinasi dan sinkronisasi kerja sama investasi baik di dalam dan luar negeri. Strategi ini dipilih untuk percepatan promosi dan kerja sama investasi yang prioritas, pengamanan perdagangan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif, serta mengurai dan membenahi kembali pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) Kemaritiman untuk menggali potensi ekonomi kemaritiman Indonesia.

2.1. Permasalahan yang Ingin Diselesaikan dan Kondisi yang Diharapkan di Tahun 2023

- a. Sengketa/Permasalahan (dispute) Investasi dan Perdagangan di forum World Trade Organization (WTO) diantaranya DS592: Indonesia-Raw Materials “Penyusunan *Interim Report to The Parties*”
- b. Rencana gugatan RI terhadap Uni Eropa atas pengenaan (Countervailing Duty (CVD) produk Stainless Steel asal Indonesia
- c. Masukan kebijakan terhadap Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait rekomendasi KADI dan KPPI.
- d. Perbaikan citra dan kebijakan promosi investasi dengan melakukan pendekatan langsung baik kepada Pelaku Usaha Asing maupun Pemerintah Negara Lain.
- e. Penguatan konsep, definisi, klasifikasi, Cakupan, serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Bidang Kemaritiman

2.2. Dampak yang Akan Dirasakan oleh Stakeholder

- a. Peningkatan daya saing usaha di Indonesia dengan terhindarnya dari perdagangan curang (*unfair trade*) yang pada akhirnya mendorong perbaikan neraca transaksi berjalan Indonesia

- b. Peningkatan nilai Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia dengan mendorong investor internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- c. Terwujudnya satu data ekonomi Kemaritiman Indonesia yang terintegrasi yang nantinya dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi maritim Indonesia

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan adalah:

1) Penerima Manfaat (K/L di bawah Koordinasi yang akan melaksanakan kebijakan) antara lain:

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Kementerian Investasi
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian

2) Penerima Manfaat lain (Pemda/Instansi/Pihak Swasta/Masyarakat) antara lain:

- Pemerintah Daerah
- Masyarakat
- Badan Usaha
- Pelaku Usaha
- Perwakilan Negara Sahabat
- *Stakeholder* di bidang Kemaritiman dan Investasi

3) Penerima Manfaat Internal Kemenko Marves antara lain:

- Sekretariat Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi
- Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

3) Strategi Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen kegiatan sebagai berikut:

051 Rekomendasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan

Pencapaian keluaran Rincian Output (RO) Kebijakan Penyelesaian Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Persiapan (*Agenda setting*)

Dilakukan melalui beberapa kegiatan pemetaan permasalahan, studi kasus, konfirmasi, koordinasi dan identifikasi data informasi. Kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat internal, rapat koordinasi, rapat teknis

- Rapat internal yang melibatkan unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sesuai dengan isu permasalahan yang sedang dihadapi. Rapat difokuskan pada pembahasan isu, permasalahan dan pembagian tugas dan fungsi dalam penyelesaian permasalahan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2023

Peserta : Internal Deputi 6

Jumlah Peserta : @ 50 Orang

Melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing keasdepan. Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas eselon 1 pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lainnya pada isu terkait

- Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Eselon I maupun Eselon II dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada isu terkait.

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2023

Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jumlah Peserta : @ 50 Orang

- Rapat Koordinasi/FGD/Rapat Teknis

Dengan melibatkan instansi/Kementerian/Lembaga/BUMN/Perusahaan yang terkait, Rapat Koordinasi/FGD/Rapat Teknis dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari instansi/Kementerian/Lembaga/BUMN/Perusahaan terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga terkait

Jumlah Peserta : @ 50 Orang

Narasumber : Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Ahli/Pakar

- Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Sengketa (DS592) Indonesia-Raw Materials.

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga terkait

Jumlah Peserta : @ 50 Orang

Narasumber : Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenko Perekonomian dan Ahli/Pakar

- Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Sengketa DS592: Indonesia-Raw Materials “Persiapan Banding terhadap Putusan Panel”

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga terkait

Jumlah Peserta : @ 50 Orang

Narasumber : Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Ahli/Pakar

- Pembentukan Tim Kelompok Kerja Koordinasi Penanganan Sengketa / Permasalahan Investasi dan Perdagangan

Tim Koordinasi Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertugas dalam mengawal, memberikan masukan, rekomendasi dan penyelesaian sengketa/permasalahan bidang investasi, perdagangan, perdagangan internasional, *dispute settlement*, *trade remedies*, *unfair trade*, *economic fraud* dan tugas serta arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lainnya.

Tim Kelompok Kerja terdiri dari:

- 1 orang pengarah
- 2 orang penanggung jawab kegiatan
- 1 orang ketua
- 2 orang wakil ketua
- 1 orang sekretaris
- 15 orang anggota

2. Pelaksanaan (Koordinasi dan Formulasi Kebijakan)

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan baik barang maupun jasa:

Dilaksanakan melalui rapat pembahasan, rapat koordinasi, kunjungan lapangan, penyusunan rekomendasi/Surat Menteri.

- b. Penyelesaian Sengketa Dagang (*Dispute Settlement*) di WTO:

Dilaksanakan melalui rapat pembahasan, rapat tim teknis, rapat koordinasi, kunjungan lapangan, pendekatan negara pihak ketiga, pendekatan perutusan tetap negara anggota WTO, *first substantive meeting* di WTO, *second Substantive Meeting* di WTO, uraian lebih rinci sebagai berikut:

- Penyusunan *first written submission*
- Pelaksanaan *first substantive meeting*
- Jawaban pertanyaan panel dan tanggapan pandangan pihak ketiga
- Penyusunan *second written submission*
- Penyusunan *second substantive meeting*
- Jawaban atas pertanyaan panel
- Tanggapan atas *entering report*

- c. Penyusunan kebijakan sesuai dengan perjanjian internasional
Dilakukan melalui rapat pembahasan, rapat koordinasi, penyusunan kebijakan.
- d. Penyusunan kebijakan dalam perlindungan industri dalam negeri (trade remedies);
Dilakukan melalui rapat pembahasan, identifikasi permasalahan, kunjungan lapangan dan rekomendasi/masukan;
- e. Memberi masukan kepada Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait rekomendasi KADI dan KPPI
Dilakukan melalui rapat pembahasan, identifikasi permasalahan, kunjungan lapangan, penyusunan arahan Menteri kepada Tim Pertimbangan Nasional atas rekomendasi Komiter Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mempersiapkan gugatan Pemri terhadap Uni Eropa atas pengenaan CVD atas Produk Stainless Steel asal Indonesia;

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Februari 2023
Peserta : Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Jamdatun
Jumlah Peserta : @ 60 Orang

- Pelaksanaan kegiatan dan pembahasan rencana gugatan RI terhadap UniEropa atas pengenaan CVD produk Stainless Steel asal Indonesia; Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam rangka Pengumpulan data dan persiapan Sidang Panel di WTO.

Tempat : WTO, Jenewa, Swiss
Waktu : Maret 2023
Peserta :Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Jamdatun
Jumlah Peserta : @ 2 Orang

- Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Sengketa DS592: Indonesia-Raw Materials “Penyusunan Dokumen Banding”

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Mei 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
Jumlah Peserta : @ 60 Orang
Narasumber : Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Ahli/Pakar

- Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan yang berkaitan identifikasi data tambang, *good mining practices*, industri pengolahan, bahan mentah, bahan tambang nikel, industri hulu dan industri hilir.

Kunjungan Lapangan dalam Rangka Joint Visit pemantauan data industri pengolahan baja, *stainless steel*, HRC Alloy, Industri Hilir lainnya

Tempat : Jawa Timur
Waktu : Mei - Oktober 2023
Peserta : Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian
Jumlah Peserta : @ 4 Orang
Alasan Lokasi : Industri pengolahan tersebar di Provinsi Jawa Timur, sehingga banyak perusahaan yang berada di sana, kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian serta Pemerintah Daerah.

3. Pelaporan (Perumusan dan Evaluasi)

- a. Pelaporan dilaksanakan melalui kegiatan rapat pembahasan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan rapat penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan;
- b. Penyusunan Laporan Final dan *Dispute Settlement Body (DSB) recommendation and ruling*;
- c. Penyusunan bahan masukan/tanggapan/laporan dalam Tim Pertimbangan Nasional (PKN);
- d. Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaporan kegiatan terdiri dari:

- Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan
 - Tempat : Jawa Barat
 - Waktu : September - Desember 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @20 Orang
 - Narasumber : Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian

052 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri

1. Perencanaan dan Persiapan (Agenda Setting)

Koordinasi dengan (melibatkan Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perdagangan). Adapun pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi identifikasi permasalahan, dan peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

1) Rapat Internal

Rapat internal yang melibatkan anggota tim di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing bagian tim pokja. Selain itu juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lainnya pada isu terkait.

Rapat internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Januari 2023

Peserta : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jumlah Peserta : @ 50 orang

2) Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

Tempat : Bogor, Jawa Barat

Waktu : Februari 2023

Peserta : Deputi 6, Kementerian Luar Negeri, BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas

Jumlah Peserta : @ 20 orang

Narasumber : Kementerian Luar Negeri, BKPM, Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian

2. Pelaksanaan (Koordinasi dan Formulasi Kebijakan)

Tahapan pelaksanaan kegiatan untuk kebijakan koordinasi kerjasama investasi luar dan dalam negeri:

- Rapat koordinasi
- *Focus Group Discussion*
- Seminar/Workshop
- Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

- Rapat Penyusunan Agenda Kerjasama

Tempat : DKI Jakarta

Waktu : Februari – September 2023

Peserta : Deputi 6, Biro Hukum, Kementerian/Lembaga Terkait

Jumlah Peserta : @50 orang

Narasumber : Kementerian Luar Negeri, BKPM, Kementerian Perdagangan,
Kemen BUMN

- Rapat Fasilitasi Kerjasama Strategis Investasi Dalam Negeri
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Juni – September 2023
 - Peserta : Deputi 6, Biro Hukum, Kementerian/Lembaga Terkait
 - Jumlah Peserta : @50 orang
 - Narasumber : BKPM, Kementerian Perdagangan, Kemen BUMN

- FGD Kerjasama Investasi Pariwisata Pasca Pandemi dengan Negara Investor
 - Tempat : Bali
 - Waktu : September 2023
 - Peserta : Deputi 6, Biro Hukum, Kementerian/Lembaga Terkait, BUMN, Duta Besar Negara Sahabat, Pemda
 - Jumlah Peserta : @30 orang
 - Narasumber : Kementerian Luar Negeri, BKPM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Alasan : Lokus pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19

4) Diplomasi /*Economic Forum*/ Tindaklanjut Kerjasama Investasi Luar Negeri Perjalanan dinas kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam rangka Konsultasi dan TindakLanjut untuk mewujudkan peningkatan nilai Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia dengan mendorong investor internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesiamelalui perbaikan citra dan kebijakan promosi investasi dengan melakukan pendekatan langsung baik kepada Pelaku Usaha Asing maupun Pemerintah Negara Lain. Beberapa Kerjasama yang perlu ditindaklanjuti dengan Korea Selatan antara lain : *Electric Vehicle* (EV), Farmasi, dan Baja serta transfer teknologi dalam industri manufaktur.

- Tempat : Korea Selatan
- Waktu : November 2023
- Jumlah : @4 Orang

3. Pelaporan (Perumusan dan Evaluasi)

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan koordinasi kerjasama investasi luar dan dalam negeri:

- Rapat internal lintas unit kerja
- Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Akhir
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Rapat Koordinasi Penyusunan Investment Cooperation dan Promotion Chapter

Tempat	: Bogor
Waktu	: November, Desember 2022
Peserta	: Deputi 6
Jumlah Peserta	: @25 orang
Narasumber	: Kementerian Luar Negeri, BKPM, Bappenas

053 Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman

Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada kegiatan PDB Kemaritiman dibagi menjadi 3 komponen kegiatan utama sebagai berikut:

1. Persiapan (Agenda Setting)

- Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu penyiapan rencana, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan klaster dan KBLI dengan mengumpulkan data dari *stakeholders* terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan.
- Identifikasi kebijakan farmasi yang telah ada
- Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan PDB Kemaritiman

Adapun aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan PDB Kemaritiman yaitu:

- Rapat Internal
- Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan
- Kunjungan Lapangan
- Rapat Internal

Melibatkan Anggota tim di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-masing bagian tim pokja. Selain itu juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas eselon 1 pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lainnya pada isu terkait.

- Rapat Internal
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Januari 2023
 - Peserta : Internal Deputi 6
 - Jumlah Peserta : @60 Orang
- Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Eselon I maupun Eselon II dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada isu terkait.
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Januari 2023
 - Peserta : Internal bersama Tim BPS dan Tim LIPI
 - Jumlah Peserta : @60 Orang
 - Narasumber : BPS, LIPI/BRIN dan Badan Informasi Geospasial (BIG), Bappenas
- Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Neraca Kemaritiman
 - Tempat : DKI Jakarta
 - Waktu : Januari 2023
 - Peserta : Kementerian/Lembaga terkait
 - Jumlah Peserta : @60 Orang
 - Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Bappenas

2. Pelaksanaan (Koordinasi dan Formulasi Kebijakan)

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan PDB Kemaritiman yaitu:

- Rapat Koordinasi
- FGD
- Seminar / Workshop
- Pembentukan Tim Koordinasi Perumusan Neraca dan Standar Data
- Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

a. Rapat Koordinasi/FGD/WORKSHOP/BIMTEK

Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Rapat Koordinasi dilakukan dengan agenda satu rapat koordinasi menyelesaikan satu permasalahan utama.

FGD Penetapan Cakupan KBLI sektor Perikanan

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 30 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Akademisi

FGD Penetapan Cakupan KBLI sektor Perhubungan Laut

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Februari 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 30 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Kementerian Perhubungan, Akademisi

FGD Penetapan Cakupan KBLI sektor Bio Industri

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Maret 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 30 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Akademisi

FGD Penetapan Cakupan KBLI sektor Energi dan Mineral

Tempat : Jawa Barat
Waktu : Maret 2023

Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 30 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Akademisi

FGD Penetapan Cakupan KBLI sektor Jasa Maritim

Tempat : Jawa Barat
Waktu : April 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 30 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Akademisi

Workshop Penyusunan metadata statistik

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Mei 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
Jumlah Peserta : @ 35 Orang
Narasumber : BPS, Akademisi dari Perguruan Tinggi

Penyusunan Neraca PDB Kemaritiman KBLI 2020

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Juni – September 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Prospera
Jumlah Peserta : @50 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Akademisi

Perbaikan Standar Data PDB Kemaritiman

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Juni – September 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Prospera
Jumlah Peserta : @50 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN, Akademisi

b. Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di dalam verifikasi sampel lapangan dan penginputan KBLI PDB Kemaritiman

Kunjungan Lapangan dalam Rangka Verifikasi Sampel Lapangan KBLI PDB Kemaritiman

Tempat : Maluku
Waktu : Juni 2023
Peserta : Kemenko Marves, BPS dan Bappenas
Jumlah Peserta : @6 Orang

c. *Benckmarking* Luar Negeri

Perjalanan dinas kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam rangka *benchmarking* dan kerjasama dengan Pemerintah Australia (Australian Berau of Statistics/ABS) untuk adaptasi penerapan *UN Ocean Account* dalam perhitungan Neraca PDB Kemaritiman. Australia telah menerapkan *UN Ocean Account* dalam perhitungan neraca lingkungan dan neraca kelautan sejak tahun 2016 khususnya dalam penerapan aspek spasial dalam perhitungan neraca lingkungan ini. Hal ini diharapkan dalam meningkatkan performa BPS dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi dalam menyusun PDB Kemaritiman.

Tempat : Australia
Waktu : Juni 2023
Jumlah : @4 Orang
Peserta : BPS, Bappenas, Kemenko Marves

3. Pelaporan (Perumusan dan Evaluasi)

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan PDB Kemaritiman yaitu:

- Rapat Internal lintas Unit Kerja
- Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Akhir
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
- Pelaporan dan Finalisasi

Penyusunan katalog Buku PDB Kemaritiman

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : Oktober 2023
Peserta : Kementerian/Lembaga, Prospera
Jumlah Peserta : @ 20 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN dan Bappenas

Pehimpunan kerangka masukan untuk Ocean Account dari Penyusunan PDB Kemaritiman

Tempat : Jawa Barat
Waktu : November 2023
Peserta : Internal bersama Tim BPS dan Prospera
Jumlah Peserta : @ 20 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN dan Bappenas

Pelaporan PDB Kemaritiman

Tempat : DKI Jakarta
Waktu : November 2023
Peserta : Internal bersama Tim BPS dan Prospera
Jumlah Peserta : @50 Orang
Narasumber : BPS, LIPI/BRIN dan Bappenas

5) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	KRO/RO/ KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan												
051.	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan												

A	Perencanaan dan Pelaksanaan													
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan													
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves													
	Rapat Koordinasi Identifikasi													

	Permasalahan dengan K/L terkait												
B.	Pelaksanaan												
	Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders terkait												
	Kunjungan Lapangan dalam Koordinasi dan Pengambilan data informasi												
	Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja												
	Honorarium Jasa Profesi K/L, Stakeholder , Ahli/Pakar												
	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam rangka Konsultasi Kuasa Hukum												
	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam rangka sidang di WTO												
C.	Pelaporan												
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi												

	Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves																		
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait																		
052	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri																		
A	Perencanaan dan Persiapan																		
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan																		
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait																		
B.	Pelaksanaan																		
	Penyusunan Agenda Kerjasama																		
	Rapat Fasilitasi Kerjasama Strategis Investasi Dalam Negeri																		
	Rapat Koordinasi Business Forum dengan Negara Tujuan Investasi																		
	FGD Kerjasama Investasi Pariwisata Pasca Pandemi dengan Negara Investor																		
	Tindaklanjut Kerjasama Investasi Luar Negeri/ <i>Economic Forum</i>																		

	Penyusunan Cakupan Hukum dalam Investasi																		
C.	Pelaporan																		
	Rapat Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi Penyusunan Investment Cooperation dan Promotion Chapter																		
053	Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman																		
A.	Perencanaan dan Persiapan																		
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan																		
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves																		
	Rapat Koordinasi Perencanaan Penyusunan Neraca dengan K/L terkait																		
B.	Pelaksanaan																		
	FGD Penetapan Cakupan KBLI sektoral																		
	Workshop Penyusunan metadata statistik																		
	Rangka Verifikasi Sampel Lapangan KBLI PDB Kemaritiman																		
	Penyusunan Neraca PDB Kemaritiman KBLI 2020																		
	Perbaikan Standar Data PDB Kemaritiman																		

	<i>Benckmarking</i> penerapan <i>UN Ocean Account</i> dalam Neraca Kelautan dan Lingkungan di Australia												
C	Pelaporan												
	Penyusunan katalog Buku PDB Kemaritiman												
	Finalisasi Buku PDB Kemaritiman												
	Pehimpunan kerangka masukan untuk <i>Ocean Account</i> dari Penyusunan PDB Kemaritiman												
	Pelaporan PDB Kemaritiman												

6) Waktu Pencapaian Keluaran

No.	KRO/RO/KOMPONEN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan												
RO	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan												
051	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan												
a.	Data dan Informasi Koordinasi Penanganan												

	Sengketa/Permasalahan Investasi												
b.	Bahan Kebijakan Koordinasi Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi												
c.	Kertas Kebijakan Kebijakan Koordinasi Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi												
d.	Rancangan Kebijakan Kebijakan Koordinasi Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi												
052	Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri												
a.	Agenda Setting												
b.	Policy Formulation												
c.	Policy Adoption												
053	Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman												
a.	Data dan Informasi PDB Kemaritiman												
b.	Bahan Dokumen Strategis PDB Kemaritiman												
c.	Kertas Kerja Strategis PDB Kemaritiman												
d.	Dokumen Strategis PDB Kemaritiman												

7) Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan adalah sebesar Rp 4400.000.000,- (*empat milyar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	KRO/RO/KOMPONEN	Target	ANGGARAN (Rp)
KRO	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		
RO	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan	3 Rekomendasi Kebijakan	4,400,000,000
051	Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,000,000,000
A	Perencanaan dan Persiapan		85,020,000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		28,070,000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves		15,270,000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait		41,660,000
B	Pelaksanaan		746,860,000
	Rapat Koordinasi/FGD/Workshop dengan K/L,		176,617,000

	BUMN, dan Stakeholders terkait		
	Kunjungan Lapangan dalam Rangka		109,651,000
	Honorarium Jasa Profesi K/L, Stakeholder, Ahli/Pakar		87,600,000
	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam rangka Sidang Sengketa (Dispute Settlement)		372,992,000
C	Pelaporan		168,140,000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves		35,280,000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait		132,860,000
052	Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	1,100,000,000
A	Perencanaan dan Persiapan		150,000,000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		11,250,000
	Rapat Koordinasi dengan K/L terkait		138,750,000
B	Pelaksanaan		1,375,000,000

	Penyusunan Agenda Kerjasama		55,350,000
	Rapat Fasilitasi Kerjasama Strategis Investasi Dalam Negeri		55,350,000
	Rapat Koordinasi Business Forum dengan Negara Tujuan Investasi		254,431,000
	FGD Kerjasama Investasi Pariwisata Pasca Pandemi dengan Negara Investor		399,631,000
	Tindaklanjut Kerjasama Investasi Luar Negeri/ <i>Economic Forum</i>		489,738,000
	Penyusunan Cakupan Hukum dalam Investasi		120,500,000
C.	Pelaporan		275,000,000
	Rapat Pelaporan		55,200,000
	Rapat Koordinasi Penyusunan Invesment Cooperation dan Promotion Chapter		219,800,000
053.	Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman	1 Rekomendasi Kebijakan	2,300,000,000
A	Perencanaan dan Persiapan		150,000,000
	Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		13,500,000
	Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves		24,750,000

	Rapat Koordinasi Perencanaan Penyusunan Neraca dengan K/L terkait		111,750,000
B	Pelaksanaan		2,450,000,000
	FGD Penetapan Cakupan KBLI sektoral		639,505,000
	Workshop Penyusunan metadata statistik		441,880,000
	Rangka Verifikasi Sampel Lapangan KBLI PDB Kemaritiman		92,546,000
	Penyusunan Neraca PDB Kemaritiman KBLI 2020		559,631,000
	Perbaikan Standar Data PDB Kemaritiman		56,250,000
	<i>Benckmarking</i> penerapan <i>UN Ocean Account</i> dalam Neraca Kelautan dan Lingkungan di Australia		383,088,000
	POKJA KEGIATAN Penyusunan Neraca PDB Kemaritiman		130,400,000
	POKJA KEGIATAN Penyusunan Klasifikasi dan Standar Data Statistik PDB Kemaritiman		146,700,000
C	Pelaporan		400,000,000
	Penyusunan katalog Buku PDB Kemaritiman		81,350,000

Finalisasi Buku PDB Kemaritiman		116,836,000
Pehimpunan kerangka masukan untuk <i>Ocean Account</i> dari Penyusunan PDB Kemaritiman		36,350,000
Pelaporan PDB Kemaritiman		165,464,000

Penanggung Jawab Kegiatan



(Rifky Setiawan)

NIP 197010042002121002





DOKUMEN

RKAKL 2023



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
120.01.WA 5601 5601.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			2,200,000,000 2,200,000,000 880,000,000	
5601.EBA.960 058 A 521211	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan <i>Pengelolaan Reformasi Birokrasi</i> Belanja Bahan (KPPN.175-Jakarta VI) - ATK [1 PKT x 2 KALI] - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 28 KALI] - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 28 KALI] - Seminar Kit [25 PKT x 1 KALI] - Cetak Dokumen [30 EKS x 2 KALI] - Desain dan Cetak Spanduk [1 PKT x 4 KALI] - Penggandaan [32 EKS x 2 KALI]	1.0 Layanan		380,000,000 380,000,000 <i>380,000,000</i> 97,700,000	U RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.175-Jakarta VI) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 7 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 2 JAM x 10 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 10 KALI]	2.0 PKT 840.0 OK 840.0 OK 25.0 PKT 60.0 EKS 4.0 PKT 64.0 EKS	1,000,000 22,000 53,000 300,000 350,000 250,000 50,000	2,000,000 18,480,000 44,520,000 7,500,000 21,000,000 1,000,000 3,200,000	RM SBM SBM SBM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI) > JAWA BARAT Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah [25 ORG x 2 HARI x 2 KALI] - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [25 ORG x 2 HARI x 2 KALI] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [25 ORG x 1 HARI x 2 KALI] - Satuan biaya transportasi [25 ORG x 2 KALI x 2 KALI]			133,600,000 19,600,000 60,000,000 54,000,000	RM SBM SBM SBM
5601.EBA.962 067 A 521111	Layanan Umum Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan <i>Pengelolaan Ketatausahaan</i> Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.175-Jakarta VI) - Langganan Koran dan Majalah [1 PKT x 12 BLN] - Cetak Kalender [120 PKT x 1 KALI] - Cetak Map Kedeputan [500 PKT x 2 KALI]	1.0 Layanan		500,000,000 500,000,000 <i>500,000,000</i> 42,800,000	U RM
				9,600,000 13,200,000 20,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			147,984,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 BLN]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	22,000	22,000,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	53,000	53,000,000	
	- Snack Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara [40 ORG x 9 KALI]	360.0 OK	49,000	17,640,000	SBM
	- Makan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara [40 ORG x 9 KALI]	360.0 OK	110,000	39,600,000	SBM
	- Seminar Kit [20 PKT x 2 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Desain dan Cetak Spanduk [1 PKT x 4 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan	20.0 EKS	37,200	744,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			98,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 8 KALI]	16.0 OJ	1,400,000	22,400,000	SBM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM x 20 KALI]	40.0 OJ	1,000,000	40,000,000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 20 KALI]	40.0 OJ	900,000	36,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			41,301,000	RM
	> JAWA TIMUR			41,301,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	2,674,000	8,022,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	4,449,000	13,347,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	2,007,000	12,042,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Uang Taksi Perjalanan Dinas Daerah [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	194,000	1,164,000	
	- Uang Taksi Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			50,555,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	10.0 OP	667,000	6,670,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [35 ORG x 2 HARI]	70.0 OP	433,000	30,310,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 2 HARI]	40.0 OH	180,000	7,200,000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [40 ORG x 1 KALI]	40.0 OK	150,000	6,000,000	
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OH	75,000	375,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			118,960,000	RM
	> JAWA BARAT			118,960,000	
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah [20 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	80.0 OP	822,000	65,760,000	
	Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [20 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	80.0 OH	150,000	12,000,000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [20 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	40.0 OH	430,000	17,200,000	
	Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	80.0 OK	300,000	24,000,000	
5601.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	153.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,320,000,000	

5601.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	33.0 Dokumen		440,000,000	U
059	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan			440,000,000	
A	Perencanaan Program dan Anggaran			440,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.175-Jakarta VI)			139,200,000	RM
	- ATK [1 PKT x 6 KALI]	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	22,000	17,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	53,000	42,400,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 3 KALI x 2 KALI]	120.0 PKT	300,000	36,000,000	
	- Cetak Dokumen [20 PKT x 2 KALI x 3 KALI]	120.0 PKT	300,000	36,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [19 EKS x 1 KALI]	19.0 EKS	50,000	950,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.175-Jakarta VI)			124,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 10 KALI]	20.0 OJ	1,400,000	28,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 12 KALI]	48.0 OJ	1,000,000	48,000,000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 12 KALI]	48.0 OJ	900,000	43,200,000	
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI x 4 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			57,040,000	RM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [20 ORG x 1 HARI x 4 KALI]	80.0 OP	433,000	34,640,000	SBM
	Uang Harian Fullboard [20 ORG x 1 HARI x 4 KALI]	80.0 OH	130,000	10,400,000	
	Uang Transport DKI JAKARTA [20 ORG x 4 KALI]	80.0 OK	150,000	12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			118,960,000	RM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [20 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	80.0 OP	822,000	65,760,000	SBM
	> JAWA BARAT			53,200,000	
	- Uang Harian Fullboard [20 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	80.0 OH	150,000	12,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [20 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	40.0 OH	430,000	17,200,000	
	- Uang Transport [20 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	80.0 OK	300,000	24,000,000	
5601.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	117.0 Dokumen		880,000,000	
058	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan			660,000,000	U
A	<i>Pengelolaan Kinerja Periodik</i>			660,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			143,216,000	RM
	- ATK [1 PKT x 4 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 30 KALI x 1 KEG]	1200.0 OK	22,000	26,400,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 30 KALI x 1 KEG]	1200.0 OK	53,000	63,600,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 4 KALI]	80.0 PKT	300,000	24,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 4 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Cetak Dokumen Triwulan [20 EKS x 4 KALI]	80.0 EKS	300,000	24,000,000	
	- Penggandaan [6 EKS]	6.0 EKS	36,000	216,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			236,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 30 KALI]	120.0 OJ	1,000,000	120,000,000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 30 KALI]	120.0 OJ	900,000	108,000,000	
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 12 KALI]	12.0 ORKAL	700,000	8,400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			42,464,000	RM
	> JAWA TENGAH			42,464,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	2,182,000	17,456,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TENGAH) [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	1,024,000	8,192,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TENGAH) [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	600,000	2,400,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	16.0 OK	256,000	4,096,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	16.0 OK	90,000	1,440,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	24.0 OH	370,000	8,880,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			237,920,000	RM
	> JAWA BARAT			237,920,000	
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah [20 ORG x 2 HARI x 4 KALI]	160.0 OP	822,000	131,520,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [20 ORG x 2 HARI x 4 KALI]	160.0 OH	150,000	24,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [20 ORG x 1 HARI x 4 KALI]	80.0 OH	430,000	34,400,000	
	- Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI x 4 KALI]	160.0 OK	300,000	48,000,000	SBM
064	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan			220,000,000	U
A	Pengelolaan Laporan Kegiatan Periodik			220,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.175-Jakarta VI)			39,280,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 16 KALI]	400.0 OK	22,000	8,800,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 16 KALI x 0 K]	400.0 OK	53,000	21,200,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Penggandaan [20 EKS x 4 KALI]	80.0 EKS	37,875	3,030,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 EKS x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.175-Jakarta VI)			104,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 14 KALI]	56.0 OJ	1,000,000	56,000,000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 12 KALI]	48.0 OJ	900,000	43,200,000	
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 8 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			75,920,000	RM
	> JAWA BARAT			75,920,000	
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah [20 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	60.0 OP	822,000	49,320,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Biaya satuan transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan			14,100,000,000	
6008	Koordinasi Investasi dan Pertambangan			14,100,000,000	
6008.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan[Base Line]	14.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		12,000,000,000	
6008.ABB.001	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	2.0 Rekomendasi Kebijakan		1,600,000,000	
051	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja			700,000,000	U
A	Perencanaan dan Persiapan			150,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			22,615,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 2 KALI]	100.0 OK	22,000	2,200,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 2 KALI]	100.0 OK	53,000	5,300,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 2 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [3 EKS x 5 KALI]	15.0 EKS	41,000	615,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			41,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 3 KALI]	6.0 ORKAL	700,000	4,200,000	SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			3,600,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	210,000	2,100,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			17,475,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OP	667,000	6,670,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OP	433,000	4,330,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	130,000	2,600,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OH	100,000	500,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [5 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	5.0 OH	75,000	375,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			64,910,000	RM
	> JAWA			64,910,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [5 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	10.0 OP	1,110,000	11,100,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [15 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	30.0 OP	822,000	24,660,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	200,000	1,200,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	150,000	1,350,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan</i>			400,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			20,680,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 3 KALI]	150.0 OK	22,000	3,300,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 3 KALI]	150.0 OK	53,000	7,950,000	SBM
	- Seminar Kit [25 ORG x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 5 KALI]	10.0 EKS	43,000	430,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			92,400,000	RM
	> POKJA KEGIATAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM			92,400,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 7 BLN x 1 KALI]	7.0 OB	750,000	5,250,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 7 BLN]	7.0 OB	700,000	4,900,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 7 BLN x 1 KALI]	7.0 OB	650,000	4,550,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 7 BLN x 1 KALI]	7.0 OB	600,000	4,200,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 7 BLN x 1 KALI]	7.0 OB	500,000	3,500,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [20 ORG x 7 BLN x 1 KALI]	140.0 OB	500,000	70,000,000	SBM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			50,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [3 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [4 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [4 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	16.0 OJ	900,000	14,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [4 ORG x 1 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			45,506,000	RM
	> KALIMANTAN			45,506,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [6 ORG x 1 KALI]	6.0 OK	2,781,000	16,686,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	2,654,000	5,308,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	1,923,000	3,846,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	1,125,000	4,500,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	538,000	2,152,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OK	256,000	3,072,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OK	171,000	2,052,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [6 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	18.0 OH	380,000	6,840,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			73,317,000	RM
	> SULAWESI			73,317,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR [7 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	7.0 OK	3,829,000	26,803,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sulawesi Selatan) [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OP	1,574,000	6,296,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor (Sulawesi Selatan) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OP	1,127,000	11,270,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [7 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	14.0 OH	150,000	2,100,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [7 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	7.0 OH	430,000	3,010,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [7 ORG x 2 KALI]	14.0 OK	256,000	3,584,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [7 ORG x 2 KALI]	14.0 OK	166,000	2,324,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sulawesi Selatan) [5 ORG x 1 HARI]	5.0 OP	513,000	2,565,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sulawesi Selatan) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OP	397,000	7,940,000	SBM
	- Uang Harian (Sulawesi Selatan) [25 ORG x 1 HARI]	25.0 OH	105,000	2,625,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK	150,000	3,750,000	SBM
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			118,097,000	RM
	> AMERIKA SERIKAT			118,097,000	
	- Visa [1 ORG x 1 KALI]	1.0 OK	2,000,000	2,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara PP [1 ORG x 1 KALI]	1.0 OK	57,967,000	57,967,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A/B/C/D [1 ORG x 7 HARI]	7.0 OH	8,304,295	58,130,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	<i>Pelaporan</i>			150,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			17,803,000	RM
	- ATK [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	500,000	2,000,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [55 ORG x 2 KALI]	110.0 OK	53,000	5,830,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [55 ORG x 2 KALI]	110.0 OK	22,000	2,420,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [4 EKS x 10 KALI]	40.0 EKS	32,575	1,303,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			31,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [4 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [4 ORG x 1 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			47,047,000	RM
	> SULAWESI			47,047,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	2,781,000	13,905,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon I [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	4,168,000	8,336,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	3,107,000	6,214,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,606,000	3,212,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	955,000	3,820,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	240,000	2,400,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [5 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	15.0 OH	370,000	5,550,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			53,550,000	RM
	> BALI			53,550,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OK	3,262,000	16,310,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OP	1,569,000	6,276,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OP	1,419,000	8,514,000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [5 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	160,000	1,600,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OH	480,000	2,400,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	256,000	1,280,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	189,000	945,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II [5 ORG x 1 HARI]	5.0 OP	652,000	3,260,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II [15 ORG x 1 HARI]	15.0 OP	441,000	6,615,000	
	- Uang Harian (Sulawesi Selatan) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	115,000	2,300,000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	150,000	3,000,000	SBM
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera			900,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>150,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			34,860,000	RM
	- ATK [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [55 ORG x 2 KALI]	110.0 OK	22,000	2,420,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [55 ORG x 2 KALI]	110.0 OK	53,000	5,830,000	SBM
	- Seminar Kit [70 ORG x 1 KALI]	70.0 PKT	300,000	21,000,000	
	- Backdrop [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 12 KALI]	24.0 EKS	46,250	1,110,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			55,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 3 KALI]	6.0 ORKAL	700,000	4,200,000	SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			3,600,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	210,000	2,100,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			56,340,000	RM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OP	667,000	13,340,000	SBM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [50 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	50.0 OP	433,000	21,650,000	SBM
	Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [70 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	70.0 OH	130,000	9,100,000	SBM
	Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [70 ORG x 1 KALI]	70.0 OK	150,000	10,500,000	SBM
	Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	100,000	1,000,000	SBM
	Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [10 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	10.0 OH	75,000	750,000	SBM
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan</i>			600,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			28,264,000	RM
	- ATK [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Seminar Kit [30 ORG x 1 KALI]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 3 KALI]	180.0 OK	22,000	3,960,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 3 KALI]	180.0 OK	53,000	9,540,000	SBM
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 16 KALI]	32.0 EKS	39,500	1,264,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			105,600,000	RM
	POKJA PERCEPATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL TRANS SUMATERA			105,600,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 8 BLN x 1 KALI]	8.0 OB	750,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 8 BLN]	8.0 OB	700,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 8 BLN x 1 KALI]	8.0 OB	650,000	5,200,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 8 BLN x 1 KALI]	8.0 OB	600,000	4,800,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 8 BLN x 1 KALI]	8.0 OB	500,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [20 ORG x 8 BLN x 1 KALI]	160.0 OB	500,000	80,000,000	SBM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			200,000,000	RM
	Kajian Perorangan Pengembangan Dan Pengendalian Percepatan Kebijakan Investasi Proyek Di Sumatera [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.175-Jakarta VI)			27,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [4 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [4 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [4 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			166,046,000	RM
	> RIAU			39,292,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	3,016,000	12,064,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	3,820,000	7,640,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	3,119,000	6,238,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,650,000	3,300,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	852,000	1,704,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	256,000	2,048,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	101,000	808,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	12.0 OH	370,000	4,440,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> ACEH			38,520,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	4,492,000	13,476,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (ACEH) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	4,420,000	8,840,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	3,526,000	7,052,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,294,000	2,588,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	123,000	738,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	360,000	3,240,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> JAMBI			34,832,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	2,460,000	7,380,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (J A M B I) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	5,000,000	10,000,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	4,102,000	8,204,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,225,000	2,450,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	147,000	882,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> SUMATERA UTARA			53,402,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	3,808,000	15,232,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat	3.0 OH	4,960,000	14,880,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Negara/Pejabat Eselon I (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	4,960,000	14,880,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon II (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	2,195,000	6,585,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	1,100,000	3,300,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	663,000	1,989,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	256,000	2,048,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	16.0 OH	370,000	5,920,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	200,000	800,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	150,000	600,000	SBM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			72,290,000	RM
	> SUMATERA SELATAN			72,290,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	2,268,000	22,680,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I [3 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	1,030,000	6,180,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [7 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	14.0 OH	745,000	10,430,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	179,000	1,790,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	380,000	3,800,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Selatan) [10 ORG x 2 HARI]	20.0 OH	120,000	2,400,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - (Sumatera Selatan) [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OP	480,000	4,800,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - (Sumatera Selatan) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OP	455,000	9,100,000	SBM
	- Uang Harian Kegiatan Rapat [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	85,000	2,550,000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI]	30.0 OK	150,000	4,500,000	SBM
C	<i>Pelaporan</i>			150,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.175-Jakarta VI)			27,768,000	RM
	- ATK [3 PKT x 1 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 2 KALI]	120.0 OK	22,000	2,640,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 2 KALI]	120.0 OK	53,000	6,360,000	SBM
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 KALI]	50.0 PKT	300,000	15,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 1 KALI]	8.0 EKS	33,500	268,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			21,900,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [3 ORG x 1 KALI]	3.0 ORKAL	700,000	2,100,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,332,000	RM
	> SUMATERA			100,332,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [9 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	9.0 OK	3,808,000	34,272,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OP	1,011,000	6,066,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OP	764,000	9,168,000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [9 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	18.0 OH	130,000	2,340,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [9 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [9 ORG x 2 KALI]	18.0 OK	256,000	4,608,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [9 ORG x 2 KALI]	18.0 OK	256,000	4,608,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sumatera Utara) [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OP	511,000	5,110,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor (Sumatera Utara) [40 ORG x 1 HARI]	40.0 OP	427,000	17,080,000	SBM
	- Uang Harian Fullday Di Luar Kota SUMATERA UTARA [50 ORG x 1 HARI]	50.0 OH	95,000	4,750,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [50 ORG x 1 KALI]	50.0 OK	150,000	7,500,000	SBM
6008.ABB.002	Rekomendasi Kebijakan Investasi Bidang Jasa	3.0 Rekomendasi Kebijakan		2,000,000,000	
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Perdagangan			720,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>179,467,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			57,433,000	RM
	- ATK [4 PKT x 1 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 15 KALI]	450.0 OK	22,000	9,900,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 15 KALI]	450.0 OK	53,000	23,850,000	
	- Seminar Kit [25 ORG x 2 PKT x 1 KALI]	50.0 PKT	300,000	15,000,000	
	- Penggandaan [10 EKS x 10 KALI]	100.0 EKS	46,830	4,683,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			20,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI) Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [50 ORG x 1 HARI x 1 KALI] - Uang Harian Fullday/Haliday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 1 HARI x 1 KALI] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [50 ORG x 1 KALI]			35,650,000	RM
		50.0 OP	433,000	21,650,000	
		50.0 OH	130,000	6,500,000	
		50.0 OK	150,000	7,500,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI) > JAWA BARAT Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [4 ORG x 2 HARI x 1 KALI] Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [16 ORG x 2 HARI x 1 KALI] - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 KALI] - Satuan biaya transportasi jakarta ke Jawa Barat [20 ORG x 2 KALI x 1 KALI] - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [4 ORG x 3 HARI x 1 KALI]			65,584,000	RM
		8.0 OP	1,110,000	8,880,000	SBM
		32.0 OP	822,000	26,304,000	SBM
		40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
		20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
		40.0 OK	350,000	14,000,000	SBM
		12.0 OH	150,000	1,800,000	SBM
<i>B</i>	<u>Pelaksanaan</u>			465,593,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) - ATK [1 PKT x 2 KALI] - Seminar Kit [40 ORG x 1 KALI] - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 11 KALI] - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 11 KALI] - Penggandaan [5 EKS x 10 KALI]			57,381,000	RM
		2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
		40.0 PKT	300,000	12,000,000	
		550.0 OK	22,000	12,100,000	
		550.0 OK	53,000	29,150,000	
		50.0 EKS	42,620	2,131,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) POKJA Efektifitas Kebijakan Kewajiban Penyediaan > 70% Lokal Konten dalam sektor Perdagangan Retail Modern Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan - (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 12 BLN x 1 KALI] Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 12 BLN x 1 KALI] Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan - (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 12 BLN x 1 KALI] Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan - (ditetapkan dengan SK Es. 1) [10 ORG x 12 BLN x 1 KALI]			91,200,000	RM
		12.0 OB	750,000	9,000,000	SBM
		12.0 OB	700,000	8,400,000	SBM
		12.0 OB	650,000	7,800,000	SBM
		12.0 OB	500,000	6,000,000	SBM
		120.0 OB	500,000	60,000,000	SBM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) Kajian Analisis Efektifitas Kebijakan Kewajiban - Penyediaan 70% Lokal Konten dalam sektor Perdagangan Retail Modern [1 PKT x 1 KALI]			100,000,000	RM
		1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			70,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [6 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [6 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [6 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	24.0 OJ	900,000	21,600,000	SBM
	- Honorarium Moderator [6 ORG x 2 KALI]	12.0 ORKAL	700,000	8,400,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			80,628,000	RM
	> SUMATERA UTARA			22,926,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	3,308,000	9,924,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OH	1,100,000	6,600,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	SBM
	> BALI			24,864,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (B A L I) [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OH	1,348,000	8,088,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	480,000	4,320,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	189,000	1,134,000	
	> SUMATERA SELATAN			19,662,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OH	1,138,000	6,828,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [3 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	6.0 OK	179,000	1,074,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	> JAWA BARAT			13,176,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OH	1,201,000	7,206,000	SBM
	- Satuan Biaya Transportasi [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	430,000	3,870,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			65,584,000	RM
	> JAWA			65,584,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [4 ORG x 2 HARI]	8.0 OP	1,110,000	8,880,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [16 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	32.0 OP	822,000	26,304,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	350,000	14,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [4 ORG x 3 HARI]	12.0 OH	150,000	1,800,000	SBM
C	<i>Pelaporan</i>			74,940,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			11,500,000	RM
	- ATK [3 PKT x 1 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 2 KALI]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 2 KALI]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Seminar Kit [10 ORG x 1 KALI]	10.0 PKT	300,000	3,000,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 10 KALI]	20.0 EKS	50,000	1,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			21,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [4 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			42,040,000	RM
	> JAWA			42,040,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OP	822,000	16,440,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	350,000	14,000,000	
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Infrastruktur dan logistik			680,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			124,866,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			49,650,000	RM
	- ATK [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 15 KALI]	450.0 OK	22,000	9,900,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 15 KALI]	450.0 OK	53,000	23,850,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan [4 EKS x 5 KALI]	20.0 PKT	45,000	900,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			34,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [4 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			41,216,000	RM
	> JAWA BARAT			41,216,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [18 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	18.0 OP	822,000	14,796,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	150,000	600,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			497,490,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			62,200,000	RM
	- ATK [1 PKT x 6 KALI]	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	22,000	8,800,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	53,000	21,200,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 4 KALI]	80.0 PKT	300,000	24,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [3 PKT x 2 KALI]	6.0 PKT	250,000	1,500,000	
	- Penggandaan [2 PKT x 7 KALI]	14.0 PKT	50,000	700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) > POKJA REALISASI INVESTASI PELABUHAN TANJUNG CARAT Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [2 ORG x 6 BLN x 1 KALI] Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [2 ORG x 6 BLN] - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 6 BLN x 1 KALI] Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 6 BLN x 1 KALI] - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [10 ORG x 6 BLN x 1 KALI]			54,300,000	RM
				54,300,000	
	-	12.0 OB	750,000	9,000,000	SBM
	-	12.0 OB	700,000	8,400,000	SBM
	-	6.0 OB	650,000	3,900,000	SBM
	-	6.0 OB	500,000	3,000,000	SBM
	-	60.0 OB	500,000	30,000,000	SBM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) Kajian Analisis Investasi Bidang Jasa yang - Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Ekonomi [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 3 KALI] - Honorarium Moderator [5 ORG x 3 KALI]			55,500,000	RM
	-	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	SBM
	-	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	SBM
	-	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
	-	15.0 ORKAL	700,000	10,500,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			96,594,000	RM
	> SUMATERA SELATAN			24,314,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	3,083,000	6,166,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,571,000	3,142,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	861,000	1,722,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	179,000	1,074,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> JAWA TIMUR			45,312,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	6.0 OK	2,674,000	16,044,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	2,007,000	8,028,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	1,076,000	4,304,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	12.0 OK	256,000	3,072,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [3 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	12.0 OK	194,000	2,328,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	18.0 OH	410,000	7,380,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	> NUSA TENGGARA BARAT			26,968,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	3,230,000	9,690,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	2,648,000	5,296,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,418,000	2,836,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	907,000	1,814,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	231,000	1,386,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 22

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			128,896,000	RM
	> SUMATERA SELATAN			57,497,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALEMBANG [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	2,268,000	11,340,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (SUMATERA SELATAN) [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	3,083,000	3,083,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III (SUMATERA SELATAN) [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	1,571,000	1,571,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/ Golongan III (SUMATERA SELATAN) [3 ORG x 1 HARI]	3.0 OH	861,000	2,583,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	179,000	1,790,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sumatera Selatan) [2 ORG x 1 HARI]	2.0 OP	1,030,000	2,060,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah [18 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	18.0 OP	745,000	13,410,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	380,000	15,200,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	> JAWA TIMUR			71,399,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	2,674,000	13,370,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (JAWA TIMUR) [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	2,007,000	2,007,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III (JAWA TIMUR) [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	1,076,000	1,076,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/ Golongan III (JAWA TIMUR) [3 ORG x 1 HARI]	3.0 OH	814,000	2,442,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	194,000	1,940,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Timur) [2 ORG x 1 HARI]	2.0 OP	1,784,000	3,568,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Timur) [18 ORG x 1 HARI]	18.0 OP	1,352,000	24,336,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA TIMUR [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	140,000	2,800,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) [20 ORG x 2 HARI]	40.0 OH	410,000	16,400,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
C	Pelaporan			57,644,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 23

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			35,575,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 12 KALI]	360.0 OK	22,000	7,920,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 12 KALI]	360.0 OK	53,000	19,080,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 10 KALI]	20.0 EKS	28,750	575,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			7,500,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 1 JAM x 1 KALI]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 1 JAM x 1 KALI]	3.0 OJ	900,000	2,700,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			14,569,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OP	667,000	667,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [19 ORG x 1 HARI]	19.0 OP	433,000	8,227,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	130,000	2,600,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	75,000	75,000	SBM
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya			600,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>136,692,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			60,000,000	RM
	- ATK [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 13 KALI]	650.0 OK	22,000	14,300,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 13 KALI]	650.0 OK	53,000	34,450,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 8 KALI]	40.0 EKS	31,250	1,250,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			32,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 24

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			43,892,000	RM
	> JAWA BARAT			43,892,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [4 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	1,110,000	4,440,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [16 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	16.0 OP	822,000	13,152,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Dinas Biasa [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Satuan Biaya Transportasi [20 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	40.0 OH	350,000	14,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI]	2.0 OH	200,000	400,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 1 HARI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan</i>			411,558,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			15,376,000	RM
	- ATK [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 2 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 5 KALI]	10.0 EKS	37,600	376,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			38,550,000	RM
	POKJA EVALUASI DAN PROMOSI INVESTASI PADA DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (LIKUPANG)			38,550,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	1,500,000	4,500,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 3 BLN x 1 KALI]	3.0 OB	1,250,000	3,750,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 3 BLN x 1 KALI]	3.0 OB	1,000,000	3,000,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 3 BLN x 1 KALI]	3.0 OB	850,000	2,550,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	750,000	2,250,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [10 ORG x 3 BLN x 1 KALI]	30.0 OB	750,000	22,500,000	SBM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Jasa Konsultansi Dalam Rangka Evaluasi dan Penyusunan Strategi Eksplorasi Potensi Investasi di Destinasi Pariwisata Super Priorita [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			19,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 25

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.175-Jakarta VI)			60,438,000	RM
	> BALI			28,908,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - DENPASAR [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (B A L I) [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	1,348,000	12,132,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bali) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	189,000	1,134,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	480,000	4,320,000	SBM
	> SULAWESI UTARA			31,530,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OK	5,102,000	15,306,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI UTARA) [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	1,170,000	10,530,000	SBM
	- Uang Taksi D K I Jakarta [3 ORG x 2 HARI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Utara) [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	138,000	828,000	SBM
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			177,994,000	RM
	> SULAWESI UTARA			75,298,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [3 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	3.0 OP	5,102,000	15,306,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Sulawesi Utara) [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	1,050,000	4,200,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Sulawesi Utara) [18 ORG x 2 HARI]	36.0 OP	737,000	26,532,000	SBM
	- Uang Harian Dinas Biasa [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	370,000	7,400,000	
	- Uang Harian Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	130,000	5,200,000	SBM
	- Uang Taksi D K I Jakarta [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	256,000	10,240,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Utara) [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	138,000	5,520,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	> BALI			102,696,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	3,262,000	13,048,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	1,569,000	6,276,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah [18 ORG x 2 HARI]	36.0 OH	1,352,000	48,672,000	
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [20 ORG x 2 HARI]	40.0 OH	160,000	6,400,000	
	- Uang Harian Dinas Biasa [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	480,000	9,600,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	256,000	10,240,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bali) [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	189,000	7,560,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
C	<u>Pelaporan</u>			51,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,100,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 KALI]	50.0 PKT	300,000	15,000,000	
	- Penggandaan [1 EKS x 2 KALI]	2.0 EKS	50,000	100,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			35,650,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [50 ORG x 1 HARI]	50.0 OP	433,000	21,650,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 1 HARI]	50.0 OH	130,000	6,500,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [50 ORG x 1 KALI]	50.0 OK	150,000	7,500,000	SBM
6008.ABB.003	Rekomendasi Kebijakan Investasi Strategis	3.0 Rekomendasi Kebijakan		2,100,000,000	
051	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan			490,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			124,096,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 27

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			46,790,000	RM
	- ATK [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	22,000	10,560,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	53,000	25,440,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak Spanduk [4 PKT x 1 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 4 KALI]	20.0 PKT	39,500	790,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			36,900,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 3 KALI]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			40,406,000	RM
	> JAWA BARAT			40,406,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [4 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	8.0 OP	822,000	6,576,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [5 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	150,000	1,500,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OH	430,000	2,150,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	300,000	3,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [15 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	30.0 OP	822,000	24,660,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			290,458,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			51,540,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Seminar Kit [40 ORG x 1 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	22,000	10,560,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	53,000	25,440,000	SBM
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	250,000	750,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 4 KALI]	20.0 EKS	39,500	790,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Konsultan Perorangan Dukungan Pengelolaan Kebijakan Akuntansi Negara	1.0 OK	100,000,000	100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 28

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			12,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 3 JAM x 1 KALI]	9.0 OJ	900,000	8,100,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			30,262,000	RM
	> JAWA TENGAH			30,262,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG	5.0 OK	2,182,000	10,910,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (JAWA TENGAH)	2.0 OH	1,850,000	3,700,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TENGAH)	8.0 OH	1,024,000	8,192,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah)	10.0 OK	90,000	900,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah)	10.0 OH	370,000	3,700,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			95,856,000	RM
	> JAWA TENGAH			95,856,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	2,182,000	21,820,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	1,204,000	4,816,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III [8 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	16.0 OH	750,000	12,000,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah)	20.0 OK	90,000	1,800,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	370,000	3,700,000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA TENGAH	10.0 OH	130,000	1,300,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III [30 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	60.0 OH	750,000	45,000,000	
C	<u>Pelaporan</u>			75,446,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			14,650,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 3 KALI]	90.0 OK	22,000	1,980,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 3 KALI]	90.0 OK	53,000	4,770,000	SBM
	- Seminar Kit [18 ORG x 1 KALI]	18.0 PKT	300,000	5,400,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan	5.0 EKS	50,000	250,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 29

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			23,500,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			37,296,000	RM
	> JAWA			37,296,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	822,000	3,288,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [3 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OK	300,000	1,800,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [17 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	34.0 OP	822,000	27,948,000	SBM
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau			1,100,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>196,326,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			52,250,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	22,000	10,560,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 16 KALI]	480.0 OK	53,000	25,440,000	SBM
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 KALI]	50.0 PKT	300,000	15,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			47,700,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	900,000	27,000,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 30

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			96,376,000	RM
	> JAWA			96,376,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [9 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	18.0 OP	822,000	14,796,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [10 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [10 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	10.0 OH	430,000	4,300,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [10 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	20.0 OK	300,000	6,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [40 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	80.0 OP	822,000	65,760,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			723,968,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			98,704,000	RM
	- ATK [1 PKT x 8 KALI]	8.0 PKT	1,000,000	8,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	22,000	17,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	53,000	42,400,000	SBM
	- Seminar Kit [50 ORG x 2 KALI]	100.0 PKT	300,000	30,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [6 EKS x 1 KALI]	6.0 PKT	34,000	204,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			186,600,000	RM
	POKJA TIM TEKNIS PERCEPATAN KEBIJAKAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PROYEK STRATEGIS NASIONAL KAWASAN INDUSTRI HIJAU TAN			186,600,000	
	> Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 6 BLN x 1 KALI]	6.0 OB	750,000	4,500,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 6 BLN x 1 KALI]	6.0 OB	650,000	3,900,000	
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [2 ORG x 6 BLN x 1 KALI]	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [6 ORG x 6 BLN x 1 KALI]	36.0 OB	500,000	18,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [51 ORG x 6 BLN x 1 KALI]	306.0 OB	500,000	153,000,000	SBM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Jasa Konsultan Industri Hijau	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			47,700,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	900,000	27,000,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			290,964,000	RM
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - TARAKAN [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	4,057,000	81,140,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Kalimantan Utara) [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OP	1,282,000	10,256,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III (Kalimantan Utara) [8 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	32.0 OP	874,000	27,968,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota KALIMANTAN UTARA [10 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Utara) [10 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	40.0 OK	256,000	10,240,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Utara) [10 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	40.0 OK	218,000	8,720,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	150,000	1,200,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III (Kalimantan Utara) [40 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	160.0 OP	874,000	139,840,000	SBM
C	<u>Pelaporan</u>			179,706,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			70,250,000	RM
	- ATK [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	22,000	17,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	53,000	42,400,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak Spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan	20.0 EKS	50,000	1,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			49,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	900,000	27,000,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 3 KALI]	3.0 ORKAL	700,000	2,100,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 32

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			60,356,000	RM
	> JAWA			60,356,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [19 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	38.0 OP	822,000	31,236,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis			510,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>96,381,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			19,605,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 5 KALI]	150.0 OK	22,000	3,300,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 5 KALI]	150.0 OK	53,000	7,950,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak Spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [3 EKS x 1 KALI]	3.0 EKS	35,000	105,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			37,700,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 3 JAM x 3 KALI]	27.0 OJ	900,000	24,300,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			39,076,000	RM
	> JAWA BARAT			39,076,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah [3 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	6.0 OP	822,000	4,932,000	SBM
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [4 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	8.0 OH	150,000	1,200,000	SBM
	- Uang Harian Dinas Biasa [4 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	- Satuan Biaya Transportasi [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	300,000	2,400,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah [16 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	32.0 OP	822,000	26,304,000	SBM
B	<i>Pelaksanaan</i>			<i>327,338,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 33

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			27,900,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [35 ORG x 5 KALI]	175.0 OK	22,000	3,850,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [35 ORG x 5 KALI]	175.0 OK	53,000	9,275,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 2 KALI]	40.0 PKT	300,000	12,000,000	
	- Penggandaan [5 PKT x 5 KALI]	25.0 PKT	31,000	775,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Konsultan Bidang Hukum Sektor Investasi Strategis	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			45,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 3 JAM x 4 KALI]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 4 KALI]	24.0 OJ	900,000	21,600,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			153,838,000	RM
	> KALIMANTAN UTARA			153,838,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [7 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	14.0 OK	4,057,000	56,798,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OP	1,282,000	5,128,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboarddi Luar Kantor Eselon III ke bawah [7 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	28.0 OH	874,000	24,472,000	
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [7 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	14.0 OH	150,000	2,100,000	SBM
	- Uang Harian Dinas Biasa [7 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	14.0 OK	430,000	6,020,000	
	- Uang Taksi D K I Jakarta [7 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	28.0 OK	256,000	7,168,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Utara) [7 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	28.0 OK	218,000	6,104,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	150,000	600,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboarddi Luar Kantor Eselon III ke bawah [13 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	52.0 OH	874,000	45,448,000	
C	<u>Pelaporan</u>			86,281,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,105,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [20 ORG x 5 KALI]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [20 ORG x 5 KALI]	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 5 KALI]	25.0 EKS	44,200	1,105,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 34

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			31,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 4 KALI]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 4 KALI]	16.0 OJ	900,000	14,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			39,076,000	RM
	> JAWA BARAT			39,076,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah [3 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	6.0 OP	822,000	4,932,000	SBM
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [4 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	8.0 OH	150,000	1,200,000	SBM
	- Uang Harian Dinas Biasa [4 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	- Satuan Biaya Transportasi [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	300,000	2,400,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah [16 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	32.0 OP	822,000	26,304,000	SBM
6008.ABB.004	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	3.0 Rekomendasi Kebijakan		1,900,000,000	
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial			680,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			73,643,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			28,403,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 8 KALI]	240.0 OK	22,000	5,280,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 8 KALI]	240.0 OK	53,000	12,720,000	SBM
	- Seminar Kit [25 ORG x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 19 KALI]	38.0 EKS	43,500	1,653,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			11,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,400,000	2,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 35

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI) Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di - Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI] - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI] - Satuan Biaya Transportasi [20 ORG x 2 KALI]			33,440,000	RM
			822,000	16,440,000	SBM
		20.0 OP			
		20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
		40.0 OK	350,000	14,000,000	
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan</i>			525,391,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) - ATK [5 PKT x 1 KALI] - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 16 KALI] - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 16 KALI] - Seminar Kit [30 ORG x 1 KALI] - Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI] - Penggandaan [2 PKT x 41 KALI]			78,477,000	RM
		5.0 PKT	1,000,000	5,000,000	
		800.0 OK	22,000	17,600,000	
		800.0 OK	53,000	42,400,000	SBM
		30.0 PKT	300,000	9,000,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		82.0 PKT	48,500	3,977,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI) Jasa Konsultasi Legal Perorangan Pengembangan - Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Sosial Si [1 PKT x 1 KALI] Jasa Konsultasi Legal Perorangan Pengembangan - Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Sosial Si [1 PKT x 1 KALI]			200,000,000	RM
		1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
		1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI] - Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI]			17,800,000	RM
		4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
		4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
		6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
		4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 36

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			206,129,000	RM
	> JAWA TENGAH			77,382,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	2,182,000	21,820,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	4,242,000	12,726,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	1,850,000	5,550,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	1,024,000	9,216,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [5 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	15.0 OH	600,000	9,000,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	90,000	1,800,000	SBM
	- Uang Harian [10 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	370,000	11,100,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> JAWA TIMUR			78,847,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	2,674,000	26,740,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (JAWA TIMUR) [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	2,007,000	6,021,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TIMUR) [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	1,076,000	9,684,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR) [6 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	18.0 OH	814,000	14,652,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	194,000	3,880,000	SBM
	- Uang Harian [10 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	410,000	12,300,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> BEKASI, JAWA BARAT			49,900,000	
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kabupaten bekasi [10 ORG x 2 KALI x 5 KALI]	100.0 OK	284,000	28,400,000	SBM
	- Uang Harian [10 ORG x 1 HARI x 5 KALI]	50.0 OH	430,000	21,500,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			22,985,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OP	667,000	3,335,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [25 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	25.0 OP	433,000	10,825,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	130,000	3,900,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI]	30.0 OK	150,000	4,500,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	3.0 OH	75,000	225,000	SBM
C	<i>Pelaporan</i>			80,966,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 37

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			38,390,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 6 KALI]	300.0 OK	22,000	6,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 6 KALI]	300.0 OK	53,000	15,900,000	SBM
	- Seminar Kit [37 ORG x 1 KALI]	37.0 PKT	300,000	11,100,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 10 KALI]	80.0 EKS	41,125	3,290,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			14,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			27,976,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OP	667,000	3,335,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [32 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	32.0 OP	433,000	13,856,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [37 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	37.0 OH	130,000	4,810,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [37 ORG x 1 KALI]	37.0 OK	150,000	5,550,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	75,000	225,000	SBM
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha			585,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			81,378,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			43,900,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 12 KALI]	480.0 OK	22,000	10,560,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 12 KALI]	480.0 OK	53,000	25,440,000	SBM
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Seminar Kit [20 PKT x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 5 KALI]	10.0 EKS	40,000	400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 38

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			11,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	2.0 OJ	1,400,000	2,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			25,678,000	RM
	> BANTEN			25,678,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon I/II [4 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	632,000	2,528,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah [16 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	16.0 OP	425,000	6,800,000	SBM
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	85,000	1,700,000	SBM
	- Satuan Biaya Transportasi [20 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	40.0 OH	350,000	14,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	1.0 OH	200,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			423,287,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			87,520,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biosa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	22,000	22,000,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	53,000	53,000,000	SBM
	- Seminar Kit [32 PKT x 1 KALI]	32.0 PKT	300,000	9,600,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [5 PKT x 1 KALI]	5.0 PKT	250,000	1,250,000	
	- Penggandaan [4 EKS x 5 KALI]	20.0 EKS	33,500	670,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Jasa Konsultansi Legal Perorangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Pro [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 39

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			194,956,000	RM
	> Semarang, Jawa Tengah			75,304,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	2,182,000	43,640,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	1,850,000	3,700,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV [3 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	1,024,000	6,144,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [6 ORG x 2 HARI]	12.0 OH	600,000	7,200,000	SBM
	- Uang Taksi D K I Jakarta [10 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	256,000	5,120,000	SBM
	- Uang Taksi Daerah [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	90,000	1,800,000	SBM
	- Uang Harian [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	370,000	7,400,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
	> Bekasi, Jawa Barat			39,920,000	
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kabupaten bekasi [8 ORG x 2 KALI x 5 KALI]	80.0 OK	284,000	22,720,000	SBM
	- Uang Harian [8 ORG x 1 HARI x 5 KALI]	40.0 OH	430,000	17,200,000	
	> Surabaya, Jawa Timur			79,732,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OK	2,674,000	32,088,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	2,007,000	8,028,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	1,076,000	8,608,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [3 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	12.0 OH	814,000	9,768,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	24.0 OK	256,000	6,144,000	SBM
	- Uang Taksi Daerah [6 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	24.0 OK	194,000	4,656,000	
	- Uang Harian [6 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	24.0 OH	410,000	9,840,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	150,000	600,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			24,411,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OP	667,000	3,335,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [27 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	27.0 OP	433,000	11,691,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [32 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	32.0 OH	130,000	4,160,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [32 ORG x 1 KALI]	32.0 OK	150,000	4,800,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	3.0 OH	75,000	225,000	SBM
C	<i>Pelaporan</i>			80,335,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 40

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			41,350,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	22,000	8,800,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	53,000	21,200,000	SBM
	- Seminar Kit [30 PKT x 1 KALI]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [17 EKS x 1 KALI]	17.0 EKS	50,000	850,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			22,985,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OP	667,000	3,335,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [25 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	25.0 OP	433,000	10,825,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	130,000	3,900,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI]	30.0 OK	150,000	4,500,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	3.0 OH	75,000	225,000	SBM
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi			635,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			105,714,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			51,798,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	22,000	11,000,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	53,000	26,500,000	SBM
	- Seminar Kit [30 PKT x 1 KALI]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 1 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 10 KALI]	80.0 PKT	47,475	3,798,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 41

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			37,516,000	RM
	> Bogor, Jawa Barat			37,516,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon I/II [4 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	692,000	2,768,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah [26 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	26.0 OP	498,000	12,948,000	SBM
	- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan				
	- Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	105,000	3,150,000	SBM
	- Satuan Biaya Transportasi [30 ORG x 2 KALI]	60.0 OK	300,000	18,000,000	
	- Uang Representasi I [1 ORG x 1 HARI]	1.0 OH	200,000	200,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			394,870,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			70,834,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [52 ORG x 15 KALI]	780.0 OK	22,000	17,160,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [52 ORG x 15 KALI]	780.0 OK	53,000	41,340,000	SBM
	- Seminar Kit [30 PKT x 1 KALI]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [5 PKT x 1 KALI]	5.0 PKT	250,000	1,250,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 5 KALI]	25.0 EKS	43,360	1,084,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			75,000,000	RM
	- Jasa Tenaga Pendukung Perorangan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah Dan Badan Usaha Pada Sektor Infrastruktur Ekonomi Ja [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			16,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 42

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			164,259,000	RM
	> SOLO JAWA TENGAH			67,456,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SOLO [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	2,342,000	23,420,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	1,850,000	5,550,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	1,024,000	9,216,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [6 ORG x 3 HARI]	18.0 OH	600,000	10,800,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	SBM
	- Uang Taksi Daerah [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	90,000	1,800,000	SBM
	- Uang Harian [10 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	370,000	11,100,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	> Bekasi, Jawa Barat			15,968,000	
	- Satuan Biaya Transportasi [8 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	32.0 OK	284,000	9,088,000	
	- Uang Harian [8 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	16.0 OK	430,000	6,880,000	
	> Bogor, Jawa Barat			16,480,000	
	- Satuan Biaya Transportasi [8 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	32.0 OK	300,000	9,600,000	
	- Uang Harian [8 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	16.0 OH	430,000	6,880,000	
	> Surabaya, Jawa Timur			64,355,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [8 ORG x 1 KALI]	8.0 OK	2,674,000	21,392,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	2,007,000	6,021,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV [3 ORG x 3 HARI]	9.0 OH	1,076,000	9,684,000	
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [4 ORG x 3 HARI]	12.0 OH	814,000	9,768,000	
	- Uang Taksi D K I Jakarta [8 ORG x 2 KALI]	16.0 OK	256,000	4,096,000	
	- Uang Taksi Daerah [8 ORG x 2 KALI]	16.0 OK	194,000	3,104,000	
	- Uang Harian [8 ORG x 3 HARI]	24.0 OH	410,000	9,840,000	
	- Uang Representasi II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			22,985,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	5.0 OP	667,000	3,335,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [25 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	25.0 OP	433,000	10,825,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	130,000	3,900,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI]	30.0 OK	150,000	4,500,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [2 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 1 HAIR x 1 KALI]	3.0 OH	75,000	225,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 43

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			45,392,000	RM
	> Tiongkok			45,392,000	
	- Visa [1 ORG x 1 KALI]	1.0 OK	1,500,000	1,500,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara PP [1 ORG x 1 KALI]	1.0 OK	23,534,000	23,534,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A/B/C/D [1 ORG x 4 HARI]	4.0 OH	5,089,500	20,358,000	
C	<u>Pelaporan</u>			134,416,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			46,680,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	22,000	11,000,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	53,000	26,500,000	SBM
	- Seminar Kit [18 PKT x 1 KALI]	18.0 PKT	300,000	5,400,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Pengandaan [50 EKS x 2 KALI]	100.0 EKS	25,300	2,530,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			27,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			35,664,000	RM
	> SEMARANG JAWA TENGAH			35,664,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	2,182,000	10,910,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	1,850,000	5,550,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	1,024,000	6,144,000	SBM
	- Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	600,000	3,600,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Uang Taksi Daerah [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	90,000	900,000	SBM
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	15.0 OH	370,000	5,550,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 44

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			24,872,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat Fullday di Luar Kantor Eselon I/II [3 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	6.0 OP	667,000	4,002,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [15 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	30.0 OP	433,000	12,990,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [18 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	36.0 OH	130,000	4,680,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [18 ORG x 1 KALI]	18.0 OK	150,000	2,700,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	2.0 OH	100,000	200,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	75,000	300,000	SBM
6008.ABB.005	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Investasi dan Pertambangan	3.0 Rekomendasi Kebijakan		4,400,000,000	
051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Dukungan Penanganan Sengketa atau Permasalahan Investasi dan Perdagangan			1,000,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			21,000,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 5 KALI]	250.0 OK	22,000	5,500,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 5 KALI]	250.0 OK	53,000	13,250,000	SBM
	- Penggandaan [9 EKS x 5 KALI]	45.0 EKS	50,000	2,250,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			29,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 5 KALI]	10.0 OJ	900,000	9,000,000	SBM
B	<i>Pelaksanaan</i>			850,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			81,940,000	RM
	- ATK [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 4 KALI]	160.0 OK	22,000	3,520,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 4 KALI]	160.0 OK	53,000	8,480,000	SBM
	- Seminar Kit [60 ORG x 2 KALI]	120.0 PKT	300,000	36,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 2 KALI]	10.0 EKS	44,000	440,000	
	- Cetak Dokumen Sidang Kasus Sengketa DS 592 [60 PKT x 2 KALI]	120.0 PKT	250,000	30,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 45

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			120,000,000	RM
	> POKJA Penanganan DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials			120,000,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 10 BLN x 1 KALI]	10.0 OB	750,000	7,500,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [2 ORG x 10 BLN]	20.0 OB	700,000	14,000,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 10 BLN x 1 KALI]	10.0 OB	650,000	6,500,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [2 ORG x 10 BLN x 1 KALI]	20.0 OB	600,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 10 BLN x 1 KALI]	10.0 OB	500,000	5,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [15 ORG x 10 BLN x 1 KALI]	150.0 OB	500,000	75,000,000	SBM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			25,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 4 KALI]	16.0 OJ	900,000	14,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	4.0 ORKAL	700,000	2,800,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			26,776,000	RM
	> JAWA TIMUR			26,776,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	2,674,000	10,696,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TIMUR) [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	1,076,000	4,304,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR) [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	814,000	3,256,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	256,000	2,048,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [4 ORG x 2 KALI]	8.0 OK	194,000	1,552,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) [4 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	12.0 OH	410,000	4,920,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			356,880,000	RM
	> JAWA BARAT			356,880,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [60 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	240.0 OP	822,000	197,280,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [60 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	240.0 OH	150,000	36,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [60 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	120.0 OH	430,000	51,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [60 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	240.0 OK	300,000	72,000,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 46

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			239,204,000	RM
	> SWISS			239,204,000	
	- Visa [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	2,000,000	4,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara PP [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	64,236,500	128,473,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A [1 ORG x 6 HARI]	6.0 OH	9,381,000	56,286,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan B [1 ORG x 6 HARI]	6.0 OH	8,407,500	50,445,000	
C	<i>Pelaporan</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			27,020,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 4 KALI]	200.0 OK	22,000	4,400,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 4 KALI]	200.0 OK	53,000	10,600,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Penggandaan [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	20,000	20,000	
	- Cetak Dokumen Sidang Kasus Sengketa DS 592 [20 PKT x 1 KALI]	20.0 PKT	250,000	5,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			13,500,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 3 KALI]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			59,480,000	RM
	> JAWA BARAT			59,480,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OP	822,000	32,880,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri			1,100,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			14,040,000	RM
	- ATK [3 PKT x 1 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 1 KALI]	50.0 OK	22,000	1,100,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 1 KALI]	50.0 OK	53,000	2,650,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [13 EKS x 2 KALI]	26.0 EKS	40,000	1,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 47

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			11,900,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			24,060,000	RM
	> JAWA BARAT			24,060,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat)	20.0 OP	498,000	9,960,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA BARAT	20.0 OH	105,000	2,100,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
<i>B</i>	<i>Polaksanaan</i>			1,000,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			139,231,000	RM
	- ATK [1 PKT x 6 KALI]	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 19 KALI]	950.0 OK	22,000	20,900,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 19 KALI]	950.0 OK	53,000	50,350,000	SBM
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 KALI x 4 KALI]	200.0 PKT	300,000	60,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 6 KALI]	6.0 PKT	250,000	1,500,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 2 KALI]	10.0 EKS	48,100	481,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			85,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 4 KALI]	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 9 KALI]	36.0 OJ	1,000,000	36,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 9 KALI]	36.0 OJ	900,000	32,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI x 4 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			255,200,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [50 ORG x 2 HARI x 4 KALI]	400.0 OP	433,000	173,200,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 2 HARI x 4 KALI]	400.0 OH	130,000	52,000,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [50 ORG x 4 KALI]	200.0 OK	150,000	30,000,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 48

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			189,450,000	RM
	> BALI			189,450,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - DENPASAR [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	3,262,000	65,240,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Bali) [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OP	1,569,000	12,552,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Bali) [8 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	32.0 OP	1,419,000	45,408,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota B A L I [10 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	40.0 OH	160,000	6,400,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [10 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	20.0 OH	480,000	9,600,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	40.0 OK	256,000	10,240,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bali) [10 ORG x 2 KALI x 2 KALI]	40.0 OK	189,000	7,560,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	200,000	1,200,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Bali) [5 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	10.0 OP	652,000	6,520,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Bali) [15 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	30.0 OP	441,000	13,230,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota B A L I [20 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	40.0 OH	115,000	4,600,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	40.0 OK	150,000	6,000,000	SBM
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			330,919,000	RM
	> KOREA SELATAN			330,919,000	
	- Visa [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	1,000,000	4,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara PP [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	43,748,500	174,994,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan C [4 ORG x 5 HARI]	20.0 OH	7,596,250	151,925,000	
C	<i>Pelaporan</i>			50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			20,340,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 4 KALI]	160.0 OK	22,000	3,520,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 4 KALI]	160.0 OK	53,000	8,480,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KALI]	20.0 PKT	300,000	6,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 1 KALI]	2.0 PKT	45,000	90,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			5,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM x 1 KALI]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 49

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			24,060,000	RM
	> JAWA BARAT			24,060,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA BARAT	20.0 OP	498,000	9,960,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	20.0 OH	105,000	2,100,000	SBM
		40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PDB Kemaritiman			2,300,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>120,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			68,800,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 15 KALI]	900.0 OK	22,000	19,800,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 15 KALI]	900.0 OK	53,000	47,700,000	SBM
	- Penggandaan [13 EKS x 2 KALI]	26.0 EKS	50,000	1,300,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			51,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 6 KALI]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 6 KALI]	24.0 OJ	900,000	21,600,000	SBM
B	<i>Pelaksanaan</i>			<i>2,000,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			143,032,000	RM
	- ATK [1 PKT x 7 KALI]	7.0 PKT	1,000,000	7,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	22,000	17,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 20 KALI]	800.0 OK	53,000	42,400,000	SBM
	- Seminar Kit [30 ORG x 4 KALI]	120.0 PKT	300,000	36,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 5 KALI]	5.0 PKT	250,000	1,250,000	
	- Cetak Dokumen [30 EKS x 5 KALI]	150.0 EKS	250,000	37,500,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 5 KALI]	40.0 EKS	32,050	1,282,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 50

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			868,800,000	RM
	> POKJA Penghitungan Produk Domestik Bruto Kemaritiman			349,600,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,500,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,250,000	10,000,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	16.0 OB	850,000	13,600,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	750,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	400.0 OB	750,000	300,000,000	SBM
	> POKJA Kegiatan Penyusun Bidang Standar Data Statistik Kemaritiman			289,600,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,500,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,250,000	10,000,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	16.0 OB	850,000	13,600,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	750,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	320.0 OB	750,000	240,000,000	SBM
	> POKJA Kegiatan Penyusun Bidang Metadata Statistik Kemaritiman			229,600,000	
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,500,000	12,000,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,250,000	10,000,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	1,000,000	8,000,000	SBM
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	16.0 OB	850,000	13,600,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	8.0 OB	750,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen)	240.0 OB	750,000	180,000,000	SBM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			148,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 18 KALI]	72.0 OJ	1,000,000	72,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 18 KALI]	72.0 OJ	900,000	64,800,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 8 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 51

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			72,993,000	RM
	> MALUKU			72,993,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - AMBON [6 ORG x 1 KALI]	6.0 OK	7,081,000	42,486,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU) [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	1,048,000	9,432,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU) [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	667,000	6,003,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OK	256,000	3,072,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku) [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OK	240,000	2,880,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) [6 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	24.0 OH	380,000	9,120,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			175,440,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OP	1,347,000	10,776,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [28 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	112.0 OP	1,197,000	134,064,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	120.0 OH	180,000	21,600,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI]	60.0 OK	150,000	9,000,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			267,660,000	RM
	> JAWA			267,660,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [30 ORG x 2 HARI x 3 KALI]	180.0 OP	822,000	147,960,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [30 ORG x 2 HARI x 3 KALI]	180.0 OH	150,000	27,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [30 ORG x 1 HARI x 3 KALI]	90.0 OH	430,000	38,700,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [30 ORG x 2 KALI]	180.0 OK	300,000	54,000,000	SBM
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			324,075,000	RM
	> AUSTRALIA			324,075,000	
	- Visa [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	1,000,000	4,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara PP [4 ORG x 1 KALI]	4.0 OK	36,875,000	147,500,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan C [4 ORG x 5 HARI]	20.0 OH	8,628,750	172,575,000	
C	<i>Polaporan</i>			180,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 52

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			62,400,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 14 KALI]	560.0 OK	22,000	12,320,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 14 KALI]	560.0 OK	53,000	29,680,000	SBM
	- Seminar Kit [20 ORG x 3 KALI]	60.0 PKT	300,000	18,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	250,000	750,000	
	- Penggandaan [13 EKS x 1 KALI]	13.0 EKS	50,000	650,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			29,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I)	2.0 OJ	1,400,000	2,800,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 1 JAM x 7 KALI]	14.0 OJ	1,000,000	14,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI]	8.0 ORKAL	700,000	5,600,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			28,520,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [20 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	40.0 OP	433,000	17,320,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	40.0 OH	130,000	5,200,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	150,000	6,000,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			59,480,000	RM
	> JAWA			59,480,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OP	822,000	32,880,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [20 ORG x 1 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	SBM
6008.ABI	<u>Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam[Base Line]</u>	3.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi		2,100,000,000	
6008.ABI.001	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT <u>Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Pertambangan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia</u>	3.0 Rekomendasi Kebijakan		2,100,000,000	
051	<u>Perencanaan dan Persiapan</u>			420,000,000	U
A				105,916,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 53

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			47,800,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	22,000	11,000,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 10 KALI]	500.0 OK	53,000	26,500,000	SBM
	- Seminar Kit [30 ORG x 1 PKT]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 2 KALI]	16.0 EKS	50,000	800,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			14,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 1 JAM x 3 KALI]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 1 JAM x 3 KALI]	9.0 OJ	900,000	8,100,000	SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			44,016,000	RM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	4.0 OP	667,000	2,668,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [28 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	56.0 OP	433,000	24,248,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	60.0 OH	130,000	7,800,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [30 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	60.0 OK	150,000	9,000,000	SBM
	- Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	75,000	300,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			210,235,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			52,632,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 11 KALI]	550.0 OK	22,000	12,100,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 11 KALI]	550.0 OK	53,000	29,150,000	SBM
	- Seminar Kit [30 ORG x 1 PKT]	30.0 PKT	300,000	9,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [10 EKS x 5 KALI]	50.0 EKS	42,640	2,132,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			23,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 1 JAM x 3 KALI]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 1 JAM x 6 KALI]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 54

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			43,757,000	RM
	> BANGKA BELITUNG			43,757,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PANGKAL PINANG [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	2,139,000	10,695,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (BANGKA BELITUNG) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	3,827,000	7,654,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (BANGKA BELITUNG) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	2,838,000	5,676,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (BANGKA BELITUNG) [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	1,957,000	7,828,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (BANGKA BELITUNG) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	622,000	1,244,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bangka Belitung) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	90,000	900,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bangka Belitung) [5 ORG x 3 HARI]	15.0 OH	410,000	6,150,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			90,246,000	RM
	> JAWA BARAT			90,246,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [29 ORG x 2 HARI]	58.0 OP	822,000	47,676,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [30 ORG x 2 HARI]	60.0 OH	150,000	9,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [30 ORG x 1 HARI]	30.0 OH	430,000	12,900,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [30 ORG x 2 KALI]	60.0 OK	300,000	18,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
C	<u>Pelaporan</u>			103,849,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			21,548,000	RM
	- ATK [1 PKT x 3 KALI]	3.0 PKT	1,000,000	3,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 6 KALI]	180.0 OK	22,000	3,960,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [30 ORG x 6 KALI]	180.0 OK	53,000	9,540,000	SBM
	- Seminar Kit [13 ORG x 1 PKT]	13.0 PKT	300,000	3,900,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [5 EKS x 4 KALI]	20.0 EKS	44,900	898,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 55

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			41,673,000	RM
	> SULAWESI SELATAN			41,673,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	3,829,000	19,145,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (SULAWESI SELATAN) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,938,000	3,876,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI SELATAN) [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	1,138,000	4,552,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SULAWESI SELATAN) [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	745,000	2,980,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	166,000	1,660,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) [5 ORG x 3 HARI]	15.0 OH	430,000	6,450,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			40,628,000	RM
	> JAWA BARAT			40,628,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [19 ORG x 1 HARI]	19.0 OP	822,000	15,618,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	150,000	3,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	150,000	300,000	SBM
052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia			834,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>181,482,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			54,600,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	22,000	8,800,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 10 KALI]	400.0 OK	53,000	21,200,000	SBM
	- Seminar Kit [40 ORG x 2 PKT]	80.0 PKT	300,000	24,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Penggandaan [2 EKS x 1 KALI]	2.0 EKS	50,000	100,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			8,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 1 JAM x 1 KALI]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 1 JAM x 3 KALI]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 56

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			58,276,000	RM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	4.0 OP	667,000	2,668,000	SBM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [38 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	76.0 OP	433,000	32,908,000	SBM
	Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	80.0 OH	130,000	10,400,000	SBM
	Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [40 ORG x 1 KALI x 2 KALI]	80.0 OK	150,000	12,000,000	SBM
	Uang Representasi Dalam Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	75,000	300,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			60,506,000	RM
	> JAWA BARAT			60,506,000	
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [19 ORG x 2 HARI]	38.0 OP	822,000	31,236,000	SBM
	Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [20 ORG x 2 HARI]	40.0 OH	150,000	6,000,000	SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [20 ORG x 1 HARI]	20.0 OH	430,000	8,600,000	SBM
	Satuan biaya transportasi [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
	Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan</i>			529,700,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			57,470,000	RM
	- ATK [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 12 KALI]	480.0 OK	22,000	10,560,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 12 KALI]	480.0 OK	53,000	25,440,000	SBM
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 PKT]	50.0 PKT	300,000	15,000,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [2 PKT x 2 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 5 KALI]	40.0 EKS	36,750	1,470,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			11,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 1 JAM x 3 KALI]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 1 JAM x 4 KALI]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 57

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			85,382,000	RM
	> MALUKU UTARA			85,382,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - TERNATE [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	6,664,000	33,320,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (MALUKU UTARA) [1 ORG30 x 4 HARI]	4.0 OH	3,440,000	13,760,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon II (MALUKU UTARA) [1 ORG30 x 4 HARI]	4.0 OH	3,175,000	12,700,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon III (MALUKU UTARA) [1 ORG30 x 4 HARI]	4.0 OH	1,073,000	4,292,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon IV (MALUKU UTARA) [2 ORG30 x 4 HARI]	8.0 OH	600,000	4,800,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	256,000	2,560,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku Utara) [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	215,000	2,150,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [5 ORG x 5 HARI]	25.0 OH	430,000	10,750,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			91,272,000	RM
	> JAWA BARAT			91,272,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OP	1,110,000	4,440,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [28 ORG x 2 HARI]	56.0 OP	822,000	46,032,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [30 ORG x 2 HARI]	60.0 OH	150,000	9,000,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [30 ORG x 1 HARI]	30.0 OH	430,000	12,900,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [30 ORG x 2 KALI]	60.0 OK	300,000	18,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	SBM
524219	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			283,976,000	RM
	> Amerika Serikat			283,976,000	
	- Visa [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	2,320,000	4,640,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	56,625,500	113,251,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A/B/C/D [2 ORG x 10 HARI]	20.0 OH	8,304,250	166,085,000	
C	<i>Pelaporan</i>			122,818,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 58

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			34,500,000	RM
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [35 ORG x 10 KALI]	350.0 OK	22,000	7,700,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [35 ORG x 10 KALI]	350.0 OK	53,000	18,550,000	SBM
	- Seminar Kit [25 PKT x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [10 EKS x 1 KALI]	10.0 EKS	50,000	500,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			88,318,000	RM
	> DIY			88,318,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [15 ORG x 1 KALI]	15.0 OK	2,268,000	34,020,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.I. Yogyakarta) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OP	1,204,000	2,408,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.I. Yogyakarta) [14 ORG x 2 HARI]	28.0 OP	750,000	21,000,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 2 HARI]	30.0 OH	140,000	4,200,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [15 ORG x 1 HARI]	15.0 OH	420,000	6,300,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [15 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	30.0 OK	256,000	7,680,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [15 ORG x 2 KALI]	30.0 OK	222,000	6,660,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.I. Yogyakarta) [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OP	310,000	3,100,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.I. YOGYAKARTA [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OH	100,000	1,000,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	SBM
053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia			846,000,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan</i>			<i>202,126,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			69,750,000	RM
	- ATK [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 16 KALI]	800.0 OK	22,000	17,600,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 16 KALI]	800.0 OK	53,000	42,400,000	SBM
	- Seminar Kit [25 ORG x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Penggandaan [1 EKS x 5 KALI]	5.0 EKS	50,000	250,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			57,000,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [3 ORG x 1 JAM x 10 KALI]	30.0 OJ	1,000,000	30,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 1 JAM x 10 KALI]	30.0 OJ	900,000	27,000,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(120)
(01)
(350494)
Rp. 16,300,000,000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Halaman : 59

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			75,376,000	RM
	> JAWA BARAT			75,376,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [24 ORG x 2 HARI]	48.0 OP	822,000	39,456,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [25 ORG x 2 HARI]	50.0 OH	150,000	7,500,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [25 ORG x 1 HARI]	25.0 OH	430,000	10,750,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi [25 ORG x 2 KALI]	50.0 OK	300,000	15,000,000	
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
B	<u>Pelaksanaan</u>			479,998,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			85,638,000	RM
	- ATK [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Seminar Kit [25 ORG x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	22,000	22,000,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 20 KALI]	1000.0 OK	53,000	53,000,000	SBM
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 4 KALI]	4.0 PKT	250,000	1,000,000	
	- Penggandaan [8 EKS x 5 KALI]	40.0 EKS	28,450	1,138,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,000,000	RM
	- Kajian Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Mineral dan Batubara [1 PKT x 2 KALI]	2.0 PKT	50,000,000	100,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			100,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon I) [6 ORG x 1 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	1,400,000	42,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [6 ORG x 1 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	1,000,000	30,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [6 ORG x 1 JAM x 5 KALI]	30.0 OJ	900,000	27,000,000	SBM
	- Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KALI]	2.0 ORKAL	700,000	1,400,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 60

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			118,584,000	RM
	> SULAWESI TENGAH			118,584,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALU [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	5,113,000	51,130,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (SULAWESI TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	2,309,000	6,927,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (SULAWESI TENGAH) [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	2,027,000	18,243,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI TENGAH) [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	1,567,000	9,402,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SULAWESI TENGAH) [4 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	12.0 OH	951,000	11,412,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Tengah) [10 ORG x 2 KALI]	20.0 OK	165,000	3,300,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Tengah) [10 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	30.0 OH	370,000	11,100,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	200,000	600,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	150,000	1,350,000	SBM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			75,376,000	RM
	> JAWA BARAT			75,376,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (Jawa Barat) [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [24 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	48.0 OP	822,000	39,456,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [25 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	50.0 OH	150,000	7,500,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [25 ORG x 1 HARI x 1 KALI]	25.0 OH	430,000	10,750,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor [25 ORG x 2 KALI]	50.0 OK	300,000	15,000,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
C	<u>Pelaporan</u>			163,876,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			66,058,000	RM
	- Seminar Kit [25 ORG x 1 KALI]	25.0 PKT	300,000	7,500,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 15 KALI]	750.0 OK	22,000	16,500,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [50 ORG x 15 KALI]	750.0 OK	53,000	39,750,000	SBM
	- Desain dan Cetak spanduk [1 PKT x 1 KALI]	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Penggandaan [7 EKS x 6 KALI]	42.0 EKS	49,000	2,058,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.175-Jakarta VI)			9,500,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [5 ORG x 1 JAM x 1 KALI]	5.0 OJ	1,000,000	5,000,000	SBM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [5 ORG x 1 JAM x 1 KALI]	5.0 OJ	900,000	4,500,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (120) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT ORG (01) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
UNIT KERJA (350494) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
ALOKASI Rp. 16,300,000,000

Halaman : 61

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.175-Jakarta VI)			88,318,000	RM
	> DIY			88,318,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [15 ORG x 1 KAL]	15.0 OK	2,268,000	34,020,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon I II (D.I. Yogyakarta) [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OP	1,204,000	2,408,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.I. Yogyakarta) [14 ORG x 2 HARI]	28.0 OP	750,000	21,000,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 2 HARI]	30.0 OH	140,000	4,200,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [15 ORG x 1 HARI]	15.0 OH	420,000	6,300,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [15 ORG x 2 KALI x 1 KALI]	30.0 OK	256,000	7,680,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [15 ORG x 2 KALI]	30.0 OK	222,000	6,660,000	SBM
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	SBM
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.I. Yogyakarta) [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OP	310,000	3,100,000	SBM
	- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota D.I. YOGYAKARTA [10 ORG x 1 HARI]	10.0 OH	100,000	1,000,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	SBM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Pusat, 28 November 2022

AYODHIA G. L. KALAKE
 Pembina Utama Madya, IV/d
 254